

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS BUDAYA LOKAL DAN
AGROWISATA
(Studi Pada Pemerintah Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**NANDA DAYUTAMI
NIM. 115030601111005**



Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Choirul Saleh, M.Si**
- 2. Hermawan, Dr. S.IP, M.Si**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2016**

MOTTO

Hidup itu memiliki waktu yang harus dimainkan, terkadang kita harus mengerti kapan kita harus berdiam, kapan kita harus mundur dan kapan kita harus maju. Jangan membuat segala sesuatu itu berada dibawah tekanan. (MSH,2016)

Hidup adalah perjuangan yang harus diperjuangkan, rintangan yang harus dihadapi, serta anugerah yang harus disyukuri.

Hidup itu merupakan sebuah pilihan, jika kita sudah memilih maka kita harus menyelesaikannya dengan baik walaupun disaat menjalankannya kita menemukan berbagai kendala yang harus di hadapi. (ND,2016)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri
Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata (Studi Pada
Pemerintah Daerah Kota Batu)

Disusun Oleh : Nanda Dayutami

NIM : 115030601111005

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

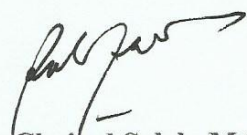
Minat : Perencanaan Pembangunan

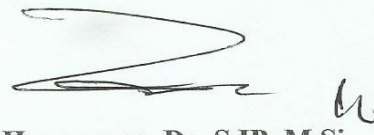
Malang, 20 Januari 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Dr. Choirul Saleh, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001


Hermawan, Dr. S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Pada :

Hari : Jum'at
 Tanggal : 29 Januari 2016
 Jam : 09.00 WIB
 Skripsi Atas Nama : Nanda Dayutami
 Judul : Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata (Studi Pada Pemerintah Kota Batu)


Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua


Anggota



Dr. Choirul Saleh, M.Si
 NIP. 19600112 198701 1 001


Hermawan, Dr. S.IP, M.Si
 NIP. 19720405 200312 1 001

Penguji I

Penguji II


Dr. Moch. Rozikin, M.AP
 NIP. 19630503 198802 1 001


Moch. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA
 NIP. 19740614 200501 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam nasakah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 20 Januari 2016


METERAI
TEMPEL
TGL. 20
1396AADF885115294
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Nanda Dayutami
115030601111005

RINGKASAN

Dayutami, Nanda. 2016. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata (Studi Pada Pemerintah Kota Batu). Skripsi. Minat Perencanaan Pembangunan. Jurusan Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. Ketua Pembimbing: Dr. Choirul Saleh, M.Si, Anggota Pembimbing: Hermawan, Dr. S.IP, M.Si. Hal. 190+vii.

Seiring dengan pertumbuhan dan perubahan status Batu menjadi “Kota” membawa dampak perubahan tersendiri terhadap wajah Kota Batu. Keberadaan gunung, hutan, dan hamparan pertanian yang mendominasi keruangan Kota Batu ini sesuai untuk pengembangan wisata alam terkait dengan dengan potensi yang ada di gunung, hutan dan kawasan petaniannya. Sebagai kota yang dikenal dengan komoditas apel maka tidak jarang pemandangan alam, air terjun, sumber air panas, agrowisata, wisata petualangan, pemanfaatan pekarangan rumah penduduk yang sebagian besar dijadikan sebagai tanaman bunga, apel, jeruk, tanaman obat, dan lain sebagainya menjadikan Kota Batu sebagai daerah agrowisata. Pengembangan wisata tidak hanya terkonsentrasi pada industri pariwisata yang berbasis agrowisata saja tetapi saat ini pengembangan wisata budaya lokal juga sudah mulai dikembangkan.

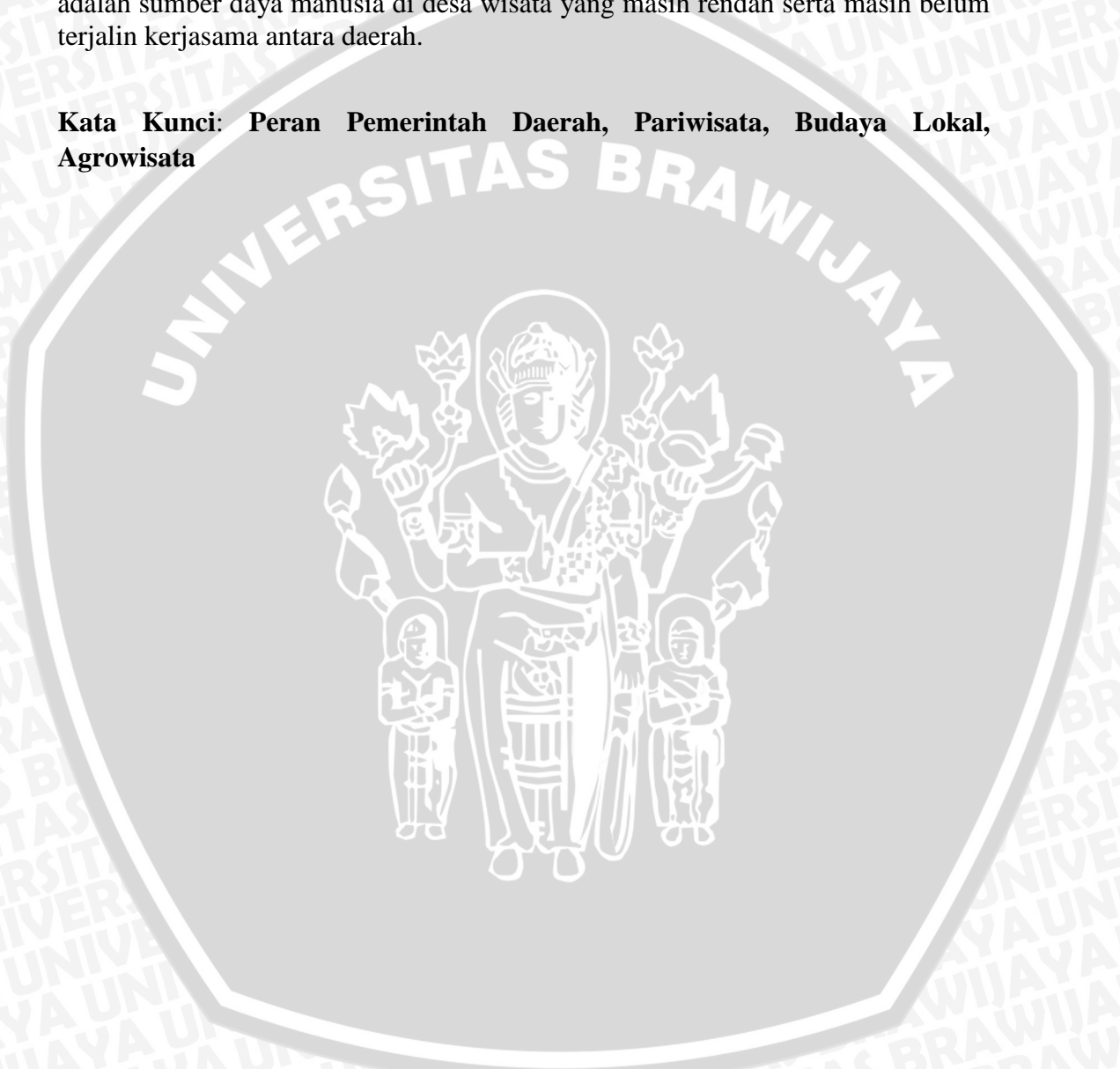
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai peran pemerintah Kota Batu dalam pengembangan industri pariwisata sesuai dengan arah kebijakan yang tertera dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu serta untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dokumentasi dan studi kepustakaan. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri, pedoman wawancara dan penunjang lainnya seperti alat perekam suara. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh John. W. Creswell.

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah yang bertugas sebagai fasilitator yang mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu, menjalin kerjasama antar daerah yang berada di sekitar Kota Batu seperti Malang Raya, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana, prasarana serta fasilitas umum yang berada di Kota Batu. Dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata ada beberapa faktor yang berpengaruh, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Beberapa faktor pendukung dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan

agrowisata adalah Kondisi Geografis dan Sumber Daya yang dimiliki Kota Batu, Otonomi Daerah, Infrastruktur yang tersedia di Kota Batu, Budaya Lokal yang dimiliki Kota Batu, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terbentuk di dalam masyarakat untuk mencapai upaya pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata di Kota Batu sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata adalah sumber daya manusia di desa wisata yang masih rendah serta masih belum terjalin kerjasama antara daerah.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pariwisata, Budaya Lokal, Agrowisata



SUMMARY

Dayutami, Nanda. 2016. The role of Local Government on Industry Development of Tourism Based on Cultural and Agrotourism (study on Batu City Local Government). Thesis. Development Planning. The Department Of Public Administration. Brawijaya University. Head of Advisor: Dr. Choirul Saleh, M.Si, Co-Advisor: Hermawan, Dr. S.IP, M.Si. 190p. + vii.

Concomitant with the growth and change of Batu status into "City" to bring their own to face the impact of changes in Batu City. The existence of mountains, forests, and agriculture dominates the spatial expanse of Batu is suitable for the development of nature tourism related to the potential that exists in the mountains, forests and agricultural areas. As a city that is known as a commodity apple it is not uncommon landscapes, waterfalls, hot springs, ecotourism, adventure tourism, home gardens, predominantly used as plant flowers, apples, citrus fruits, medicinal plants, and so forth to make Batu as agro-tourism area. Tourism development not only concentrated on agro-based tourism industry alone, but today the development of local cultural tourism has also been developed.

This research aims to discover, describe, and analyze on the role of Local Government on Industry Development of Tourism in accordance with the policy set forth in Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu and to analyze the driving factors and inhibitor factor of Industry Development of Tourism Based on Cultural and Agrotourism.

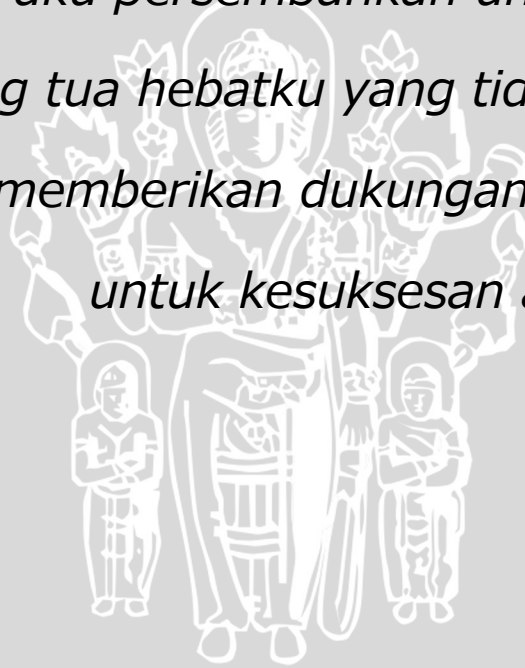
This type of research is used in the preparation of this thesis is the type of descriptive study with a qualitative approach. Data sources used are primary data and secondary data. The method of data collection with interviews, observation, documentation and library studies. Research instrument used by the researchers themselves, guidelines and other supporting interviews such as sound recording device. In the study, researchers analyzed the data refers to the method put forward by John. W. Creswell.

The results of this research, pointed out that the local government serving as a facilitator who coordinates community development activities in order to achieve the objectives that have been set by the Local Government of Batu City, cooperation between regions located around Batu like Malang, coordinate maintenance of facilities, infrastructure and public facilities are located in Batu , In the development of local culture-based tourism industry and agrotourism there are several factors that influence both factors supporting or inhibiting factor. Some supporting factors in the development of tourism industry based on local culture and tourism is the Geographical Conditions and Resources owned Batu, Regional Autonomy, Infrastructure available in Batu, Local Culture owned Batu and Awareness Group Travel (Pokdarwis) formed in in the community to achieve the government's efforts in the development of tourism industry in Batu.

Keyword: Local Government, Tourism, Local Culture, Agro-tourism

LEMBAR PERSEMBAHAN

*Karya ini aku persembahkan untuk kedua
orang tua hebatku yang tidak pernah
berhenti memberikan dukungan serta doa
untuk kesuksesan anaknya...*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata (Studi Pada Pemerintah Kota Batu)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Eko Setyo Purwanto dan Ibu Sri Utami Ekaningtyas juga saudara perempuan ku, Estetika Widhowati serta keluarga besar yang selalu mengucurkan doa serta dukungan dan semangat yang tidak ada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang sekaligus selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kesabarannya untuk terus memberikan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Hermawan, Dr. S. IP, M.Si selaku Koordinator Minat Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang sekaligus selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan saran-saran yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
7. Seluruh staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu yang telah membantu dalam memberi izin untuk melakukan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.
8. Seluruh narasumber yang telah membantu melancarkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian:

- a. Bapak Rizaldi selaku Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan BAPPEDA Kota Batu dan Bapak Sariono selaku Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata BAPPEDA Kota Batu yang memberikan penjelasan secara jelas mengenai data yang dibutuhkan oleh peneliti.
 - b. Bapak Yudho Prasetyo yang dengan sabar memberikan informasi alamat desa yang harus peneliti kunjungi untuk melakukan penelitian serta memberikan dokumen perencanaan yang dibutuhkan peneliti di BAPPEDA Kota Batu sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - c. Bapak Yoni Susetya selaku Staff Bidang Program dan Pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang menjelaskan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti serta memberikan dokumen perencanaan yang dibutuhkan oleh peneliti.
 - d. Bapak Edy Suyanto selaku Kepala Desa Bumiaji.
 - e. Bapak Surahman selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Bumiaji.
 - f. Bapak Fatur Rohman selaku staff bagian Manager dan Marketing *Kusuma Agrowisata Convention Center*.
9. Sahabat seperjuangan selama 4 tahun yang selalu menemani memberikan semangat, saran, masukan, dan tentunya dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini “Belong To Us”, Cintanya Andhita Dara Kirana, Rohma

Indriawati, Cindy Praharasti, Intan Nur Hidayati, Yolandari Gustira, Nasir Tongkonoo, Muetia Endriani, Tika Larasati, Fidan Safira, Dika Mulya Wardana, M. Jamhar Hamsa, Frisky Komaryan, dan Stanyslaus Audi.

10. Sahabat seperjuangan yang selalu menemani selama 4,5 tahun berada di Malang, memberikan hiburan, memberikan semangat, saran, dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini “Stay Young”, Fery Vidya Wichaksono, Dhimas Wishnu Kharisma Husodo, Oscar Janata Alhilal, Darma Gumelar, Sheila Lugitha, Achmad Reza Rizky, Niftyani Chilmia, Septi Amelia Nur Talitha.
11. Sahabat yang selalu menjadi tempat keluh kesah, memberikan semangat, menemani disaat sedih atau senang, yang selalu memberikan saran, serta dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Achmad Yasin Luthfi dan Eko Purboyo.
12. Keluargaku di Kampus Abu-Abu, kakak-kakak dan adik-adik Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK) atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada peneliti.
13. Sahabat semenjak SMA yang hampir 8 tahun menemani saat sedih atau senang, memberikan semangat serta dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini Niki Destyani dan Nurul Baity
14. Sahabat seperjuangan selama mengerjakan tugas akhir ini yang selalu membantu, saling memberikan semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, menemani melengkapi syarat-syarat untuk mengikuti ujian, Tri Adinda, Titi Cahya Pekerti, Melisa Sadiq Laode.

15. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik khususnya minat Perencanaan Pembangunan angkatan 2011 yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.
16. Serta semua pihak terkait yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha memberikan hasil yang terbaik, tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis menagharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati, itu semata-mata datang dari penulis dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

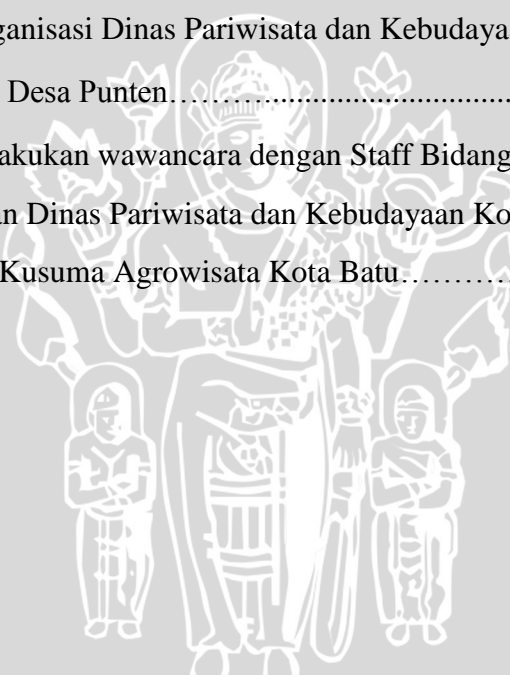
	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
TANDA PENGESAHANSKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	ivi
SUMMARY	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Administrasi Pembangunan	13
1. Definisi Administrasi Pembangunan	13
2. Ciri Adminsitrasi Pembangunan	15
B. Perencanaan Pembangunan	17
1. Pengertian Perencanaan Pembangunan	17
2. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan	19
C. Pemerintah Daerah	21
1. Pengertian Peran	21
2. Konsep <i>Stakeholder</i>	19
3. Pengertian Pemerintah Daerah	26
4. Peran Pemerintah Daerah	27
D. Pengembangan Industri Pariwisata	41
1. Pengertian Pengembangan	41
2. Pengertian Pariwisata	43
3. Pengertian Industri Pariwisata	44
E. Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata	47
1. Pengertian Budaya	47
2. Pengertian Budaya Lokal	48
3. Konsep Agrowisata	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Fokus Penelitian	51

C. Lokasi dan Situs Penelitian	52
D. Sumber dan Jenis Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Instrumen Penelitian	58
G. Metode Analisis	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum	65
1. Profil Kota Batu	65
a. Sejarah Terbentuknya Kota Batu dan Pemeintahan Kota Batu	65
b. Visi Misi Kota Batu	67
c. Bentuk dan Arti Lambang Kota Batu	69
d. Keadaan Geografis dan Wilayah Kota Batu	72
2. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu	77
a. Lokasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu	77
b. Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu	78
c. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu	79
d. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu	80
e. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu	81
f. Tujuan Badan Perencanaan Pemangunan Daerah Kota Batu	83
g. Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu	84
h. Sumber Daya Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu	86
i. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu	87
3. Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu	108
a. Lokasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu	108
b. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu	108
c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu	108
d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu	110
e. Sumber Daya Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu	111
f. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu	112
B. Penyajian Data Fokus	132
1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata	132
2. Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu	140
C. Pembahasan	154

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata.....	154
a. Macam-macam Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu.....	160
b. Rencana Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu	161
c. Implementasi Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu	162
d. Monitoring Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu	164
2. Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu	165
a. Faktor Pendukung.....	165
1) Kondisi Geografis dan Sumber Daya	165
2) Otonomi Daerah.....	166
3) Infrastruktur	167
4) Budaya Lokal	168
5) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).....	169
b. Faktor Penghambat.....	170
1) Sumber Daya Manusia	170
2) Kerjasama antar Daerah.....	172
BAB V PENUTUP.....	174
A. Kesimpulan.....	174
B. Saran.....	175
DAFTAR PUSTAKA	176
LAMPIRAN.....	180

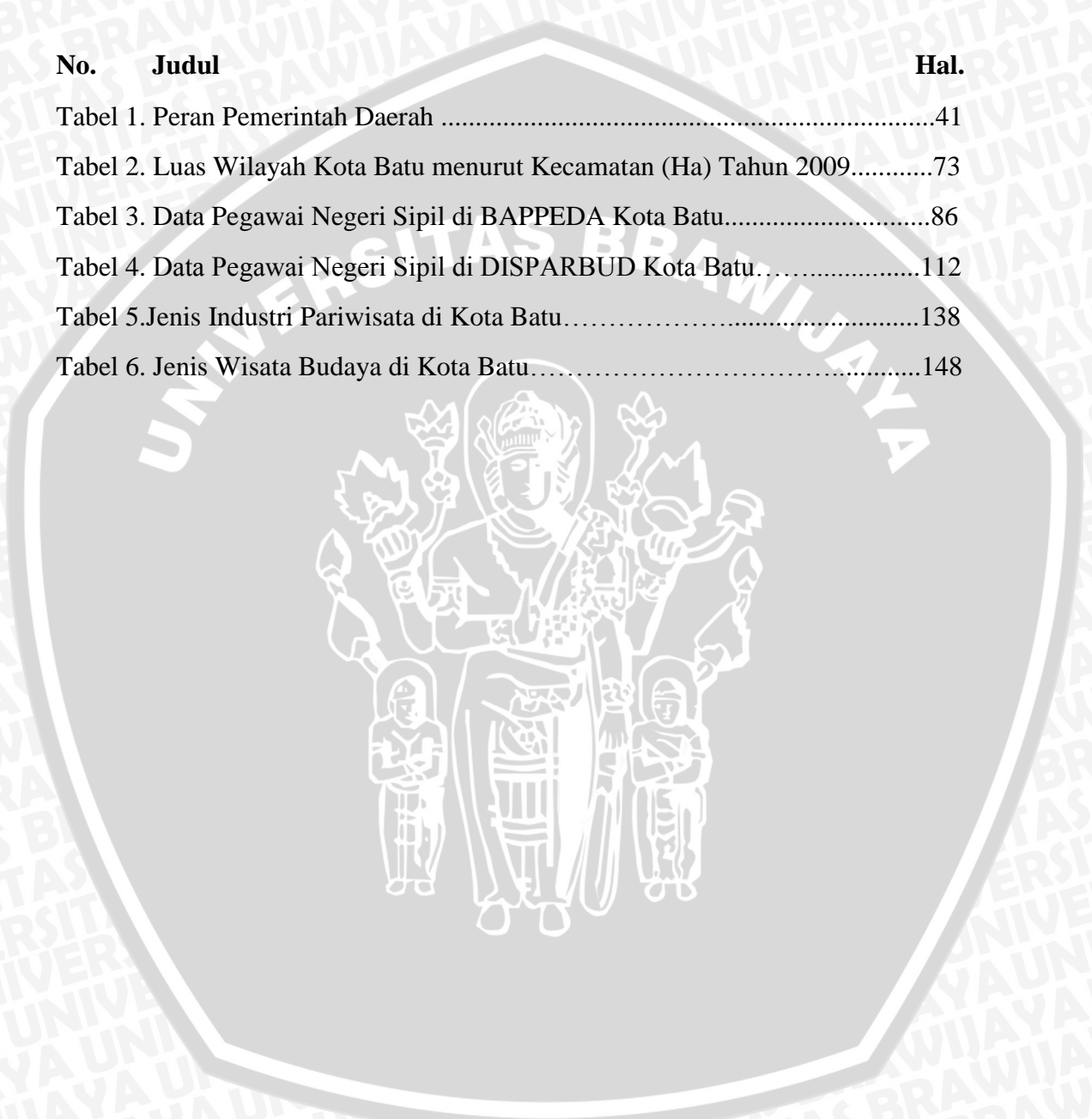
DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
Gambar 1.	Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.....	61
Gambar 2.	Peta Kota Batu.....	65
Gambar 3.	Lambang Kota Batu.....	69
Gambar 4.	Peta Lokasi BAPPEDA Kota Batu.....	78
Gambar 5.	Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Batu.....	107
Gambar 6.	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu....	131
Gambar 7.	Kebun Apel Desa Punten.....	137
Gambar 8.	Peneliti melakukan wawancara dengan Staff Bidang Program dan Pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.....	144
Gambar 9.	Kedai Apel Kusuma Agrowisata Kota Batu.....	146



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
Tabel 1.	Peran Pemerintah Daerah	41
Tabel 2.	Luas Wilayah Kota Batu menurut Kecamatan (Ha) Tahun 2009.....	73
Tabel 3.	Data Pegawai Negeri Sipil di BAPPEDA Kota Batu.....	86
Tabel 4.	Data Pegawai Negeri Sipil di DISPARBUD Kota Batu.....	112
Tabel 5.	Jenis Industri Pariwisata di Kota Batu.....	138
Tabel 6.	Jenis Wisata Budaya di Kota Batu.....	148



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan pembangunan sebagai hal wajib yang harus dilakukan. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya pembangunan berkesinambungan untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yaitu : "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Siagian (1996:2) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa (*national building*). Pembangunan Nasional dalam hal ini diartikan sebagai proses yang berkelanjutan untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan pembangunan mencakup keseluruhan aspek kehidupan bangsa, yaitu : aspek politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan agar dapat mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan negara maju yang lainnya.

Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila potensi negara serta sumber daya yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga

teknologi yang ada di suatu negara tersebut dapat dikembangkan dengan baik agar menjadi pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan tersebut dapat dicapai apabila ada dukungan dari peran serta rakyat secara menyeluruh, pembangunan dan kepemimpinan yang baik dan didukung oleh stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Agar dapat mendukung pembangunan nasional yang merata di seluruh wilayah Indonesia maka Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan di setiap daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, sesuai pada pasal 18 UUD 1945, menyatakan bahwa :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dari penjelasan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa prinsip otonomi yang dianut adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, realistis dan memiliki tanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengutamakan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat. Selain itu dengan terlaksananya otonomi daerah maka setiap daerah harus menjalin hubungan yang baik dengan daerah lain disekitarnya agar mampu meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Dalam era otonomi daerah, peran pemerintah daerah sangatlah

berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan dari suatu daerah tersebut. Potensi ekonomi unggulan daerah secara umum merupakan sektor yang menjadi komoditas utama bagi suatu daerah, memiliki pertumbuhan yang paling tinggi dan memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memiliki pengaruh yang luas terhadap penyerapan tenaga kerja. Beberapa potensi yang dapat dikembangkan yaitu dari sektor pertanian, perdagangan, industri pariwisata, dan lain-lain. Salah satu potensi ekonomi yang dikembangkan di beberapa daerah adalah pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi sumber daya daerah yang dapat diandalkan dalam menunjang otonomi daerah. Menurut Spillane (1987:20) pariwisata adalah suatu kegiatan yang melakukan perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olah raga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain. Beberapa peran penting dari kepariwisataan adalah membuka dan memperluas peluang kerja, sebagai pendorong bagi pembangunan daerah tersebut, memperbesar pendapatan daerah, memperkenalkan kebudayaan daerah, melestarikan lingkungan hidup, serta dapat menanamkan rasa cinta tanah air terhadap nilai-nilai kebudayaan. Dengan adanya wisatawan dalam negeri dan mancanegara yang datang maka pariwisata memberikan kontribusi dalam pemasukan devisa negara dan APBD di setiap daerah. Pariwisata yang menarik dan berkembang akan membuat wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung. Hal seperti ini akan menjadi dampak yang baik bagi industri-industri pariwisata lain yang ada disekitarnya seperti

perdagangan, penginapan atau perhotelan, restoran, transportasi angkutan, komunikasi, penyediaan jasa lainnya, dan pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia dan memiliki perekonomian yang cukup tinggi. Salah satu daerah yang memberikan kontribusinya tersebut adalah Kota Batu. Awalnya Kota Batu merupakan bagian dari Kabupaten Malang. Kota Batu juga merupakan pemekaran kota administratif dari Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan Kota Batu sebagai kota pariwisata yang memiliki kekayaan alam dan kebudayaan yang beragam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, ada 3 kecamatan yang terdapat di Kota Batu yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 pasal 14 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030, Kota Batu ditetapkan berdasarkan fungsi wilayahnya terbagi atas 3 Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu:

Kecamatan Batu ditetapkan sebagai BWK I yaitu untuk pengembangan pusat pemerintahan kota, pengembangan kawasan kegiatan perdagangan dan jasa modern, kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa penunjang akomodasi wisata serta kawasan pendidikan menengah dengan pusat pelayanan berada di Desa Pesanggrahan. Kecamatan Junrejo sebagai BWK II yang dimanfaatkan untuk pengembangan permukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo. Sedangkan BWK III sebagai wilayah utama pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Bumiaji dengan pusat pelayanan di Desa Punten.

Sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

(RIPPDA) Kota Batu Tahun 2014-2029 yang telah menjelaskan bahwa :

Kota Batu mendapatkan julukan “*De Klein Switzerland*” atau Swiss kecil di Pulau Jawa yang memiliki banyak obyek dan daya tarik wisata unik dan khas. Beberapa obyek wisata tersebut tersebar di 3 kecamatan di wilayah Kota Batu. Obyek wisata tersebut diantaranya adalah : obyek dan daya tarik wisata alam, obyek dan daya tarik wisata budaya dan sejarah, obyek dan daya tarik wisata buatan. Selain beberapa obyek dan daya tarik wisata tersebut terdapat juga desa-desa wisata yang mulai tumbuh dan berkembang dan memiliki suasana yang khas serta unik sehingga banyak diminati wisatawan untuk rehat.

Seiring dengan pertumbuhan dan perubahan status Batu menjadi “Kota” membawa dampak perubahan tersendiri terhadap wajah Kota Batu. Keberadaan gunung, hutan, dan hamparan pertanian yang mendominasi keruangan Kota Batu ini sesuai untuk pengembangan wisata alam terkait dengan dengan potensi yang ada di gunung, hutan dan kawasan petaniannya. Sebagai kota yang dikenal dengan komoditas apel maka tidak jarang pemandangan alam, air terjun, sumber air panas, agrowisata, wisata petualangan, pemanfaatan pekarangan rumah penduduk yang sebagian besar dijadikan sebagai tanaman bunga, apel, jeruk, tanaman obat, dan lain sebagainya menjadikan Kota Batu sebagai daerah agrowisata. Hal ini terbukti karena Kota Batu sebagai daerah pertanian dan telah menghasilkan komoditas buah dan bunga, maka yang mengunjungi Batu adalah mereka yang ingin menikmati indahnya kebun-kebun dan mereka sangat berharap ada jaminan mutu hasil pertanian tersebut sebagai cinderamata. Dengan kondisi cuaca yang mendukung untuk ditanami berbagai macam tumbuhan maka akan menjadi daya tarik tersendiri dari segi wisata dan lingkungan hidup di samping nilai ekonomi. Pengembangan wisata tidak hanya terkonsentrasi pada industri pariwisata yang berbasis agrowisata saja tetapi saat ini pengembangan wisata budaya lokal

juga sudah mulai dikembangkan.

Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Batu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013. Didalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Kota Batu memiliki tujuan kepariwisataan yang meliputi :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antardaerah dan antarbangsa.

Dari beberapa tujuan kepariwisataan yang telah disebutkan diatas, salah satunya adalah memajukan kebudayaan. Dalam pelaksanaan pengembangan wisata tentunya tidak boleh terlepas dari kearifan budaya lokal karena apabila wisatawan berkunjung maka wisatawan tersebut akan memandang bahwa hanya Kota Batu saja yang memiliki kebudayaan seperti itu dan tidak ada kota lain yang memiliki budaya tersebut. Menurut Maryaeni (2005:91) dalam pengembangan kebudayaan bangsa perlu ditumbuhkan kemampuan untuk mengembangkan nilai budaya daerah yang luhur dan beradab serta menyerap nilai budaya asing yang positif untuk memperkaya budaya nasional. Kebudayaan di suatu daerah merupakan suatu hal yang kompleks dan dengan cara mempelajarinya merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan tersebut. Salah satu unsur kebudayaan nasional adalah kesenian, hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Liliwari (2011:117) unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut :

Identitas sosial, sejarah kebudayaan, bahasa dan interaksi, kesenian, stabilitas kebudayaan, budaya material, peranan relasi, kepercayaan atas

kebudayaan dan nilai, etnosentrisme, perilaku non verbal, hubungan antar ruang, konsep tentang waktu, pengakuan dan ganjaran, pola pikir, dan aturan-aturan budaya.

Dari beberapa unsur kebudayaan yang sudah disebutkan diatas, kesenian merupakan salah satu unsur yang menjadi identitas dari setiap daerah. Kesenian disetiap daerah tersebut dapat juga dikatakan sebagai budaya lokal yang dimiliki setiap daerah. Budaya lokal yang dimiliki Kota Batu dapat mencerminkan nilai luhur terhadap masyarakatnya. Peninggalan kebudayaan tersebut juga harus tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan. Beberapa contoh budaya lokal yang dimiliki Kota Batu yaitu Tari Sanduk, Tari Sapu, Sembrama, serta Budaya Tumpengan. Harapannya budaya lokal tersebut tidak sampai hilang dan generasi muda di Kota Batu dapat melestarikannya dan mengenalkan kepada wisatawan yang berkunjung. Tetapi pada kenyataannya, seiring perkembangan zaman yang semakin mengenal berbagai macam teknologi ini berdampak buruk bagi pembangunan. Salah satu dampak buruk yang terjadi adalah globalisasi yang dialami bangsa Indonesia dan berdampak pula terhadap daerah-daerah yang ada di Indonesia salah satunya Kota Batu khususnya pada industri pariwisata yang berbasis budaya lokal dan agrowisata.

Globalisasi adalah permasalahan yang paling strategis dan membawa pengaruh dalam tata nilai. Dalam kehidupan masyarakat, globalisasi juga memiliki pengaruh yang positif dan juga negatif salah satu contohnya yaitu adanya kesenjangan sosial antara masyarakat tingkat bawah dengan masyarakat tingkat atas dalam suatu daerah tersebut. Tidak hanya kesenjangan sosial yang akan timbul tetapi adanya kesenjangan nilai, norma, budaya dan etika bermasyarakat

juga akan timbul. Gintoro (2009:1) menjelaskan bahwa globalisasi merupakan proses yang menggejala sebagai peristiwa yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia secara lintas budaya.

Dalam gerak-gerik lintas budaya ini terjadi berbagai pertemuan antar budaya (*Culture Encounters*) yang membentuk proses saling pengaruh antar budaya, dengan kemungkinan satu pihak lebih besar pengaruhnya dari pada pihak lainnya. Dalam hal ini pihak yang lebih besar akan dominan terhadap pihak yang lebih kecil. Dengan kata lain Kota Batu merupakan kota yang memiliki kunjungan wisata cukup tinggi sehingga banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang untuk menikmati wisata-wisata yang ada di Kota Batu. Adanya kunjungan dari wisatawan tersebut terkadang berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Banyak budaya lokal yang sudah luntur dan jarang sekali generasi muda melestarikan budaya lokal yang ada di Kota Batu tersebut. Lunturnya budaya lokal, menurunkan rasa kebanggaan yang dimiliki masyarakat terhadap daerah nya tersebut. Saat ini di Kota Batu banyak sekali mendirikan tempat-tempat wisata buatan, contohnya Jatim Park1, Jatim Park 2, Eco Green, Batu Night Spectacular (BNS), Museum Angkut, Sengkaling, dan lain sebagainya. Berbagai tempat wisata buatan didirikan dan wisata tersebut kurang mengembangkan industri pariwisata yang berbasis budaya lokal dan agrowisata. Sedangkan masih banyak sekali industri pariwisata alami yang masih belum terangkat namanya di Kota Batu karena tertutup namanya dengan wisata buatan.

Melihat berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam memberikan arahan, bimbingan,

pengawasan bagi pengembangan industri pariwisata di Kota Batu. Maka peneliti tertarik untuk mengambil secara lebih mendalam mengenai **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata (Studi pada Pemerintah Kota Batu)”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pokok-pokok pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata Kota Batu.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis terhadap pihak-pihak yang terkait dalam hal pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata. Adapun kontribusi yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak lain khususnya pihak akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan pemerintah dan pelaku (*stakeholder*) yang terlibat pada pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.
- b. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Batu yang dapat dipergunakan untuk pedoman dalam memberikan peran dalam pengembangan industri pariwisata Kota Batu.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang uraian latar belakang dilakukannya penelitian tentang peran pemerintah dalam pengembangan industri

pariwisata yang berbasis budaya lokal dan agrowisata; rumusan masalah yaitu bagaimanakah peran pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata serta faktor pendukung dan penghambat pengembangan industri pariwisata; tujuan penelitian ini agar peneliti dapat mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata serta dapat mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata; kontribusi penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis; dan sistematika pembahasan yang berisi tentang uraian singkat penulisan dalam penelitian ini.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang kajian teori sesuai dengan tema yang akan diangkat peneliti yaitu Administrasi Pembangunan, Pemerintah Daerah, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pariwisata berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata. Peneliti berharap bahwa uraian tentang kajian teori yang sudah disebutkan tersebut dapat dijadikan landasan serta pedoman dalam penelitian dan penganalisisan data yang diperoleh peneliti dalam penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan oleh

peneliti yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif; fokus penelitian yaitu kondisi potensi industri pariwisata yang berbasis budaya lokal dan agrowisata kemudian bentuk pengembangan industri pariwisata serta faktor yang mempengaruhi penembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu; lokasi dalam penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batu sedangkan situs penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu; sumber data dalam penelitian ini adalah informan, dokumen serta tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan melalui observasi sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder; teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi; instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan (*field note*), serta alat penunjang lainnya seperti alat tulis-menulis, alat rekaman serta dokumentasi melalui HP peneliti; metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini mengacu pada metode yang dijelaskan oleh John W. Creswell; dan keabsahan data yang digunakan agar penelitian data dipertanggungjawabkan.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan bab ini memberikan sajian terkait hasil

penelitian dan temuan peneliti selama dilapangan setelah diolah dan dibandingkan dengan teori-teori yang digunakan oleh peneliti. Data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab fokus penelitian sesuai dengan judul penelitian yaitu Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata (Studi Pada Pemerintah Kota Batu).

Bab V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan garis besar yang disajikan secara ringkas dari pembahasan, yang diturunkan dari permasalahan dan teori yang telah diolah dengan metode penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis yang didasarkan fenomena yang ditemukan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Definisi Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dari administrasi negara. Ide dan usaha dalam mengembangkan prinsip-prinsip Administrasi Pembangunan mulai berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II tetapi usaha yang lebih serius dilaksanakan oleh para ahli baru setelah permulaan dasa warsa enampuluhan. Perubahan tersebut terlihat pada banyaknya bangsa-bangsa jajahan yang memperoleh kemerdekaannya, baik melalui revolusi, perang kemerdekaan ataupun dengan cara lainnya. Hal ini berarti bahwa setelah Perang Dunia II usai banyak negara-negara baru yang lahir, terutama di Benua Asia dan Afrika. Dalam rangka pencapaian tujuan setiap negara, negara yang bersangkutan harus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembangunan. Administrasi pembangunan memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi negara-negara yang baru berkembang. Selanjutnya Tjokroamidjojo menyebutkan definisi administrasi pembangunan yaitu proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasi pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam segala aspek kehidupan bangsa.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diketahui ada beberapa ide pokok administrasi pembangunan, yaitu : (1) pembangunan merupakan

suatu proses; (2) usaha yang secara sadar dilaksanakan; (3) dilakukan secara berencana dan perencanaan berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (4) mengarah kepada modernitas yang berarti multi-dimensional atau mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; (5) tujuan utamanya adalah membina bangsa.

Administrasi pembangunan memiliki peran aktif dan berkepentingan untuk tujuan pembangunan mulai dari perumusan kebijakan maupun pelaksanaannya agar efektif. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa menjadi penggerak perubahan (*change agents*). Dalam tulisan lainnya, Kristiada (2008) menjelaskan bahwa administrasi pembangunan yang melihat dari sisi tujuan administrasi pembangunan adalah untuk mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan melakukan kegiatan investasi (mengganti atau menambah aktiva tetap), dari sini administrasi tersebut akhirnya akan dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan peningkatan administrasi pemerintahan. Seluruh konsep, teori dan prinsip-prinsip Administrasi Pembangunan berangkat dari hakikat pembangunan dan diarahkan kepada penyelenggaraan seluruh kegiatan pembangunan agar berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna dalam rangka pencapaian tujuan negara yang bersangkutan. Pembangunan dapat dimaksudkan sebagai upaya yang disadari oleh satu negara bangsa dalam mewujudkan perubahan dan pertumbuhan menuju masyarakat modern dalam rangka pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju dan

sejahtera.

2. Ciri Administrasi Pembangunan

Seperti yang sudah diketahui bahwa analisis Administrasi Pembangunan memiliki fokus yaitu proses pembangunan yang diselenggarakan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita suatu bangsa, termasuk cara-cara yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, menghadapi berbagai rintangan yang dialami suatu bangsa, memanfaatkan peluang yang ada serta menghindari ancaman. Perkembangan administrasi pembangunan merupakan akibat dari berbagai faktor yang seluruhnya berkisaran kepada dinamika umat manusia. Dinamika tersebut pada saatnya menimbulkan harapan baru, tantangan baru, permasalahan baru yang bentuk, jenis, dan intensitasnya mungkin belum pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Dengan munculnya perkembangan ilmu pengetahuan, kadang kala semakin menghilangkan jati diri dari semua disiplin keilmuan apabila tidak diimbangi dengan penguasaan ciri-ciri dari beberapa disiplin ilmu yang berbeda-beda. Seluruh ilmu pengetahuan merupakan sebuah lingkaran setan yang saling berhubungan antara ilmu yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan disiplin ilmu pengetahuan dalam administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain.

Ciri-ciri dari administrasi pembangunan yang pertama adalah memiliki tujuan dalam administrasi pembangunan yang mengarah kepada upaya perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Administrasi pembangunan yang dimaksudkan agar membantu dan mendorong ke arah

perubahan besar dalam setiap kegiatan atau di bidang kehidupan yang saling terkait dan akan memberikan hasil akhir adanya proses pembangunan. Apabila ingin melakukan perubahan dan pembaharuan dimasa yang akan datang maka harus ada kegiatan-kegiatan nyata di masa sekarang yang seimbang sebagai proses dalam pencapaian keberhasilan yang lebih baik dimasa depan. Dapat diberikan contoh, misalnya administrasi pembangunan tidak saja menghendaki suatu administrasi kepegawaian yang tertata tetapi mungkin menuntut suatu perubahan sistem administrasi kepegawaian yang lebih memungkinkan diperolehnya pegawai-pegawai yang diperlukan pada sektor-sektor prioritas serta yang lebih berorientasikan kepada prestasi. Perubahan-perubahan dalam rangka perbaikan memang sering sekali memiliki risiko yang kurang lancar untuk sementara waktu. Namun dalam administrasi pembangunan, kejadian yang seperti ini harus diperhitungkan.

Sedangkan ciri administrasi pembangunan yang kedua adalah administrasi pembangunan melakukan perbaikan serta penyempurnaan administrasi yang terkait dengan aspek perkembangan dibidang-bidang lain seperti aspek sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Perbaikan administrasi dapat memiliki efek manipulatif terhadap perubahan-perubahan di bidang-bidang lain serta pembangunan-pembangunan di bidang lain juga akan memberikan dampak perubahan bagi bidang administrasi. Perbaikan administrasi tidak hanya memberikan perubahan dibidang administrasi saja melainkan memberikan pelayanan administratif dalam upaya perbaikan dan perubahan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain agar dapat

dilaksanakan dengan baik. Pendekatan administrasi pembangunan merupakan suatu proses pendekatan yang menjadi bagian dari keseluruhan proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial secara menyeluruh. Administrasi memberikan pelayanan untuk suatu pembangunan dan juga menjadi hasil dari pembangunan itu sendiri.

B. Perencanaan Pembangunan

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (1989: 12) menyatakan bahwa definisi dasar dari suatu perencanaan yang mana diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, demikian halnya dengan definisi dari perencanaan pembangunan. Selanjutnya, Tjokroamidjojo juga mengartikan perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan efektif.

Albert Waterson dalam Tjokroamidjojo (1989: 12), juga menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah “melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dan kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan”. Dengan adanya beberapa alternatif yang dianggap sebagai alternatif terbaik tersebut maka dalam hal ini

menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan memiliki kaitan yang sangat erat dengan perumusan kebijakan (*policy formulation*) pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dari suatu proses pembangunan. Sebagai tahap awal, maka perencanaan pembangunan dijadikan sebagai acuan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan perencanaan (*action plan*). Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan perencanaan pembangunan akan banyak menggunakan metode-metode riset seperti teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan agar data-data yang didapatkan merupakan data akurat yang terjadi dilapangan baik data-data yang bersifat konseptual atau dokumentasi maupun data-data eksperimental. Data-data riil yang didapat di lapangan sebagai data primer merupakan ornament-ornamen penting yang ada dan digunakan menjadi bahan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan yang sifatnya komprehensif atau menyeluruh membutuhkan kemampuan yang baik agar tercapai tujuan yang diinginkan, atau paling tidak menyentuh daripada kebutuhan masyarakat. Menurut Poppe dalam Riyadi dan Bratahkusumah (2002: 26), perencanaan pembangunan mencakup tiga bidang utama, yaitu:

- a. Perencanaan sumber daya alam
- b. Perencanaan sosial ekonomi
- c. Perencanaan fisik dan infrastruktur

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pengertian dari perencanaan pembangunan, maka dapat disimpulkan bahwa definisi perencanaan

pembangunan adalah beberapa hal yang menyangkut dengan usaha-usaha untuk menggunakan sumber-sumber pembangunan yang tersedia dengan mengupayakan berbagai alternatif untuk menjadi pilihan yang terbaik dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang lebih baik pada waktu yang akan datang atau dapat dikatakan sebagai keberlanjutan pembangunan.

2. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan

Mengingat akan begitu luasnya mengenai definisi dari suatu perencanaan, yang mana seringkali terjadi perbedaan di dalam mendefinisikannya, karena perbedaan perspektif (cara pandang), kajian ilmu, dan juga beberapa faktor lainnya. Maka dengan ini dapat ditegaskan bahwa setiap kegiatan perencanaan belum tentu merupakan perencanaan pembangunan, karena ruang lingkup dari perencanaan yang sangat luas tersebut. Untuk memudahkan dalam memahami mengenai apakah suatu perencanaan termasuk dalam lingkup perencanaan pembangunan, maka perlu diperhatikan karakteristik berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan, yaitu:

- a. Suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*Steady Economic Growth*);
- b. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita;
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi;
- d. Perluasan kesempatan kerja;
- e. Usaha pemerataan pembangunan;
- f. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan;
- g. Kemampuan membangun lebih didasarkan pada kemampuan sosial;
- h. Terdapatnya usaha secara terus menerus dalam menjaga stabilitas ekonomi;

- i. Ada pula negara-negara yang mencatumkan sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang fundamental atau ideal atau yang bersifat jangka panjang. (Tjokroamidjojo, 1989: 49-52)

Pertama, suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady economic growth*). Ini dicerminkan dari usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif. *Kedua*, adalah usaha yang dicerminkan dalam suatu perencanaan pembangunan yaitu untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ini adalah kelanjutan dari ciri yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif, setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk maka akan meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita, kesejahteraan masyarakat akan semakin membaik. *Ketiga*, adalah bahwa perencanaan pembangunan menyangkut usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Ini disebabkan karena pada umumnya di negara-negara dunia ketiga (*under developing country*) struktur ekonominya cenderung ke arah sektor agraris. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan ketimpangan yang cukup besar antar sektor. Oleh karena itu, lebih diusahakan agar lebih seimbang antara perkembangan sektor agraris dengan sektor lainnya, sehingga akan membawa implikasi terhadap keseimbangan struktur ekonomi. *Keempat*, ciri dari perencanaan pembangunan adalah adanya perluasan kesempatan kerja. Hal ini sering menjadi tantangan yang sangat berat yang dialami oleh negara-negara berkembang. Karena perluasan kesempatan kerja bukan berarti hanya usaha untuk menanggulangi pengangguran dan pengangguran

tak kentara, tetapi juga menampung masuknya golongan usia kerja baru dalam dunia kerja dan kehidupan ekonomi. Kelima, usaha pemerataan pembangunan (sering disebut dengan *distributive justice*), adalah pemerataan yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan antar golongan-golongan dalam masyarakat dan juga pemerataan pendapatan antar daerah.

Selanjutnya Riyadi dan Bratukusumah menyebutkan ciri-ciri dari perencanaan pembangunan daerah yang membedakannya dengan jenis perencanaan lainnya adalah:

- a. Menghasilkan program-program yang bersifat umum
- b. Analisis perencanaan bersifat makro/luas
- c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang
- d. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas
- e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan) (2003: 9).

C. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Peran

Peran atau yang biasa disebut “peranan” merupakan serangkaian perilaku yang biasa dilakukan atau diharapkan untuk dilakukan oleh seseorang, biasanya peran selalu berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab. Istilah peranan bukan lagi merupakan kata yang terlalu asing di masyarakat, karena istilah ini sering dikaitkan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2005), peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Sementara peranan

diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Dalam pengertian sosiologi, kata peran dan peranan sering dianggap sama karena tidak ada pembatasan secara jelas antara peran dan peranan hanya pada sudah atau tidaknya sebuah peran itu dijalankan. Menurut Wojowasito (1976, 67), peranan adalah dua orang atau lebih yang menjadi atau melaksanakan sesuatu yang khas. Sedangkan menurut Soekanto (1990,67), pengertian peranan adalah :

“Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang. Karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, yang mana dari usahanya itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”.

Hal itu berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Soekanto (1990, 269) berpendapat bahwa :

“Pentingnya peranan karena peranan mengatur perilaku seseorang dan peranan juga menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat diramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Dengan demikian orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan orang sekelompoknya.”

Levinson dalam Soekanto (1990, 213) menyatakan bahwa peranan mencakup tiga hal, antara lain :

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting

bagi struktur sosial masyarakat.

Dari beberapa pengertian tentang peranan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek-aspek dinamis dari seseorang dalam organisasi maupun dalam kehidupannya. Peranan adalah serangkaian kegiatan atau aktifitas yang dilakukan seseorang atau kelompok berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Peranan dapat pula diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh seseorang pada saat menjalankan tugasnya, baik dalam menjalin hubungan dengan pejabat, pimpinan bagian atau seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan juga adanya suatu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan status kedudukannya. Peranan ini lebih bersifat dinamis dan aktif.

2. Konsep Stakeholders

Merujuk pada pilar dari *Good Governance* disebutkan setidaknya ada tiga pilar yang terlibat yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada penelitian ini tiga pilar tersebut disebut dengan *stakeholders*. Dewasa ini sering kali kita dengar *stakeholders* digunakan di berbagai konteks keilmuan. Misalnya administrasi, manajemen, ekonomi, sosiologi, dan lain sebagainya. Freeman (1984) menyebutkan *stakeholders* dengan definisi sebagai berikut “*any group or individual who is affected by or can affect the achievement of an organization's objectives*”. Bila terjemahkan dalam Bahasa Indonesia pernyataan diatas berarti sebuah kelompok atau individu yang dipengaruhi oleh atau dapat memengaruhi pencapaian tujuan sebuah organisasi.

Redelfs dan Stance mengatakan bahwa *stakeholders* adalah masyarakat yang terorganisir dengan baik atau buruk dan terpengaruh oleh kebijakan publik.

Dalam sumber yang berbeda Islamy (2009) menyimpulkan dari beberapa pendapat para ahli mengenai *stakeholders* sebagai berikut:

1. *Public, well or poorly organized, who are affected by public policy. These publics are considered stakeholder even when they are not aware of their status as such (Redelfs and Stance)*
2. *Population that would likely exert an influence on the proposed action or to be affected by it (Interorganizational Committee on Guidelines and principles for SIA)*
3. *Stakeholder are groups-at-interest that perceive themselves to be affected, either positively or negatively, by energy policies, programme or technologies (Farhar)*
4. *People who might be directly and adversely affected by proposed projects (Millard)*
5. *Groups who are currently subject or will be subject in the future to impact from a project or policy (Little and Krannich)*
6. *Organizational units in society, such as education, religious, labor, cultural, and political, that may be directly or indirectly affected by a technology (Crane and Friedman)*

Redelfs dan Stance mengatakan bahwa *stakeholders* adalah masyarakat yang terorganisir dengan baik atau buruk dan terpengaruh oleh kebijakan publik. Masyarakat tersebut dianggap *stakeholders* bahkan ketika mereka tidak menyadari status mereka sebagai *stakeholders* kebijakan publik tersebut. Komite Organisasi tentang prinsip dan pedoman untuk SIA mengatakan bahwa *stakeholders* adalah penduduk yang mungkin akan memberikan pengaruh terhadap tindakan yang diusulkan atau yang akan terpengaruh olehnya. Farhar mengatakan bahwa *stakeholders* adalah

kelompok kepentingan yang merasa diri mereka akan terpengaruh, baik positif maupun negatif, oleh kebijakan energi, program, atau teknologi. Millard mengatakan bahwa *stakeholders* adalah orang-orang yang mungkin secara langsung dan dipengaruhi oleh alternatif kebijakan publik yang diusulkan. Little dan Krannich mengatakan bahwa *stakeholders* adalah kelompok yang saat ini menjadi subjek atau akan terkena dampak oleh alternatif kebijakan publik pada masa depan. Crane dan Friedman mengatakan bahwa *stakeholders* adalah unit organisasi dalam masyarakat, seperti pendidikan, agama, tenaga kerja, budaya, dan politik, yang mungkin secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh teknologi atau kebijakan publik.

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh *stakeholders* terhadap suatu isu, maka *stakeholders* dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, antara lain:

1. *Stakeholders* Utama (Primer). *Stakeholders* utama merupakan *stakeholders* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dalam suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, seperti tokoh masyarakat yang akan menjadi obyek kebijakan atau program, pimpinan instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung dalam pengambilan dan implementasi program, ataupun perusahaan yang menjadi mitra pemerintah dalam mendanai implementasi program.
2. *Stakeholders* Pendukung (Sekunder). *Stakeholders* pendukung adalah *Stakeholders* yang tidak memiliki kaitan penting secara langsung terhadap suatu kebijakan ataupun program, namun memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap suatu masalah tertentu sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Contoh dari *Stakeholders* pendukung antara lain: lembaga pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab secara langsung; Lembaga

Swadaya Masyarakat; dan Perguruan Tinggi

3. *Stakeholders* Kunci. *Stakeholders* kunci adalah *stakeholders* yang memiliki kewenangan seara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholders* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai tingkatannya, legislatif, dan instansi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan program. Misalnya saja *stakeholders* kunci untuk suatu keputusan program dalam *level* kabupaten yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, DPRD Kabupaten, dan Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan (hmp_humas_USAHID, 2008).

Uraian diatas menunjukkan ada tiga kategori *stakeholders* yang dijelaskan dengan peran yang berbeda-beda. Secara tidak langsung kategori tersebut dapat memberi tahu bahwa masing-masing *stakeholders* pasti memiliki peran sesuai porsinya masing-masing yang didasari dengan kepentingannya. Artinya didalam hubungan antara *stakeholders* dapat terjalin dengan masing-masing *stakeholders* menyatukan kepentingannya tanpa adanya tekanan atau keterpaksaan dikarenakan satu dengan yang lainnya saling menguntungkan. Sehingga antara *stakeholders* dapat terjalinnya sinergi yang bertujuan untuk tujuan mencapai kepentingan bersama.

3. Pengertian Pemerintah Daerah

Pada awal tahun 2000 merupakan awal perubahan dari suatu sistem pemerintahan yang berawal dari sentralisasi (terpusat) menjadi desentralisasi. Sistem desentralisasi adalah suatu sistem dimana pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan cara mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya sendiri dan tidak menunggu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru semakin marak sejak disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kemudian daerah-daerah provinsi tersebut dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota.”

Sesuai dengan pernyataan diatas maka pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat baik dalam sektor ekonomi, industri, pariwisata, dan budaya. Pemerintah daerah mengatur sendiri urusannya berdasarkan asas otonomi. Dengan berlandaskan asas otonomi ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki landasan dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tertera pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya

ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dalam mengatur suatu daerah maka peran pemerintah sangat diperlukan guna menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Peran pemerintah memiliki dimensi yang luas, peran pemerintah yang diungkapkan oleh Adam Smith adalah peran pemerintah klasik dan banyak digunakan sebagai literatur. Menurut Adam Smith, pemerintah memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invansi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti (Smith dalam Muluk, 2009:111).

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas mengenai peran pemerintah, maka peran pemerintah tidak hanya merealisasikan hak-hak dan aspirasi masyarakat saja tetapi peran pemerintah juga menyangkut pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tugas bersama DPRD untuk mengatur urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya salah satunya adalah membuat Peraturan Daerah. Setelah Peraturan Daerah disahkan maka pemerintah daerah wajib menyebarluaskan. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ada beberapa tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah, yaitu :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Membina penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan dibawahnya, dan
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, peran pemerintah Kota Batu merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu. Berbagai sektor yang menjadi tanggungjawab pemerintah seperti, sektor ekonomi, sektor pariwisata, sektor sosial-budaya, dan beberapa sektor lainnya.

a) Koordinasi (Coordination)

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa :“Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Menurut G. R Terry dalam Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut E.F.L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* yang dikutip Handayani (2002:54) Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggotaitu sendiri.

Sedangkan menurut G.R.Terry dalam bukunya, *Principle of Management* yang dikutip Handayani (2002:55) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi:

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif

2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
3. *Directing* atau penentuan arah usaha-usaha tersebut
4. Rivalry, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba
5. Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
6. Espritde Corps, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerja akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan

yang ditetapkan.

b) Integrasi

Yaitu suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Sugandha, 1991). Adanya Standar Operating Procedure (SOP, atau Protap) adalah salah satu contoh indikator kegiatan integrasi. Aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan dapat tercermin dari protapnya (Sulistiyawati, dkk. 1999).

Integrasi berasal dari bahasa inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.

Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan dimana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap komformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. **Integrasi** memiliki 2 pengertian, yaitu:

1. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu
2. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur

tertentu.

Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Suatu integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Menurut pandangan para penganut fungsionalisme struktur sistem sosial senantiasa terintegrasi diatas dua landasan berikut:

1. Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi diatas tumbuhnya konsensus (keepakatan) diantara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental (mendasar)
2. Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (*cross-cuttingaffiliation*). Setiap konflik yang terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan sosial lainnya akan segera dinetralkan oleh adanya loyalitas ganda (*cross-cuttingloyalties*) dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial.

Penganut konflik berpendapat bahwa masyarakat terintegrasi atas paksaan dan karena adanya saling ketergantungan diantara berbagai kelompok. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-

batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial:

1. Asimilasi, yaitu pembauran kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli.
2. Akulturasi, yaitu penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli.

Faktor-Faktor Pendorong dari integrasi antara lain, yaitu:

A. Faktor Internal:

1. kesadaran diri sebagai makhluk social
2. tuntutan Kebutuhan

B. Faktor Eksternal:

1. tuntutan perkembangan zaman
2. persamaan kebudayaan
3. terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama
4. persamaan visi, misi, dan tujuan
5. sikap toleransi
6. adanya kosensus nilai
7. adanya tantangan dari luar

Syarat Berhasilnya Integrasi Sosial

1. Untuk meningkatkan Integrasi Sosial, Maka pada diri masing-masing harus mengendalikan perbedaan/konflik yang ada pada suatu kekuatan bangsa dan bukan sebaliknya.

2. Tiap warga masyarakat merasa saling dapat mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya.

Contoh Integrasi:

Distribution Agreement, dimananank mendistribusikan produk asuransi jiwa baik secara standalone maupun di bundling dengan produk bank seperti tabungan. Strategi ini masih memanfaatkan secara minimal *customer base* dari bank. Kelemahan dari model kerja sama ini adalah sulitnya mengukur besarnya investasi yang diperlukan mengingat jangka waktu hubungan kerja bank dan asuransi bisa tak terbatas. Bagi kedua belah pihak, kerja sama ini saling menguntungkan dan memerlukan inverstasi paling minimal

c) Simplikasi

Pengertian Simplikasi adalah penerapan yang terorganisir dari pada akal sehat untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dan lebih mudah dalam menjalankan suatu tugas. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan membuat program-program yang dibuat realistik, sederhana dan dapat dikerjakan. Misalnya tujuan umum dibuat disederhanakan menjadi tujuan khusus dengan sasaran lebih jelas atau tujuan dibuat lebih rasional (Sulistyawati, dkk.1999).

d) Sinkronisasi

Adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga diperoleh

keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Adanya kejelasan pembagian tugas merupakan petunjuk pelaksanaan sinkronisasi. Sinkronisasi akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih sehingga menurunkan duplikasi kegiatan, bahkan meniadakan kegiatan yang tidak perlu (Sulistyowati, dkk. 1999).

Sinkronisasi menjadi penting dalam koordinasi karena terbukti dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya koordinasi kendati keseluruhannya itu dapat disinkronisasikan, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama (Syafiie, 1998).

Sinkronisasi adalah proses menyamakan data antar perangkat. Sering dilakukan proses sinkronisasi untuk menyamakan waktu dan data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidak-konsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses- proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama, proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Proses-proses konkuren yang saling berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dan juga menghasilkan output yang benar.

Deadlock atau pada beberapa buku disebut *Deadly Embrace* adalah keadaan dimana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing- masing sampai program yang

lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah.

Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi *deadlock*, bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat di lakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Contoh sinkronisasi yaitu suatu perusahaan mempunyai sinkronisasi antara komputer-komputer yang terdapat dalam perusahaan tersebut agar mempermudah kinerja kerja karyawan perusahaan tersebut.

e) Mekanisasi

Menurut Henry F. Fayol prinsip organisasi yang diikuti secara luas oleh para manajer dewasa ini :

1. Pembagian kerja, Prinsip ini sama dengan “pembagian kerja” Adam Smith. Spesialisasi menambah hasil kerja dengan cara membuat para pekerja lebih efisien.
2. Wewenang, Manajer harus dapat memberi perintah. Wewenang memberikan hak ini kepadanya, tetapi wewenang berjalan seiring dengan tanggung jawab. Jika wewenang digunakan, timbullah tanggung jawab. Agar efektif, wewenang seorang manajer harus sama dengan tanggung jawabnya.
3. Disiplin, Para pegawai harus mentaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik

merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, suatu saling pengertian yang jelas antara manajemen dan para pekerja tentang peraturan organisasi serta penerapan hukuman yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut.

4. Kesatuan komando, Setiap pegawai seharusnya menerima perintah hanya dari seorang atasan.
5. Kesatuan arah, Setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan sama harus dipimpin oleh seorang manajer dengan menggunakan sebuah rencana.
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Kepentingan seorang pegawai atau kelompok pegawai tidak boleh mendahulukan kepentingan organisasi secara keseluruhan.
7. Remunerasi, Para pekerja harus digaji sesuai dengan jasa yang mereka berikan.
8. Sentralisasi, ini merujuk kepada sejauh mana para bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan itu disentralisasi (pada manajemen) atau desentralisasi (pada para bawahan) adalah proporsi yang tepat. Kuncinya terletak pada bagaimana menemukan tingkat sentralisasi yang optimal untuk setiap situasi.
9. Rantai scalar, Garis wewenang dari manajemen puncak sampai ketingkat yang paling rendah merupakan rantai scalar.

Komunikasi harus mengikuti rantai ini. Tetapi, jika dengan mengikuti rantai tersebut malah tercipta kelambatan, komunikasi silang dapat diizinkan jika disetujui oleh semua pihak, sedangkan atasan harus diberitahu.

10. Tata tertib, Orang dan bahan harus ditempatkan pada tempat dari waktu yang tepat.
11. Keadilan, Para manajer harus selalu baik dan jujur terhadap para bawahan
12. Stabilitas masa kerja para pegawai, Perputaran (*turnover*) pegawai yang tinggi adalah tidak efisien. Manajemen harus menyediakan perencanaan personalia yang teratur dan memastikan bahwa untuk mengisi kekosongan harus selalu ada pengganti
13. Inisiatif, Para pegawai yang diizinkan menciptakan dan melaksanakan rencana-rencana akan berusaha keras
14. *Espritdecorps*, Mendorong team spirit akan membangun keselarasan dan persatuan di dalam organisasi.

Contoh Mekanisasi yaitu rendahnya produktivitas tenaga kerja karena rendahnya mutu sumber daya manusia, menghalangi negara-negara berkembang mengambil keuntungan melimpahnya tenaga kerja dan rendahnya biaya tenaga kerja. Demikian pula, kondisi tersebut akan menghambat laju inovasi teknologi. Di sektor pertanian, penggunaan teknologi tradisonal, varietas tradisional

dan cara-cara manajemen usaha tani yang berproduksi rendah menyebabkan petani hanya mampu memberikan penghasilan rendah atau sulit memasarkan dipasar lokal dan tidak akan mampu melakukan ekspor. Transfer teknologi berproduksi tinggi kepada mereka akan mampu mempercepat dan meningkatkan produktivitas usaha tani dari subsisten menjadi surplus dan bahkan menuju kepada ekspor jika ditunjang dengan manajemen sistem dan usaha tani yang tepat.

Dengan peran pemerintah daerah didalam pembangunan, maka sebuah koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi untuk semua SKPD sangat diperlukan. Sesuai dengan kemampuan dan profesional. Hal ini di karenakan progress didalam pengembangan pembangunan harus dilalukan dengan tepat dan sesuai dengan yang di rencanakan agar menjadi sebuah capaian yang maksimal. Dengan adanya koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi menjadi saling terhubung satu sama lain antar skateholder atau perangkat pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan, rencana, dan program.

Kota Batu merupakan salah satu Kota yang memiliki banyak sekali potensi alam dan budaya yang dapat dikembangkan karena memiliki tempat yang strategis untuk pengembangan pariwisata dan budaya. Dengan adanya potensi-potensi yang dimiliki tersebut maka peran pemerintah harus maksimal agar dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat Kota Batu.

World Bank (1997) menjelaskan bahwa fungsi pemerintah daerah secara umum terdiri dari peran minimal, peran antara dan peran aktif. Peran tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel. 1 Peran Pemerintah Daerah menurut World Bank 1997

	Menanggulangi Kegagalan Pasar	Meningkatkan Pemerataan
Peran Minimal	Menyediakan barang-barang public	Program pengentasan kemiskinan, Bantuan Bencana
	Pertahanan	
	Keamanan	
	Manajemen Ekonomi Mako	
	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Publik	
Peran Antara	Menanggulangi Eksternalitas	Menyediakan Asuransi Sosial: Pemerataan Pensiun, Dana Pensiun, Tunjangan, Pengangguran
	Mengatur Monopoli	
	Mengatasi Informasi yang Tidak Sempurna	
Peran Aktif	Mengkoordinasi Kegiatan Swasta: Mendukung Fungsi Pasar dan Memberikan Inisiatif	Redistribusi Aset

Sumber : World Bank (1997)

D. Pengembangan Industri Pariwisata

1. Pengertian Pengembangan

Istilah “Pengembangan” berasal dari kata “Kembang” dalam (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1994:473). Pengembangan berarti sebuah “proses, cara, perbuatan, mengembangkan, pemerintah berusaha dalam pengembangan secara bertahap dan teratur yang menjerumus ke sasaran yang dikehendaki”. Menurut Yoeti (2008:273) pengembangan adalah usaha

atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada.

Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa pengembangan berarti peningkatan terhadap fasilitas dalam kegiatan industri pariwisata yang termasuk budaya lokal dan agrowisata.

“Menurut Yoeti (2008:77) alasan utama pengembangan pariwisata suatu daerah tujuan wisata pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan daerah atau negara tersebut. Dengan kata lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak.”

Apabila dalam suatu daerah memiliki tujuan wisata yang baik dan berkembang maka akan banyak wisatawan baik lokal maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung itu akan berdampak positif bagi daerahnya. Salah satu dampak positif yang dapat timbul dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung adalah dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi para penduduk setempat. Ada beberapa sektor yang dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja dengan didirikannya tempat-tempat rekreasi yaitu pusat perbelanjaan, *souvenir shop*, penginapan atau perhotelan, jasa transportasi, dan tempat-tempat hiburan lainnya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Sesuai dengan penjelasan tersebut, pengembangan atau pembangunan adalah suatu cara yang dapat dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan kepariwisataan sangat erat hubungannya dengan Administrasi Pembangunan karena dengan berkembangnya pariwisata disuatu daerah maka akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar karena peluang kesempatan kerja menjadi luas.

2. Pengertian Pariwisata

Sebagian besar wisatawan berasal dari daerah yang memiliki ekonomi yang mendominasi daerah lain pada skala lokal, nasional dan internasional. Orang-orang dinegara Amerika, Jerman Barat, Inggris, Jepang, Prancis dan Belanda merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya mengeluarkan dana yang cukup tinggi untuk melakukan perjalanan pariwisata. Pariwisata menurut Spillane (1987:20) adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olah raga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain. Secara luas pariwisata juga dapat diartikan sebagai suatu perjalanan antara satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok, untuk mendapatkan kebahagiaan tersendiri dari lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, ilmu dan alam.

Definisi lain mengenai pengertian dari pariwisata menurut Yoeti (1985:108) pariwisata yaitu :

“Suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain, dengan maksud untuk berusaha (bisnis) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.”

Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu : (a) Harus bersifat sementara; (b) Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa; (c) Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

3. Pengertian Industri Pariwisata

Dalam dasawarsa terakhir ini, banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap industri pariwisata. Hal seperti ini jelas terlihat dengan banyaknya program-program pengembangan kepariwisataan yang sedang dilaksanakan dalam negara-negara tersebut. Negara yang satu dengan yang lain seolah-olah hendak melebihi negara yang lain untuk menarik lebih banyak kedatangan para wisatawan, lebih lama tinggal, dan lebih banyak menghamburkan uangnya. Tetapi banyak program yang dilakukan dalam pengembangan industri pariwisata tersebut belum masak untuk dipertimbangkan karena tidak memikirkan secara jauh dampak dari perusakan yang mungkin ditimbulkan dari keuntungan yang akan diperoleh dari pengembangan industri pariwisata. Ada beberapa anggapan yang mengungkapkan bahwa seakan-akan pengembangan pariwisata dapat memberikan hadiah dengan sangat mudah. Sering terjadi di negara-negara berkembang mengharapkan hasil yang maksimal dari pengembangan industri pariwisata tetapi pada kenyataannya menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Untungnya negara-negara berkembang ini memiliki potensi alam dan budaya yang melimpah sehingga dapat dijadikan modal dalam pengembangan pariwisata di negaranya tersebut. Pertumbuhan yang berimbang untuk perekonomian tersebut dapat terjadi sebagai akibat majunya pertumbuhan industri pariwisata yang dikembangkan dengan baik.

Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri tetapi

merupakan industri yang terdiri dari beberapa perusahaan dan menghasilkan suatu jasa atau produk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Industri pariwisata merupakan industri yang bergerak di bidang pariwisata atau industri yang memusatkan perhatiannya kepada segala usahanya untuk mendukung pariwisata. Beberapa contoh dari industri pariwisata adalah Perhotelan, Rumah Makan, Pengolahan Wilayah Wisata, dan Kesenian Budaya. Pariwisata merupakan industri jasa yang dapat digolongkan sebagai industri ketiga (*tertiary industry*), industri tersebut memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan-kebijakan untuk memperluas kesempatan kerja. Alasannya adalah semakin mendesaknya tuntutan akan kesempatan kerja yang tetap sehubungan dengan meningkatnya wisata pada masa yang akan datang. Negara-negara berkembang sudah seharusnya memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki dengan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan menggairahkan pembangunan yang ada di dalam negeri. Tetapi kesadaran rakyat dalam hal menabung masih kurang sehingga kemampuan untuk berinvestasi dalam negeri masih tetap kecil. Dengan terbatasnya modal yang di arahkan untuk berinvestasi dalam segala bentuk (transportasi, hotel, lapangan terbang, terminal, jalan raya, fasilitas rekreasi dan olah raga, rumah makan dan sebagainya) tersebut kecil maka banyak investor asing yang masuk untuk berinvestasi.

Aspek lain yang dianggap penting dalam kebijaksanaan ekonomi adalah pembangunan daerah secara regional melalui kegiatan kepariwisataan. Pariwisata dapat dilihat sebagai sesuatu yang dapat memberikan kenikmatan

kepada pendatang dan meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk yang ada disekitarnya. Akan tetapi, nilai yang dikehendaki oleh kepariwisataan bukan hanya berbentuk investasi sarana dan prasarana suatu proyek serta biaya untuk keperluan impor berupa valuta asing, tetapi banyak juga yang bersifat nonmoneter. Dapat diberikan contoh dengan adanya perusakan lingkungan alam, pencemaran seni budaya, dan hilangnya sifat-sifat kepribadian bangsa dengan kedatangan wisatawan-wisatawan asing ini harus ditangani dengan serius dari pemerintah. Banyak terjadi perusakan terhadap objek wisata seperti candi yang dicoret-coret, wisata alam yang dirusak dengan pembuangan sampah sembarangan, kesenian daerah yang dirusak, upacara adat atau kebudayaan yang dikomersilkan, serta wisata bahari yang sumberdayanya dibajak oleh negara-negara tetangga. Belum lagi adanya masalah lain dengan kenaikan yang terjadi di daerah akibat dari daya tarik wisatawan yang suka berbelanja, anggapan bahwa produk luar negeri selalu lebih baik dari produk dalam negeri, serta meniru gaya hidup dan tata cara yang dilakukan orang asing dalam keseharian. Hal-hal tersebut tentu saja membawa dampak negatif bagi pertumbuhan kepariwisataan yang dapat mengalahkan dampak-dampak positif dari yang telah direncanakan. Demi pembangunan daerah itu, industri pariwisata haruslah direncanakan, pertumbuhannya harus segera dikendalikan, dalam pengembangannya harus dapat diarahkan, pemasaran dan promosinya harus digencarkan, meningkatkan mutu pelayanan agar tercapai tujuan pengembangan industri pariwisata untuk pertumbuhan setiap daerah.

Menurut Spillane (1987:88) ada beberapa sifat khusus dari industri pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Produk wisata memiliki ciri tak bisa di bawa pulang oleh wisatawan atau bahkan oleh orang yang mempromosikannya. Apabila seseorang tertarik dengan pesona wisata daerah tertentu, maka ia harus datang ke tempat tersebut dan mengalami sendiri atraksi yang diberikan.
- b. Produksi dan konsumsi terjadi pada saat yang bersamaan. Tanpa ada pelanggan dari produk wisata itu, maka tidak akan ada proses produksi.
- c. Sebagai sebuah produk jasa, pariwisata tidak memiliki standar ukuran, panjang, bentuk, isi dan kapasitas seperti yang ada pada produk barang.
- d. Dalam proses promosi tidak ada sample dari produk wisata itu, calon wisatawan hanya akan menikmati gambar atau foto dari daerah tujuan wisata yang bersangkutan.
- e. Dari segi usaha, industri pariwisata mengandung risiko yang cukup tinggi. Dibutuhkan modal yang besar agar dapat menjalankan sebuah industri pariwisata. Risiko yang ditanggung dipengaruhi oleh ekonomi, politik, sikap masyarakat, dan juga preferensi dari wisatawan tersebut akan daerah tujuan wisata.

Berdasarkan sifat khusus yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila industri pariwisata mengalami penurunan tingkat kepariwisataanya maka itu akan berdampak buruk pula bagi industri pendorong pariwisata di daerah tersebut.

E. Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata

1. Pengertian Budaya

Bangsa Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai macam budaya. Indonesia memiliki letak yang sangat strategis dan juga memiliki tanah yang subur dengan kekayaan alam melimpah ruah. Adanya pengalaman yang terjadi di masa lampau menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sibuk dan menjadi salah satu urat nadi perekonomian

yang ada di Asia Tenggara dan dunia menyebabkan banyak penduduk dari Negara lain yang datang ke Indonesia. Letak keadaan geografis yang strategis menyebabkan semua arus budaya asing bebas masuk ke Indonesia. Hampir seluruh budaya setiap etnis mulai dari Asia sampai Eropa ada di Indonesia. Budaya yang masuk tersebut memiliki berbagai macam dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif seperti memperkaya dan mempengaruhi perkembangan budaya lokal yang sudah ada secara turun-temurun. Perkembangan kebudayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Lingkungan geografis induk bangsa, dan
- b. Kontak antar bangsa.

Indonesia telah memenuhi faktor tersebut sehingga kebudayaan yang ada menjadi beragam dan unik. Konsep budaya atau kebudayaan sering berbeda dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya. Pengertiannya hanya dibatasi pada sesuatu yang indah seperti candi, tarian, sastra, seni, dan filsafat.

2. Pengertian Budaya Lokal

Indonesia terletak di wilayah yang menghampar dari ujung utara Pulau Weh sampai ke bagian timur di Merauke. Selain itu, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan keragaman budaya yang dimilikinya sehingga bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki beragam budaya. Budaya lokal meliputi berbagai kebiasaan dan nilai bersama yang dianut masyarakat tertentu.

Ada lima ciri-ciri pengelompokan suku bangsa dalam pengertian yang dapat disamakan dengan budaya lokal, yaitu :

1. Adanya komunikasi melalui bahasa dan dialek di antara mereka.
2. Pola-pola sosial kebudayaan yang menumbuhkan perilaku dinilai sebagai bagian dari kehidupan adat istiadat yang dihormati bersama.
3. Adanya perasaan keterikatan antara satu dan yang lainnya sebagai suatu kelompok dan yang menimbulkan rasa kebersamaan di antara mereka.
4. Adanya kecenderungan menggolongkan diri ke dalam kelompok asli, terutama ketika menghadapi kelompok lain pada berbagai kejadian sosial kebudayaan.

Budaya lokal adalah suatu kebiasaan serta adat istiadat daerah tertentu yang lahir secara alamiah, berkembang, dan sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Setiap daerah memiliki budaya lokalnya masing-masing. Budaya lokal juga dapat diartikan sebagai suatu budaya yang berasal dari masing-masing daerahnya dan memiliki ciri khas tertentu di masing-masing daerah sebagai identitas daerah tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan sistem sosial budaya, saat ini budaya lokal dimaknai sebagai pengetahuan bersama yang dimiliki sejumlah orang. Budaya lokal meliputi berbagai kebiasaan dan nilai bersama yang dianut masyarakat tertentu. Kebudayaan suku bangsa juga sering dihubungkan dengan budaya lokal. Pada umumnya budaya lokal dapat langsung dikenali dari bahasa yang

digunakan di antara mereka. Bahasa merupakan simbol identitas, jati diri, serta pengikat di antara suku bangsa. Pada kenyataannya terdapat kondisi yang memprihatinkan karena semakin banyak bahasa yang punah atau hampir punah di dunia, khususnya di Indonesia. Proses mulai hilangnya bahasa-bahasa daerah tanah air, juga diakibatkan semakin berkurangnya penutur asli bahasa lokal. Kenyataan seperti ini harusnya dipandang sebagai suatu bencana sosial yang bersifat global dan harus diberikan perhatian yang lebih dari masyarakat serta pihak terkait karena merupakan bencana sosial yang bersifat global. Bangsa yang besar merupakan bangsa yang tidak keluar dari akar budayanya. Melestarikan budaya daerah, tidak berarti ketinggalan zaman atau kuno tetapi orang modern merupakan orang yang dapat mengembangkan budaya daerah. Budaya yang memasuki bangsa Indonesia ini mempengaruhi perkembangan budaya lokal yang telah ada secara turun temurun. Budaya asing yang memasuki wilayah tersebut terkadang menjadi ancaman bagi budaya lokal yang secara turun temurun sudah dikembangkan.

Dalam pengembangan daerah, pariwisata dapat menimbulkan berbagai dampak yang terjadi bagi kebudayaan masyarakat suatu daerah tersebut. Dampak positifnya adalah jika pengembangan tersebut dapat menarik perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai kebudayaan masyarakat setempat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, apabila pengembangan tadi melunturkan nilai-nilai budaya yang sudah ada karena masyarakat setempat lebih tertarik dengan nilai-nilai budaya asing tanpa menghayati esensinya.

Walaupun demikian, bersikap positif tidak berarti mengabaikan dampak-dampak negatif yang dapat timbul. Dengan adanya dampak negatif tersebut, maka tidak selalu berarti kita bersikap negatif terhadap wisatawan, baik wisatawan lokal, nasional maupun internasional.

3. Konsep Agrowisata

Menurut undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang Kepariwisataaan, wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Agrowisata, secara umum didefinisikan sebagai konsep yang mengandung suatu kegiatan perjalanan atau wisata yang dipadukan dengan aspek – aspek kegiatan pertanian. Agrowisata bila ditinjau dari aspek substansinya lebih dititikberatkan pada upaya menampilkan kegiatan pertanian dan suasana pedesaan sebagai daya tarik utama wisatanya serta dengan tidak mengabaikan sisi kenyamanan. Pengertian ini mengacu pada ciri kegiatan wisata yang rekreatif, ditambah lagi dengan unsur pendidikan dalam kemasan paket wisatanya dan unsur sosial ekonomi (Chamdani, 2008).

Wisatawan yang memiliki tujuan rekreasi menginginkan suatu daerah yang menimbulkan suasana baru yang jauh dari kebisingan kehidupan sehari-hari. Daerah tersebut merupakan daerah pedesaan yang memiliki pemandangan alam dengan udara yang sejuk dan nyaman digunakan untuk beristirahat. Biasanya daerah tersebut berupa pantai, gunung-gunung,

pedesaan, hutan-hutan, ladang-ladang perkebunan dan sebagainya. Saat ini banyak sekali tempat wisata seperti itu yang dikembangkan sebagai kawasan agrowisata. Secara umum agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait agar menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Secara konseptual, agrowisata lebih ditekankan dengan upaya yang menampilkan kegiatan dalam pertanian serta membawa suasana pedesaan untuk daya tarik utama wisatanya dan tidak meninggalkan faktor keselamatan bagi para wisatawan. Ada beberapa macam agrowisata yang biasanya dijadikan sebagai tempat wisata, antara lain wisata petik buah, wisata petik bunga, wisata budaya, pembudidayaan sayur dan buah, dan lain-lain. Ada beberapa dampak yang akan terjadi dalam pengembangan industri pariwisata tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak positif yang akan terjadi dengan adanya pembangunan dari industri pariwisata yang berbasis agrowisata seperti tempat-tempat rekreasi, lapangan golf, petik buah-buahan dan sebagainya adalah apabila penggunaan areal yang luas tersebut dirancang sebagai sarana pencegahan polusi dan untuk mengurangi kepadatan penduduk sebagai akibat dari pengembangan itu sendiri. Sedangkan dampak negatif yang bisa terjadi adalah apabila penduduk setempat ditinggalkan karena tidak diperkirakan dapat ikut menikmati atau mendapatkan manfaat dari fasilitas-fasilitas tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat menimbulkan gejolak yang lambat laun akan mengguncangkan stabilitas masyarakat setempat. Oleh

karena itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah setempat dalam pengembangan industri pariwisata tersebut.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sugiyono (1991:1) metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid, dan variable dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa metode penelitian sangat berperan bagi peneliti. Dengan adanya metode penelitian, peneliti memiliki pedoman dan batas yang jelas sehingga penelitian yang dilakukan lebih fokus dan terarah.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan sebagai suatu cara untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk memecahkan, menemukan, mengembangkan dan menguji masalah yang diteliti agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti berharap dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.

Melalui metode kualitatif peneliti pada tahap awal melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala dalam hal ini dengan memberikan gambaran dan analisis secara mendalam terkait peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu. Arikunto (1990:309), mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggambarkan suatu fenomena yang terjadi secara terperinci untuk memecahkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang gejala-gejala yang terjadi di masyarakat agar mudah dipahami dan disimpulkan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menentukan fokus penelitian untuk membatasi studi sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan juga dapat menyaring informasi yang lebih relevan. Berdasarkan judul penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata, maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu, yang meliputi :
 - a. Macam-macam peran pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu
 - b. Rencana pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu.
 - c. Implementasi pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu.
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu.
2. Faktor yang mempengaruhi pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu
 - a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap fenomena dari objek yang diteliti untuk memperoleh informasi mengenai data yang sedang diperlukan. Berdasarkan pemaparan diatas maka penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batu. Alasan yang mendasarinya adalah mengingat bahwa Kota Batu sebagai kota yang mempunyai potensi yang besar dalam bidang kepariwisataan. Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap fenomena yang sesungguhnya terjadi

dari obyek yang diteliti. Dengan demikian yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat, orang, atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan topik yang diteliti. (Henry 2014:68) bahwa dalam penelitian kualitatif, jenis dan sumber data dipilih secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dan bersifat *snowball sampling* yaitu dimana unit sample yang dipilih makin lama semakin terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus penelitian. Dalam penelitian ini, karena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti tidak menggunakan kuesioner, namun menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer sehingga sumber data dalam penelitian ini disebut informan. Sedangkan untuk data sekunder peneliti langsung mendatangi situs penelitian yang menurut peneliti bisa memberikan data-data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini.

Oleh karena itu maka peneliti membagi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Informan

Dalam menentukan informan, peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian peneliti memilih informan secara *purposive*, pada subyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti “*key informan*” baik dipemerintah maupun masyarakat. Kemudian untuk

mendapatkan informan selanjutnya, peneliti meminta rekomendasi kepada informan awal untuk menentukan aktor selanjutnya yang berkompeten dan dapat memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Proses seperti ini dikenal dengan istilah “*snowball*” yang dilakukan dengan cara sejalan atau berurutan sampai peneliti mencapai titik jenuh. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informasi kunci sesuai dengan bidangnya dan jumlah informan ditetapkan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan waktu dan tempat untuk meneliti informan, selain itu juga tingkat pemahaman informan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Dokumen

Dokumen adalah teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa informasi yang berbentuk catatan-catatan resmi, peraturan tertulis atau arsip-arsip yang relevan dengan penelitian, dan kebijakan-kebijakan yang lainnya yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu. Selain itu peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan profil lokasi penelitian. Teknik ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi informasi peneliti dan untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini dokumen yang digunakan peneliti untuk mendukung penelitian ini,

yaitu :

3. Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui kegiatan observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu.

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada waktu berada dilapangan dengan tujuan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan penelitian. Data primer tersebut diperoleh dalam Pemerintah Daerah Kota Batu serta lembaga-lembaga atau organisasi yang terkait dengan penelitian. Data primer dapat diperoleh dengan cara mengamati dan melakukan wawancara dengan informan yang berada dalam organisasi yang diteliti dengan substansi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, yaitu :

- a. Bapak Rizaldi selaku Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan BAPPEDA Kota Batu.
- b. Bapak Sariono selaku Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata BAPPEDA Kota Batu.
- c. Bapak Yudho Prasetyo selaku Staff Bidang Sarana, Prasaran, dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kota Batu.

- d. Bapak Yoni Susetya selaku Staff Bidang Program dan Pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu
- e. Bapak Edy Suyanto selaku Kepala Desa Bumiaji.
- f. Bapak Surahman selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Bumiaji.
- g. Bapak Fatur Rohman selaku staff bagian Manager dan Marketing *Kusuma Agrowisata Convention Center*.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen sebagai sumber data sekunder yang berbentuk arsip-arsip, catatan resmi ataupun peraturan tertulis. Sebagai contoh dari data sekunder yang berupa dokumen serta arsip-arsip yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA), Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan substansi penelitian. Selain itu juga dilakukan studi pustaka untuk memperoleh kerangka pemikiran dan landasan teori yang menunjang proses penelitian di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono,2008:224). Sugiyono (2012:225) membedakan teknik pengumpulan data menjadi empat bagian yaitu observasi, interview, dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulasi). Berdasarkan pernyataan diatas, maka agar mendapatkan data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, merupakan pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan serta interaksi dengan melihat lapangan dari komunitas yang telah ditetapkan dalam penelitian. Apabila peneliti mengumpulkan data untuk penelitian ilmiah, terkadang peneliti perlu memperhatikan berbagai fenomena atau kadang menggunakan pengamatan orang lain. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai “perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu” (Emzir,2012:37). Pengamatan dilakukan untuk melihat interaksi nyata antara objek penelitian dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pihak pewawancara

mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai sebagai salah satu teknik mengumpulkan data penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan wawancara sangat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu pewawancara, pihak yang diwawancarai, topik penelitian dan situasi pada saat wawancara tersebut dilakukan. Adapun jenis wawancara yang dipilih dalam penelitian ini berupa wawancara terbuka dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh peneliti didapat secara mudah dan jelas. Selain itu kemudahan memperoleh informasi dalam wawancara terbuka ini juga didukung oleh subyek peneliti yang telah mengetahui dan memahami maksud peneliti sebelum dilakukan wawancara.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan memperoleh dokumen atau inventarisasi arsip dari instansi yang menjadi objek peneliti, seperti struktur organisasi, data dari peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh atau diperlukan oleh peneliti dalam penelitian. Dengan kata lain instrumen penelitian merupakan perangkat yang membantu peneliti untuk memperoleh data dalam seluruh rangkaian proses kerja penelitian. Sugiyono

(2012:222) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan menurut Arikunto (2006:136), instrumen penelitian adalah alat fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Berdasarkan pada pernyataan diatas maka dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah :

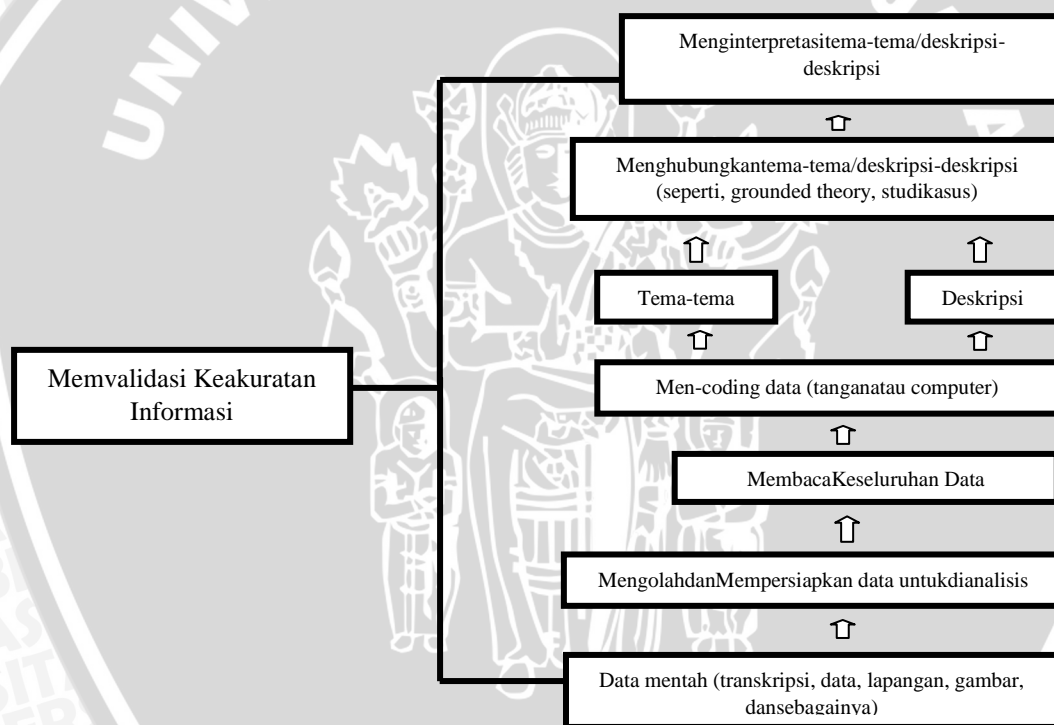
1. Peneliti, dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah penelitian sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian memnjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), berguna sebagai pengarah atau pembatas bagi peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Agar mengetahui data apa yang diinginkan maka peneliti harus membuat pedoman wawancara baik untuk memulai pencarian data maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya.

3. Catatan lapangan (*field note*), dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data penelitian di lapangan.
4. Alat penunjang, diantaranya adalah alat tulis-menulis, alat rekaman serta dokumentasi foto melalui HP peneliti.

G. Metode Analisis

Analisis data merupakan suatu bagian yang penting dalam penelitian maka data-data yang ditemukan meliputi data primer dan data sekunder akan diolah kemudian disusun secara kualitatif, kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, setelah itu dianalisis dan disertai dengan data-data yang bersifat umum menjadi data-data yang bersifat khusus dan logis. Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan analisis data di suatu penelitian memiliki beberapa tahap yaitu mencari serta mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, setelah itu mempresentasikan hasil penemuan dari penelitian tersebut kepada orang lain. Berdasarkan pengertian diatas maka dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis-*analisis* berdasarkan suatu obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih memiliki arah. Peneliti berlandaskan pada pernyataan Cresswell (2012) yang menyatakan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif dapat melibatkan proses

pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Apabila wawancara berlangsung, misalnya ketika peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang baru diperoleh dari hasil wawancara, menulis catatan-catatan kecil yang dapat dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir dan memikirkan susunan laporan akhir. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh John W. Creswell. Agar lebih jelasnya, dapat dijabarkan dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif (Sumber: Creswell, 2012:277)

Sesuai dengan pendekatan diatas, dapat dijelaskan lebih mendalam dan teliti dalam langkah-langkah analisis berikut :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi yang berhubungan dengan penelitian, menyetik data yang terdapat di lapangan,

atau memilah-milah serta menyusun data yang didapat tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda pada sumber informasi. Dalam tahap ini, peneliti akan mempersiapkan data yang relevan dengan peran pemerintah daerah Kota Batu dalam pelaksanaan pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.

2. Membaca dan memahami keseluruhan data. Langkah awal yang dilakukan adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara menyeluruh. Gagasan umum apa yang disampaikan dalam perkataan informan, bagaimana inti dari gagasan-gagasan tersebut, bagaimana kesan yang timbul, kredibilitas, dan penuturan informasi dari informan. Dalam tahap ini, peneliti menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh dan bersangkutan dengan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu.
3. Menganalisis lebih detail dengan men-*coding* data. Menurut Rossman & Rallis (1998:171) yang menyatakan bahwa *coding* merupakan suatu cara untuk mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Dalam langkah ini melibatkan beberapa tahap yang pertama yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan data, mensegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian memberikal label kategori-kategori ini

dengan istilah-istilah khusus berdasarkan pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan (disebut istilah *invivo*). Pada tahap ini, peneliti memilah-milih mana data penelitian yang termasuk dalam sub tema 1) Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata yang sesuai dengan arah kebijakan pemerintah Kota Batu, 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu.

4. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara teliti mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* tertentu yang ada di dalam proses penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema peneliti akan disajikan kembali dalam laporan penelitian dalam analisis data. Pendekatan yang sering digunakan yaitu dengan menerapkan pendekatan naratif dalam penyampaian hasil analisis. Pada tahap ini peneliti akan menyajikan hasil analisis melalui pendekatan naratif terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.
6. Langkah terakhir adalah menginterpretasi atau memaknai data. Dalam

langkah ini dapat berupa interpretasi dari pribadi peneliti itu sendiri dengan berdasarkan pada kenyataan bahwa penelutu membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadi yang dialami kedalam penelitian. Interpretasi juga dapat berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Pada tahap terakhir ini peneliti tentunya akan memberikan interpretasi pribadi dan mengaitkannya dengan teori atau literatur terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu.



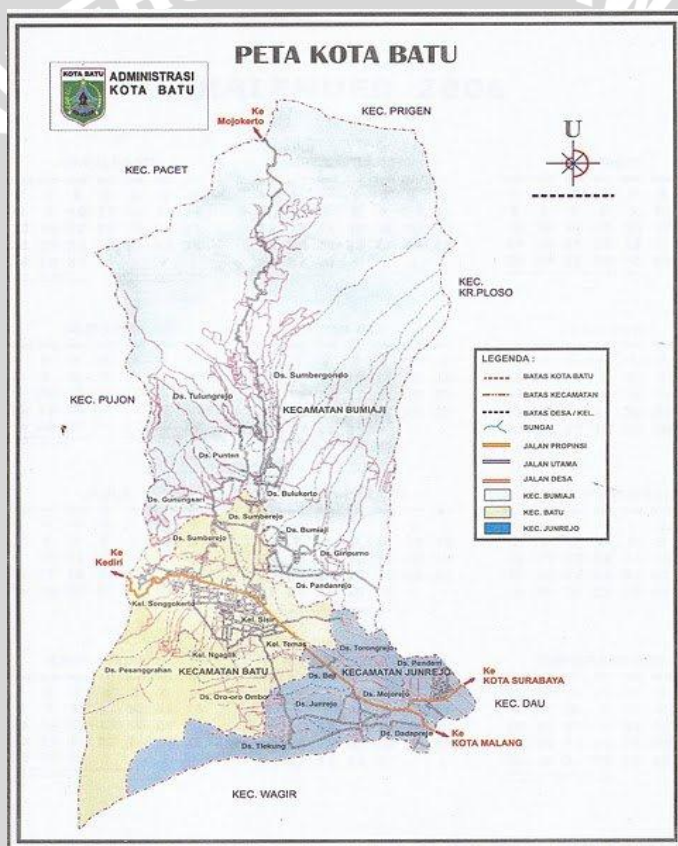
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Kota Batu

a. Sejarah Terbentuknya Kota Batu dan Pemerintahan Kota Batu



Gambar 2. Peta Kota Batu 2015

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Batu masih merupakan Kecamatan dalam

lingkungan wilayah Pemerintah Kabupaten Malang. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Kota Surabaya atau 15 km sebelah barat Kota Malang dan berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada tanggal 27 April 1993 dan pada tanggal 21 Juni 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang dan hari jadinya ditetapkan pada tanggal 8 November 2001. Sejak abad ke 10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayahnya merupakan daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang segar serta didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut, berdasarkan kisah-kisah orang tua terdahulu dan sampai saat ini masih belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama “Batu” mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut.

Berdasarkan sejarah yang mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering

memperpendek atau mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu di panggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk salah satu Kota Dingin di Jawa Timur. Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang membuat keindahan luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan dan keelokan alam Batu membuat wilayah Kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan dijuluki sebagai *De Kleine Zwitserland* atau Swiss Kecil di Pulau Jawa. Bersama dengan Kabupaten Malang dan Kota Malang, Kota Batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya.

b. Visi Misi Kota Batu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2012-2017, arah kebijakan pembangunan Kota Batu adalah untuk visi dan misi tahun 2012-2017. Visi merupakan pandangan jauh ke depan dalam suatu organisasi yang berupa tujuan-tujuan dari organisasi tersebut atau ke arah mana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi juga dapat diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan kemana suatu organisasi tersebut harus

dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif untuk menantang tantangan keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Visi Kota Batu merupakan gambaran secara proyektif dan rasional tentang suatu pandangan keadaan dimasa depan yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Batu dan masyarakatnya dalam kurun waktu tertentu. Dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan Kota Batu, visi Kota Batu tahun 2012-2017 adalah “Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional Ditunjang Oleh Pendidikan yang Tepat Guna dan Berdaya Saing Ditopang Sumberdaya (Alam, Manusia dan Budaya) yang Tangguh Diselenggarakan oleh Pemerintahan yang Baik, Kreatif, Inovatif Dijiwai oleh Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam usahanya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi Kota Batu menggambarkan secara jelas tahapan-tahapan yang penting dalam proses pembangunan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Batu tersebut, maka dibutuhkan misi

pembangunan Kota Batu. Adapun misi pembangunan Kota Batu tahun 2012-2017 adalah (1) Peningkatan Kualitas Hidup antar Umat Beragama, (2) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, (3) Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik, (4) Meningkatkan Posisi Peran dari Kota Sentra Pariwisata menjadi Kota Kepariwisataan Internasional, (5) Optimalisasi Pemerintahan Daerah, (6) Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan, (7) Peningkatan Kualitas Kesehatan, (8) Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, (9) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat, (10) Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik di Kota Batu yang Harmonis dan Demokratis, serta (11) Pemberdayaan Masyarakat melalui Koperasi dan UKM.

c. Bentuk dan Arti Lambang Kota Batu



Gambar 3. Lambang Kota Batu (Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2001).

1) Gambar Bintang

Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna meskipun berbeda suku, agama, dan pandangan hidup tetap menjunjung tinggi kerukunan umat beragama.

2) Gambar Padi dan Kapas

Melambangkan pangan dan sandang yang terdiri dari padi berjumlah 17 dan kapas berjumlah 10 mempunyai makna tanggal dan bulan peresmian kota Batu.

3) Gambar Gunung

Melambangkan kekuatan dan kebesaran yaitu kota Batu berada pada lereng Gunung Panderman, Gunung Arjuno dan Gunung Welirang yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar terutama mata air yang menyatu menjadi Sungai Brantas, serta beranekaragam flora dan fauna sehingga menjadi daya tarik wisata.

4) Gambar Keris

Berwarna keemasan dengan posisi tegak yang melambangkan jiwa ksatria, kekuatan, ketajaman pikir, batin dan perjuangan yang pantang menyerah serta kepribadian yang berbudaya untuk mencapai Kota Batu kedepan.

5) Gambar Rantai

Warna hitam yang melambangkan Persatuan dan Kesatuan dalam Negara Republik Indonesia. Rantai berjumlah tiga

diartikan bahwa manusia dengan Tuhan serta alam dan sesamanya adalah unsur yang tidak terpisahkan.

6) Gambar Candi

Melambangkan sistem pemerintahan kota Batu yang tertib, rapi dan teratur.

7) Warna Dasar Hijau

Dengan gambar filosofi petak-petak sawah melambangkan Kota Batu adalah daerah Agraris, mengandung arti filosofi “*Gemah Ripah Loh Jinawi*” (daerah yang subur) dan sebagian besar masyarakatnya bertani.

8) Gambar Air

Melambangkan sumber kehidupan yang lestari.

9) Bentuk Perisai

Memiliki 5 sisi yang melambangkan Pemerintah Kota Batu berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

10) Warna Merah Putih

Melambangkan Bendera Indonesia.

11) Tulisan Kota Batu

Menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Batu.

12) Hakaryo Guno Mamayu Bawono

Merupakan makna Condro Sengkolo yang mengandung arti Berkarya Guna Membangun Negara. Condro Sengkolo 1934,

adalah Tuhan Jawa yang merupakan peresmian Pemerintah Kota Batu dengan nilai kata : HAKARYO = 4, GUNO = 3, MAMAYU = 9, BAWONO = 1, berjumlah 17, sebagai tanggal peresmian kota Batu, dengan jumlah suku kata 11 bermakna Dasar Hukum Peresmian Kota Batu diatur dalam UUN 11 Th.2001.

d. Keadaan Geografis dan Wilayah Kota Batu

Secara umum, Kota Batu dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu daerah lereng atau bukit dengan proporsi lebih luas dan daerah dataran. Luas wilayah Kota Batu secara keseluruhan sekitar 19.908,72 Ha atau sekitar 0,42% dari total luas Provinsi Jawa Timur. Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan lain sebagainya. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin.

Secara administrasi, Kota Batu terdiri dari tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Sedangkan rincian luas wilayah masing-masing kecamatan di Kota Batu dapat dilihat sebagai berikut.

a) Kecamatan Batu

- 1) Luas wilayah Kecamatan Batu : 4.545,81 Ha

- 2) Jumlah Desa/Kelurahan : 4 Kelurahan dan 4 Desa
 - 3) Jumlah RW/RT : 96 RW dan 453 RT
- b) Kecamatan Junrejo
- 1) Luas wilayah Kecamatan Junrejo : 2.565,02 Ha
 - 2) Jumlah Desa/Kelurahan : 1 Kelurahan dan 6 Desa
 - 3) Jumlah RW/RT : 59 RW dan 240 RT
- c) Kecamatan Bumiaji
- 1) Luas wilayah Kecamatan Bumiaji : 12.797,89 Ha
 - 2) Jumlah Desa/Kelurahan : 9 Desa
 - 3) Jumlah RW/RT : 82 RW dan 429 RT

Tabel 2.**Luas Wilayah Kota Batu menurut Kecamatan (Ha) Tahun 2009**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)
1.	Batu	4.545,81	64,28 %
2.	Bumiaji	12.797,89	22,83 %
3.	Junrejo	2.565,02	12,80%
	JUMLAH	19.908,72	100,00%

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, 2009

1) Topografi

Berdasarkan data dari peta kontur Bakosurtanal 2001, kemiringan lahan (*slope*) di Kota Batu diketahui bahwa, sebagian besar wilayah perencanaan Kota Batu mempunyai kemiringan lahan sebesar 25-40% dan kemiringan > 40. Rincian mengenai kemiringan ini adalah :

- a. 0 – 8 seluas 2.207,21 Ha.

- b. 8 – 15 seluas 2.223,73 Ha.
- c. 15 – 25 seluas 1.799,37 Ha.
- d. 25 – 40 seluas 4.529,85 Ha.
- e. > 40 seluas 4.493,33 Ha.

Sedangkan ketinggiannya, Kota Batu diklarifikasikan kedalam 6 (enam) kelas, yaitu:

- 1) 600 – 1.000 DPL dengan luas 6.019,21 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini yaitu:

- a. Kecamatan Batu (terutama Desa Sidomulyo secara keseluruhan, sebagian besar Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik dan Desa Sumberejoserta sebagian kecil Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan dan Kelurahan Songgokerto.
 - b. Kecamatan Junrejo (terutama Desa Junrejo, Torongrejo, Pendem, Beji, Mojorejo, Dadaprejo, dan sebagian Desa Tlengkung).
 - c. Kecamatan Bumiaji (terutama pada sebagian kecil desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Bumiaji).
- 2) 1.000 – 1.500 DPL dengan luas 6.493,64 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah : sebagian besar desa-desa yang ada di Kecamatan Bumiaji dan sebagian dari desa-desa yang ada di Kecamatan Batu (terutama wilayah Kelurahan Songgokerto, Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pesanggrahan) serta sebagian kecil Desa Tlekung yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo.

3) 1.500 – 2.000 DPL dengan luas 4.820,40 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah : sebagian kecil Desa Tlekung Kecamatan Junrejo. Selain itu juga terdapat di sebagian kecil Desa Oro-oro Ombo dan Desa Pesanggrahan, terutama di sekitar kawasan Gunung Panderman, Gunung Bokong, dan Gunung Punuksari. Sedangkan di wilayah Kecamatan Bumiaji, seluruh bagian desa mempunyai ketinggian ini, terutama kawasan-kawasan di sekitar Gunung Rawung, Gunung Tunggangan, Gunung Pusungkutuk.

4) 2.000 – 2.500 DPL dengan luas 1.789,81 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini relatif sedikit, yaitu di sekitar Gunung Srandil, serta diujung Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu yang berbatasan dengan Kecamatan Wagir. Untuk Kecamatan Bumiaji, ketinggian ini berada di sekitar Gunung Anjasmoro dan pada sebagian kecil di wilayah Desa Giripurno, Desa Bumiaji, Desa Sumbergondo dan Desa Torongrejo.

5) 2.500 – 3.000 DPL dengan luas 707,32 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah sebagian kecil desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Bumiaji, terutama pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Prigen.

6) > 3.000 DPL dengan luas 78,29 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah beberapa desa di Kecamatan Bumiaji, khususnya di sekitar Gunung Arjuno (Desa

Sumbergondo), Gunung Kembar, dan Gunung Welirang (Desa Tulungrejo).

2) Klimatologi

Kota Batu merupakan daerah pegunungan dengan hawa dingin yang memiliki suhu udara $21,3^{\circ}\text{C}$ dan $34,2^{\circ}\text{C}$. Kota Batu memiliki 2 iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2012, musim hujan dimulai pada bulan September dan diakhiri bulan Juni. Kondisi cuaca tahun 2012 relatif lebih basah dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata curah hujan pada tahun 2012 yang tercatat pada pengamatan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Energi mencapai rata-rata hujan sebanyak 107 hari dan berkisar $127,25\text{ mm/tahun}$. Untuk tingkat kelembaban udara di Kota Batu berkisar antara 34% (minimum) pada bulan Juli dan yang tertinggi pada bulan Maret sebesar 97% (maksimum).

Ditinjau dari letak astronomi, Kota Batu terletak diantara $122^{\circ} 17'$ sampai dengan $122^{\circ} 57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44'$ sampai dengan $8^{\circ} 26'$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah **Utara**: Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- 2) Sebelah **Timur**: Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
- 3) Sebelah **Selatan**: Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang
- 4) Sebelah **Barat** : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

Kota Batu dapat dibagi menjadi 4 jenis tanah. Pertama jenis tanah Andosol, berupa lahan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 Ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 Ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 Ha. Kedua jenis Kambisol, berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 Ha, Kecamatan Junrejo 741,25 Ha dan Kecamatan Bumiaji 1395,81 Ha. Ketiga tanah alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 Ha, Kecamatan Junrejo 199,93 Ha dan Kecamatan Bumiaji 376,48 Ha. Dan yang terakhir jenis tanah Latosol meliputi Batu seluas 260,34 Ha, Kecamatan Junrejo 217,00 Ha dan Kecamatan Bumiaji 408,61 Ha.

2. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kota Batu

a. Lokasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

Lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Batu, Jalan Bukit Berbunga 13a Batu, Jawa Timur. Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Batu merupakan Satuan Kerja Perangkat daerah dibawah Pemerintah Kota Batu.



Gambar 4. Peta Lokasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu (2015). Sumber : www.batukota.go.id

b. Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang didirikan dengan tujuan untuk merencanakan, mengatur, mengendalikan, mensinkronkan dan membuat evaluasi atas seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah berdasarkan sejarah daerah, topografi daerah, serta sosial budaya daerah yang bersangkutan.



c. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

Pemerintah Kota Batu terbentuk semenjak Kota Batu menjadi daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu. Penyelenggaraan pemerintahan melalui otonomi daerah diantaranya berupa pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan wajib dan pilihan oleh daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yaitu Perencanaan pembangunan. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan pelaksanaan urusan wajib dalam perencanaan pembangunan di kota Batu, khususnya terkait dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, maka dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu. Menindak lanjuti pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, pemerintah kota Batu melakukan perubahan organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, dan lembaga teknis daerah kota Batu maka terbentuklah struktur organisasi yang baru Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi, yaitu : (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, (2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bappeda sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing – masing satuan kerja perangkat daerah.

d. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

Visi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu yaitu “Terwujudnya Perencanaan yang Terpadu, Terukur,

Partisipatif, Berkelanjutan dan Berkualitas dalam Mendukung Pencapaian Kota Batu sebagai Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional”

Untuk tercapainya visi tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu menyusun misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan
- 2) Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
- 3) Meningkatkan transparansi akuntabilitas dan partisipasi seluruh stakeholder Kota Batu dalam perencanaan pembangunan daerah
- 4) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, tepat waktu dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal
- 5) Meningkatkan kapasitas organisasi perencanaan pembangunan melalui peningkatan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan bersih

e. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu mempunyai tugas pokok menentukan kebijakan penyusunan

perencanaan pembangunan, penilaian, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membantu Walikota dalam merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
3. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
4. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu.
5. Penyusunan kebijakan umum APBD bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
6. Penyusunan prioritas plafon anggaran sementara bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
7. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah.

8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
10. Penyusunan petunjuk perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
12. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah.
13. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota.
14. Melaksanakan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan lebih lanjut.

f. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

Tujuan merupakan suatu pernyataan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan visi dan misi Bappeda, maka dalam periode kerja 2012-2017 Bappeda Kota Batu menetapkan 6 (enam) tujuan meliputi :

1. Mensinergikan substansi perencanaan pembangunan Kota Batu dengan Perencanaan Pembangunan tingkat nasional dan provinsi Jawa Timur.
2. Mensinergikan substansi perencanaan pembangunan Kota Batu dengan perencanaan pembangunan tingkat SKPD Kota Batu.

3. Memantau, mendorong dan merekam kinerja pemerintah kota dan SKPD secara terukur dalam bentuk berbagai indikator capaian kinerja.
4. Melibatkan peran serta seluruh stakeholder dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dalam rangka menumbuhkan tanggung jawab seluruh stakeholder terhadap upaya pembangunan daerah.
5. Mengembangkan pelaporan capaian kinerja dan penganggaran yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batu.
6. Melakukan upaya pembinaan perencanaan dan evaluasi hasil pembinaan secara intensif dan berkelanjutan kepada sumber daya aparatur yang menjalankan tugas dan fungsi perencanaan.

g. Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program dan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berdasarkan visi, misi dan tujuan Bappeda maka dalam periode kerja 2012-2017 Bappeda Kota Batu menetapkan 12 (dua belas) sasaran meliputi :

1. Terwujudnya perencanaan Jangka panjang, menengah dan pendek ditingkat pemerintahan Kota Batu yang bersinergi dengan perencanaan nasional dan provinsi Jawa Timur.
2. Terwujudnya perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terpadu

dengan perencanaan ditingkat pemerintahan Kota Batu.

3. Terwujudnya perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batu secara tepat waktu.
4. Terwujudnya perencanaan sektoral yang sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Terwujudnya SKPD Pemerintah Kota Batu yang bekerja berdasarkan hasil capaian kinerja yang valid, terbaru dan terukur.
6. Terwujudnya data atau informasi kondisi umum daerah yang meliputi Kota Batu dalam Angka PDRB, IPM, dan Kecamatan dalam Angka yang valid dan terkini.
7. Terwujudnya data/informasi capaian kinerja pemerintah daerah yang valid dan terkini.
8. Terlaksananya forum komunikasi publik yang berhasil menjalin informasi masyarakat dalam menyusun tata ruang Kota Batu.
9. Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa / kelurahan, kecamatan dan kota yang dapat menjalin aspirasi masyarakat.
10. Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan penganggaran dari seluruh SKPD yang kemudian menjadi bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

11. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Kesesuaian aparatur peserta sosialisasi dan pembinaan perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan tugas dan fungsi kerja.

h. Sumber Daya Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

Sumber Daya Aparatur Bappeda berjumlah 61 orang yang terdiri dari 48 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 13 orang lainnya Tenaga Honorer Daerah.

Tabel 3.

Data Pegawai Negeri Sipil di Bappeda Kota Batu

Komponen		Keterangan (%)	
Jumlah Pegawai	L	37	60,66
	P	24	39,34
	Jumlah	61	100
Golongan/Ruang	IV/b	4	6,56
	IV/a	3	4,92
	III/d	7	11,48
	III/c	5	8,20
	III/b	16	26,23
	III/a	5	8,20
	II/d	1	1,64
	II/d	5	8,20
	II/b	1	1,64
	II/a	1	1,64
	Honorer	13	21,31
Ijazah Terakhir	S3	1	1,64
	S2	11	18,03
	S1	34	55,74
	D3	4	6,56
	SMA	11	18,03

Sumber : Data Bappeda Tahun 2014

Kondisi SDM Aparatur Bappeda menurut tingkat pendidikan sudah cukup memadai, kondisi ini ditunjukkan dengan sebagian besar Aparatur Bappeda berpendidikan tinggi. Sumber Daya Aparatur berijazah dibawah D3 cenderung merupakan tenaga honorer yang sifat pekerjaannya merupakan pekerjaan kebersihan dan keamanan.

i. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

1. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pembangunan, dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, dan statistik.
- b. Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik.

- c. Perencanaan dan pengendalian anggaran.
- d. Pengendalian urusan administrasi badan.
- e. Pengendalian koordinasi dan kerjasama bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitiandan pengembangan, serta statistik diantara SKPD di lingkungan pemerintah daerah dan lembaga, serta instansi terkait lainnya.
- f. Pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan program tahunan sebagai pelaksana pola umum pembangunan jangka panjang dan menengah.
- g. Pengendalian program penelitian, pengembangan, dan statistik pembangunan daerah.
- h. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan badan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja badan, urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan badan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan badan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan rencana kerja Sekretariat;
- b. Pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja badan;
- c. Pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan badan;
- d. Pembinaan dan pengembangan pegawai;
- e. Pengendalian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan;
- f. Pengendalian data informasi hasil kegiatan badan dan informasi lainnya terkait pelayanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
- g. Pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian dalam kesekretariatan antara lain:

- a) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja badan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
- b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan;
- c. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) badan;
- d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- e. Penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- g. Pengelolaan data informasi hasil kegiatan Badan dan informasi lainnya terkait pelayanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
 - b. Pelaksanaan verifikasi SPP;
 - c. Penyiapan Surat Perintah Membayar;
 - d. Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - e. Penyusunan laporan keuangan Badan;
 - f. Penyusunan administrasi dan teknis pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta penghasilan lainnya yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas mengelola ketatalaksanaan dan ketatausahaan, meliputi administrasi umum dan kepegawaian, urusan rumah tangga, barang milik daerah, perpustakaan, dan kearsipan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
 - b. Pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
 - c. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - d. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
 - e. Pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
 - f. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian;
- dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana, dan Lingkungan Hidup

Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan rencana kerja Bidang dan standar perencanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan lingkungan perkotaan dan perdesaan;

- b. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah, dan lingkungan hidup;
- c. Pengendalian program kegiatan musrenbang RPJP, RPJM, dan RKPD di bidang sarana dan prasarana wilayah, dan lingkungan hidup;
- d. Pembinaan, supervise, konsultasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah, serta lingkungan hidup;
- e. Pengkajian rencana dan permasalahan pembangunan strategis daerah di bidang sarana dan prasarana wilayah, serta lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan fasilitasi bentuk kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian dalam bidang Perencanaan Sarana, Prasarana, dan Lingkungan Hidup antara lain:

a) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang;
 2. Pendataan dan pemetaan data informasi kondisi, serta potensi sarana dan prasarana wilayah;
 3. Penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di bidang sarana dan prasarana wilayah;
 4. Pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang RPJP, RPJM dan RKPD di bidang sarana dan prasarana wilayah;
 5. Pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah di bidang sarana dan prasarana wilayah;
 6. Pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah, serta lingkungan hidup;
 7. Pengelolaan teknis administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang sarana dan prasarana wilayah;
 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang;
- dan
9. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, memonitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program Kegiatan Sub Bidang;
2. Pendataan dan pemetaan data dan informasi kondisi, serta potensi dan pengembangan tata ruang dan lingkungan hidup di wilayah;
3. Penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan fasilitasi musrenbang RPJP, RPJM dan RKPD di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sub Bidang; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup sesuai tugas dan fungsinya.

c) Sub Bidang Perencanaan Pemerintah dan Sosial Budaya

Mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, aparatur, dan sosial budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana kerja Bidang;
2. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
3. Pengendalian program kegiatan musrenbang RPJP, RPJM, dan RKPD di bidang pemerintahab dan sosial budaya;
4. Pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
5. Pengkajian rencana dan permasalahan pembangunan strategis daerah di bidang pemerintahab dan sosial budaya;
6. Pelaksanaan fasilitasi bentuk kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, memonitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan aparatur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang;
 2. Pendataan dan pemetaan data informasi kondisi, potensi dan pengembangan pemerintahan dan aparatur;
 3. Penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di bidang pemerintahan dan aparatur;
 4. Pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang RPJP, RPJM, dan RKPD di bidang pemerintahan dan aparatur;
 5. Pelaksanaan analisis data program dan pengembangan strategis daerah di bidang pemerintahan dan aparatur;
 6. Pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur;
 7. Pengelolaan teknis administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang pemerintahan dan aparatur;
 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang;
- dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Sub Bidang Sosial Budaya

Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang;
2. Pendataan dan pemetaan data informasi kondisi, potensi dan pengembangan bidang sosial budaya;
3. Penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di bidang sosial budaya;
4. Pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang RPJP, RPJM, dan RKPD di bidang sosial budaya;
5. Pelaksanaan analisis data program dan pengembangan strategis daerah di bidang sosial budaya;
6. Pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
7. Pengelolaan teknis administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di

bidang sosial budaya;

8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang;

dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana kerja Bidang;
- b. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- c. pengendalian program kegiatan musrenbang RPJP, RPJM, dan RKPD di bidang ekonomi;
- d. pembinaan, supervisi, dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
- e. pengkajian rencana dan permasalahan pembangunan strategis daerah di bidang ekonomi;
- f. pelaksanaan fasilitasi bentuk kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di

bidang ekonomi;

- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian dalam Bidang Perencanaan Ekonomi

a) Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian

Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang;
- b. pendataan dan pemetaan data informasi kondisi serta potensi dan pengembangan bidang pariwisata dan pertanian;
- c. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di bidang pariwisata dan pertanian;
- d. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang RPJP, RPJM, dan RKPD di bidang pariwisata dan pertanian;
- e. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah di bidang pariwisata dan pertanian;
- f. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi, dan

konsultasi perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan pertanian;

g. pengelolaan teknis administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang pariwisata dan pertanian;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang, dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi, perencanaan pembangunan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang;

b. pendataan dan pemetaan data informasi kondisi, potensi, dan pengembangan koperasi perindustrian, dan perdagangan;

c. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;

- d. pelaksanaan fasilitasi teknis kegiatan musrenbang RPJP, RPJM, dan RKPD di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan;
- e. pelaksanaan analisis data program pembangunan strategis daerah di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi teknis pembinaan, supervisi dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan;
- g. pengelolaan teknis administrasi kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan

Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan, menyusun pedoman, mengkaji, memfasilitasi, mengendalikan, dan mengevaluasi data perencanaan dan informasi hasil pembangunan, serta penelitian dan pengembangan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana kerja Bidang;
- b. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan pengelolaan data, penelitian, dan pengembangan;
- c. pengkajian sistem perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengkajian kebijakan nasional yang berdampak pada daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah;
- e. pengendalian perencanaan pembangunan daerah untuk mengantisipasi penyimpangan terhadap pencapaian tujuan sesuai kebijakan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
- g. pengendalian data informasi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, dan aparatur, lingkungan hidup, pariwisata, dan pertanian, serta sarana dan prasarana
- h. pembinaan penyusunan data statistik mengenai kondisi, potensi, dan perkembangan pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan fasilitasi bentuk kerja sama penelitian, data informasi dan statistik skala daerah dengan lembaga dan instansi terkait;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian dalam Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan

a) Sub Bidang Data dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, memonitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang data dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang;
- b. pendataan dan pemetaan data statistik kondisi dan potensi daerah sebagai bahan informasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan data laporan hasil evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi skala daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi jejaring statistik khusus skala kota;
- f. pengelolaan dokumentasi dan publikasi data statistik perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terget capaian hasil perencanaan pembangunan daerah dan program kegiatan Sub Bidang; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

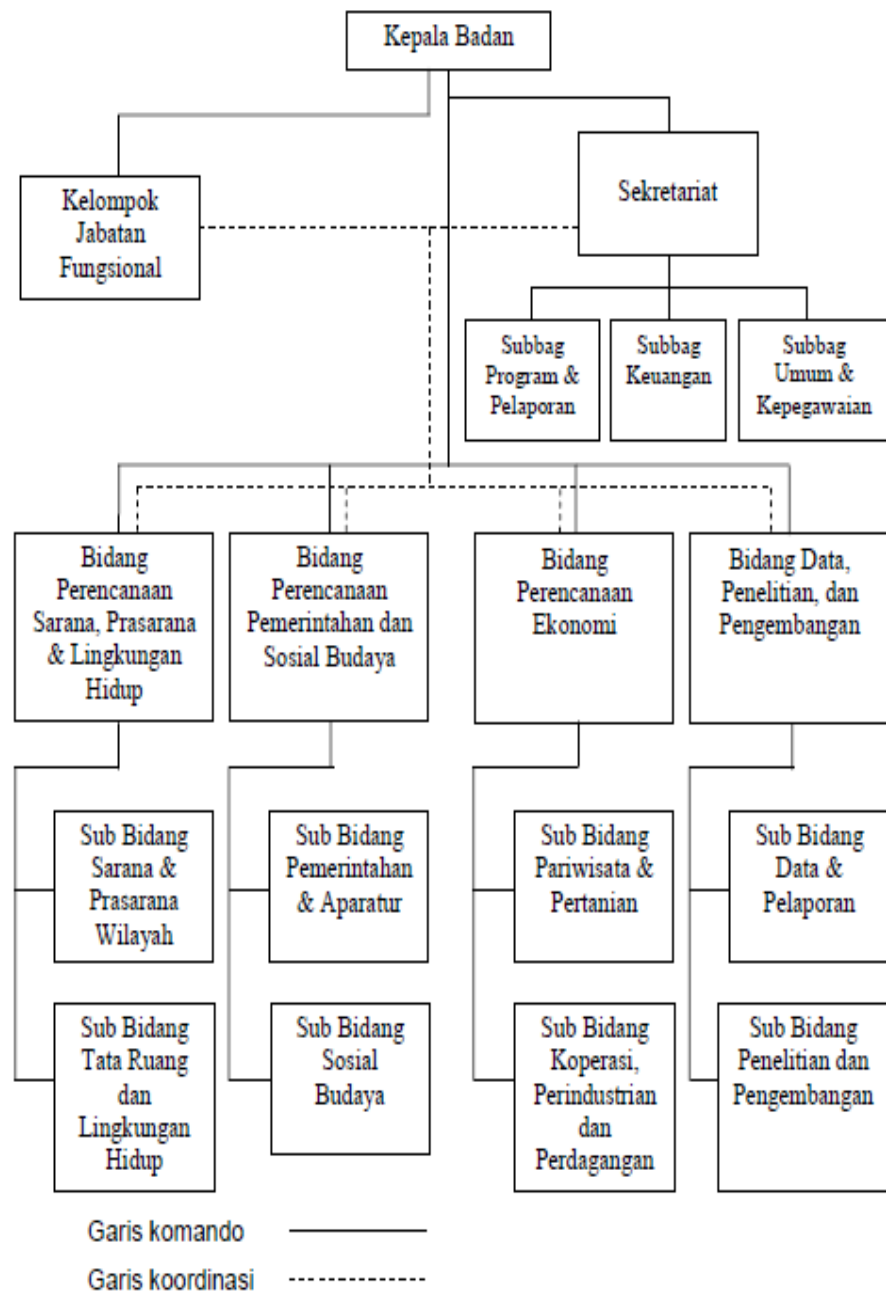
- a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang;
 - b. pendapatan dan pemetaan data informasi statistik capaian kinerja, serta permasalahan terkait perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan analisis data rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi, dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa;
 - d. pelaksanaan analisis permasalahan sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan analisis permasalahan hasil evaluasi perencanaan pembangunan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi bentuk kerja sama perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga dan instansi terkait;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang;
- dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Tata Kerja

- a. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Apabila Kepala Badan berhalangan di dalam menjalankan tugas, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- c. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- d. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- e. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- f. Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- g. Hubungan tata kerja antara Kepala Badan dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui Sekretaris.

Berdasarkan uraian diatas, berikut ini peneliti menyajikan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu dalam bentuk bagan.



Gambar 5. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu. Sumber : Rencana Strategis Kota Batu Tahun 2012-2017.

3. Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

a. Lokasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Lokasi pada penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang beralamat di Jalan Sultan Agung 7B Kota Batu.

b. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah “Terwujudnya Kota Batu Sebagai Kota Kepariwisataan Internasional”. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut maka misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkompetensi yang mampu bersaing di tingkat global
3. Mengembangkan Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata yang berbasis potensi dan masyarakat
4. Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder pariwisata baik di tingkat regional, nasional dan internasional
5. Melakukan promosi pariwisata secara kontinyu baik secara regional, nasional, maupun internasional

c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Untuk mewujudkan misi Meningkatkan kualitas dan kuantitas

produk pariwisata yang berwawasan lingkungan perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan, dengan kepuasan wisatawan akan produk pariwisata sebagai sarana jangka menengahnya.

Untuk mewujudkan misi Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing di tingkat global perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu Meningkatkan kompetensi pelaku wisata, dengan Kepuasan wisatawan terhadap pelayanan pelaku wisata sebagai sasaran jangka menengahnya.

Untuk mewujudkan misi Mengembangkan Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata yang berbasis potensi dan masyarakat perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu Mengembangkan Desa Wisata, dengan Kesejahteraan Masyarakat Desa sebagai sasaran jangka menengahnya.

Untuk mewujudkan misi Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan *stakeholder* pariwisata baik di tingkat regional, nasional, dan internasional perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu Membangun hubungan kerjasama dengan *stakeholder* pariwisata, dengan Meningkatkan peran serta *stakeholder* pariwisata dalam menjual dan memanfaatkan potensi wisata sebagai sasaran jangka menengahnya.

Untuk mewujudkan misi Melakukan promosi pariwisata secara kontinyu baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu Melakukan promosi pariwisata,

dengan Meningkatkan kunjungan wisatawan sebagai sasaran jangka menengahnya.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kota Batu

Dasar hukum pembentukn Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah Peraturan Walikota Batu No. 45 Tahun 2013 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu mempunyai tugas-tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pariwisata dan kebudayaan;
2. Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SMP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Perencanaan dan pengendalian anggaran;
4. Pengendalian urusan administrasi Dinas;
5. Pembinaan pengembangan produk pariwisata;
6. Pembinaan promosi dan pemasaran pariwisata;

7. Pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
8. Pembinaan pengembangan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah, dan purbakala;
9. Penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan, serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama bidang pariwisata dan kebudayaan di antara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
11. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Sumber Daya Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan didukung oleh 78 orang personil yang terdiri dari 63 orang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan 15 lainnya adalah Tenaga Honorer Daerah.

Tabel 4.

Data Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Batu

Komponen	Keterangan	Jumlah	%
Jumlah Pegawai	L	49	62,82
	P	29	7,18
	Jumlah	78	100,00
Golongan/Ruang	IV/c	1	1,28
	IV/b	2	2,56
	IV/a	1	1,28
	III/d	5	6,41
	III/c	8	10,26
	III/b	12	15,38
	III/a	5	6,41
	II/d	8	10,26
	II/c	6	7,69
	II/b	13	16,67
	II/a	1	1,28
	I/c	1	1,28
	Honorer	15	19,23
Ijazah Terakhir	S2	13	16,67
	S1	26	33,33
	D4	5	6,41
	D3	4	5,13
	SMA	15	19,23

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2014

f. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut tersusun atas :

1. Kepala Dinas

- a) Mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan,

mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

b) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- 2) perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 3) perencanaan dan pengendalian anggaran;
- 4) pengendalian urusan administrasi Dinas;
- 5) pembinaan pengembangan produk pariwisata;
- 6) pembinaan promosi dan pemasaran pariwisata;
- 7) pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 8) pembinaan pengembangan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah, dan purbakala.
- 9) penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan, serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
- 10) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama bidang pariwisata dan kebudayaan di antara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;

11) penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; dan

12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a) Mempunyai tugas merumuskan rencana kerja Dinas, mengendalikan administrasi keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas.

b) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat memiliki fungsi :

1) perumusan rencana kerja Sekretariat;

2) pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

3) pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas;

4) pengendalian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

5) pembinaan dan pengembangan pegawai;

6) pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;

- 7) pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian dalam Sekretariat

a) Sub Bagian Program dan Pelaporan

- 1) Mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Program dan Pelaporan memiliki fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
 - b. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
 - c. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - g. pengelolaan data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Sub Bagian Keuangan
- 1) Mempunyai tugas mengelola anggaran dan administrasi keuangan Dinas.
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan memiliki fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
 - b. pelaksanaan verifikasi SPP;
 - c. penyiapan Surat Perintah Membayar;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. penyusunan administrasi dan teknis pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Mempunyai tugas mengelola ketatalaksanaan dan ketatausahaan, meliputi administrasi umum dan kepegawaian, urusan rumah tangga, barang milik daerah, perpustakaan, dan kearsipan.

2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi :

a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;

b. pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan;

c. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

d. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;

e. pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;

f. pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata

- a) Mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan pengembangan produk pariwisata.
- b) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Produk Pariwisata memiliki fungsi:
 - 1) perumusan rencana kerja Bidang;
 - 2) penyusunan pedoman teknis program kegiatan pengembangan produk pariwisata;
 - 3) pembinaan potensi usaha kepariwisataan;
 - 4) pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta rekreasi dan hiburan umum;
 - 5) pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan objek serta daya tarik wisata;
 - 6) pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum;
 - 7) pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata;
 - 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang;
 - 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian dalam Bidang Pengembangan Produk Pariwisata

a) **Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata**

- 1) Mempunyai tugas menyusun rencana, mengolah data, membina, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengembangan objek dan daya tarik pariwisata.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata memiliki fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan dan pemetaan informasi potensi daya tarik wisata, atraksi wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pengembangan objek dan daya tarik wisata, atraksi wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
 - d. pelaksanaan fasilitasi teknis kerja sama perusahaan objek dan daya tarik wisata, serta rekreasi dan hiburan umum;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis penataan dan pelestarian lingkungan bagi usaha objek dan daya tarik wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata

- 1) Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, membina, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi usaha jasa dan sarana wisata.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata memiliki fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan dan pemetaan data informasi usaha akomodasi, usaha makanan dan minuman penunjang pariwisata, jasa angkutan wisata, sarana wisata, kawasan wisata, dan usaha jasa pariwisata;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) usaha jasa pariwisata;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis usaha akomodasi, usaha makanan dan minuman penunjang pariwisata, jasa angkutan wisata, sarana wisata, kawasan wisata, dan usaha jasa pariwisata;
 - e. penyusunan rekomendasi persyaratan administrasi dasar klasifikasi hotel dan restoran usaha makanan dan minuman penunjang pariwisata, jasa angkutan wisata, sarana wisata, kawasan wisata, dan usaha jasa pariwisata;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerja sama kemitraan usaha akomodasi, usaha makanan dan minuman, jasa

angkutan wisata, sarana wisata, kawasan wisata, dan usaha jasa pariwisata;

- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata

- a) Mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata.
- b) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata memiliki fungsi :
 - 1) perumusan rencana kerja Bidang;
 - 2) penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan promosi, pemasaran, dan kerja sama kebudayaan dan pariwisata;
 - 3) perumusan Rencana Induk Pengembangan pariwisata (RIPP) skala daerah;
 - 4) pembinaan pengembangan sistem informasi pariwisata;
 - 5) pengkajian kerja sama internasional pengembangan destinasi wisata;
 - 6) pembinaan pameran/event kebudayaan dan pariwisata;

- 7) pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata;
- 8) perumusan branding (merek) dan tagline (slogan) pariwisata;
- 9) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang;
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian dalam Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata

a) Seksi Informasi dan Analisa Pasar

- 1) Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, menganalisis, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan informasi pariwisata dan analisa pasar pariwisata.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Informasi dan Analisa Pasar memiliki fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan dan pemetaan data informasi pariwisata dan analisa pasar pariwisata;
 - c. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP);
 - d. pengelolaan teknis manajemen sistem informasi pariwisata;
 - e. pengelolaan pusat pelayanan informasi pariwisata;
 - f. penyusunan analisis pasar kebudayaan dan pariwisata;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan potensi pasar pariwisata baik dalam maupun luar negeri;

- h. pengelolaan survey potensi budaya dan pariwisata;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Promosi dan Kerja Sama

- 1) Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, menganalisis, membina, monitoring dan evaluasi program kegiatan promosi kepariwisataan dan Kerja Sama pariwisata dan kebudayaan.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Promosi dan Kerja Sama memiliki fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan dan pemetaan data informasi pariwisata lokal dan unggulan serta kerja sama pemasaran wisata;
 - c. penyusunan pedoman teknis pengembangan promosi dan destinasi wisata;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional pengembangan destinasi wisata;
 - e. pengelolaan teknis kegiatan pameran/event budaya dan pariwisata;
 - f. pengelolaan teknis administrasi penetapan branding (merek) pariwisata dan tagline (slogan) pariwisata;

- g. pelaksanaan fasilitasi program pertukaran budaya dan pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

- a) Mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
- b) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata memiliki fungsi :
 - 1) perumusan rencana kerja Bidang;
 - 2) penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - 3) pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - 4) penyusunan standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata;
 - 5) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - 6) penyusunan teknis kerja sama dengan instansi terkait di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang;

- 8) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian dalam Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

a) Seksi Bimbingan dan Pelatihan

- 1) Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, menganalisis, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Bimbingan dan Pelatihan memiliki fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan dan pemetaan data informasi potensi dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis sanggar, organisasi, dan pelaku seni dan budaya;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis kompetensi profesi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Peran Serta Masyarakat

- 1) Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, menganalisis, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pengembangan pariwisata.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Peran Serta Masyarakat memiliki fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan dan pemetaan data informasi potensi peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan program masyarakat sadar wisata;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pengembangan sumber daya masyarakat pariwisata;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kebudayaan

- a) Mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan kegiatan bidang kebudayaan.
- b) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kebudayaan memiliki fungsi :

- 1) perumusan rencana kerja Bidang;
- 2) penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan kebudayaan, keurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;
- 3) penyusunan teknis kerja sama regional, nasional dan internasional di bidang kebudayaan, keurbakalaan, nilai tradisional, kesenian, perfilman dan sejarah;
- 4) pembinaan inventarisasi dan dokumentasi di bidang kebudayaan, keurbakalaan, nilai tradisional, kesenian, perfilman dan sejarah;
- 5) pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
- 6) pengendalian perawatan dan pengamanan aset/benda kesenian, Benda Cagar Budaya (BCB), dan situs warisan budaya;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang;
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian dari Bidang Kebudayaan

a) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

- 1) Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pembinaan dan perlindungan nilai-nilai sejarah dan keurbakalaan.

2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kebudayaan memiliki fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi; \
- b. pendataan dan pemetaan data informasi peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan budaya daerah;
- c. penyusunan pedoman penelitian arkeologi dan pengelolaan museum;
- d. pengelolaan data inventarisasi dan dokumentasi sumber dan publikasi sejarah dan kepurbakalaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
- f. pengelolaan sistem informasi geografi sejarah;
- g. pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) situs warisan budaya daerah dan hasil pengangkatan peninggalan bawah air;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pemahaman nilai kepurbakalaan bagi masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Nilai-nilai Tradisional

- 1) Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan

perlindungan nilai-nilai tradisional daerah.

2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Nilai-Nilai Tradisional memiliki fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
- b. pendataan dan pemetaan data informasi potensi pengembangan nilai-nilai tradisional daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis terhadap lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Kesenian dan Perfilman

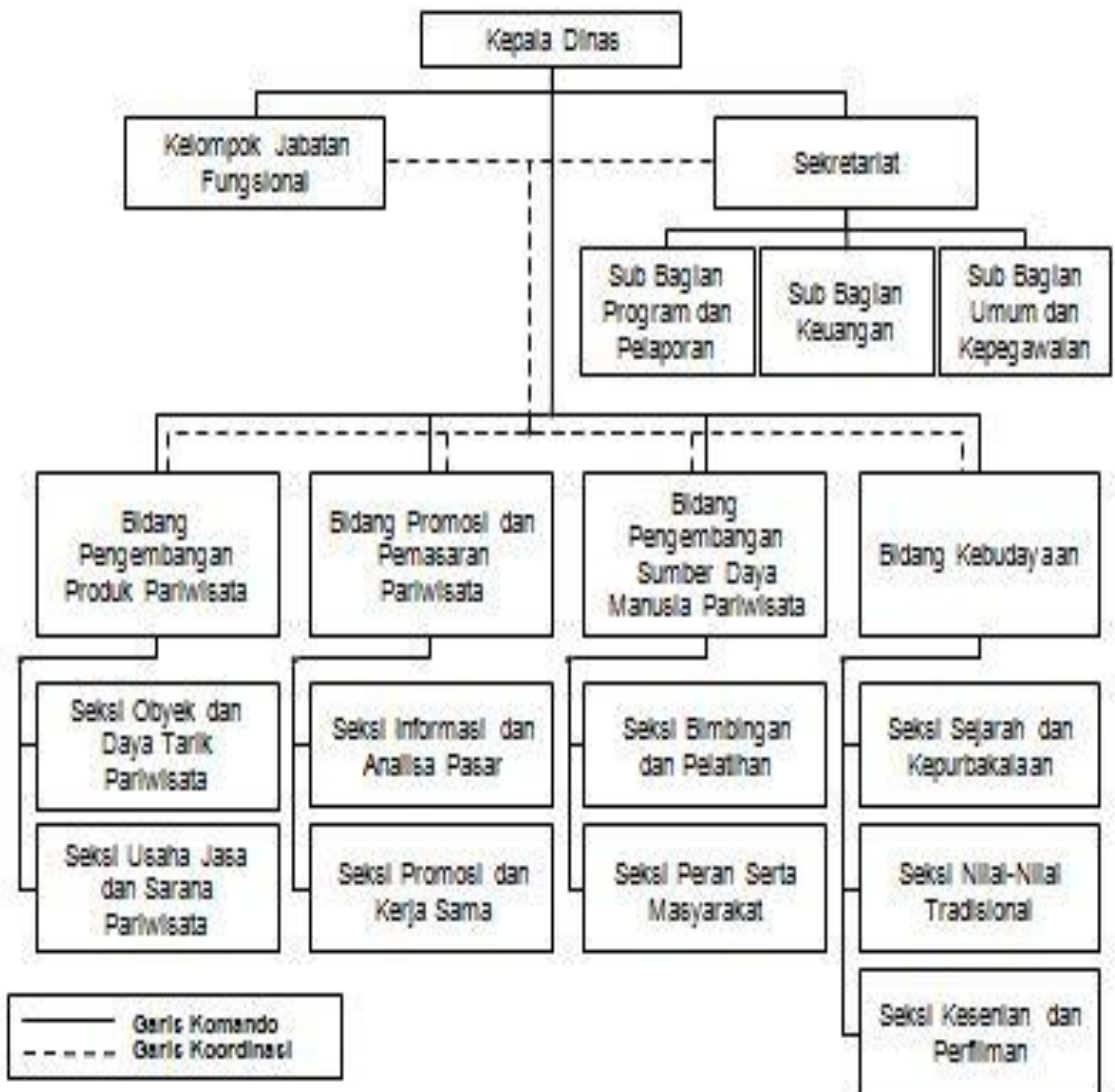
1) Mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pembinaan dan perlindungan nilai-nilai kesenian dan perfilman di daerah.

2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesenian dan Perfilman memiliki fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;

- b. pendataan dan pemetaan data informasi potensi pengembangan kesenian dan perfilman;
- c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan festival kesenian, pameran dan lomba di bidang kesenian;
- d. pengelolaan administrasi ijin usaha pembuatan film, pagedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan;
- e. pengawasan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video;
- f. pengelolaan administrasi ijin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian dan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri;
- g. pengelolaan aset/benda kesenian;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
- i. pelaksanaan fasilitasi perumusan kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kesenian;
- j. pengelolaan teknis administrasi penetapan Nomor Induk Kesenian bagi seniman dan organisasi kesenian;

- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. (Sumber : Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu Tahun 2012-2017)

B. Penyajian Data Fokus

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata

Mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjelaskan pengertian dari kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata suatu daerah, pemerintah memiliki peran penting baik untuk membuat suatu kebijakan, memonitoring hingga mengevaluasi pengembangan pariwisata tersebut. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang menjelaskan bahwa tujuan kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran;

melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antardaerah dan antarbangsa.

Dalam upaya mengembangkan industri pariwisata Kota Batu, pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam merealisasikan tujuan yang sudah disusun dalam Peraturan Daerah Kota Batu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah daerah bertugas sebagai fasilitator yang mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu, menjalin kerjasama antar daerah yang berada di sekitar Kota Batu seperti Malang Raya, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana, prasarana serta fasilitas umum yang berada di Kota Batu terutama untuk menunjang pengembangan industri pariwisata, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dari lembaga-lembaga masyarakat yang menaungi tentang pengembangan industri pariwisata, melakukan koordinasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan dengan pengembangan industry pariwisata seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

a. Macam-macam Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu

Ada beberapa macam peran pemerintah khususnya dalam

pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di kota Batu. Beberapa macam peran pemerintah tersebut, yaitu selaku inovator yang memberikan temuan baru, sitem baru, metode baru serta cara berfikir yang baru sesuai dengan perkembangan pembangunan di daerahnya. Kemudian peran pemerintah sebagai pelaku koordinasi kepada setiap jaringan kerja baik di dalam pemerintah daerah itu sendiri maupun terhadap daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Pemerintah daerah juga memiliki peran sebagai pelopor dan pelaksana sendiri. Yang dimaksud sebagai pelopor adalah aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat daerahnya tersebut sedangkan yang dimaksud sebagai pelaksana sendiri yaitu meskipun tugas pembangunan menjadi tanggung jawab nasional tetapi pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di daerahnya tersebut. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh “R” selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu yang menjelaskan bahwa :

“Pemerintah daerah memiliki beberapa macam peran, yaitu sebagai pemberi ide-ide baru guna keberlanjutan pembangunan yang terjadi di setiap daerah. Keberlanjutan pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pembangunan di setiap daerah dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat disetiap daerah tersebut menjadi sejahtera dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.” *(Hasil wawancara dengan “R” selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu tanggal 10 Agustus 2015 pukul 08.30-10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu).*

b. Rencana Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu

Rencana pengembangan industri pariwisata di Kota Batu mengacu pada arah kebijakan yang tertera dalam dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Berdasarkan misi yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan internasional, dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batu untuk menjadikan Kota Batu sebagai Kota Kepariwisataan Internasional memiliki arah kebijakan yaitu pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata. Hal ini juga didukung dengan adanya visi dari penataan ruang wilayah Kota Batu adalah : Kota Batu sebagai Kota Wisata dan Agropolitan di Jawa Timur. Sedangkan salah satu misi dari penataan ruang wilayah Kota Batu adalah :

”Mendayagunakan secara optimal dan terkendali sumber-sumber daya daerah, baik sumber daya manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), maupun Sumber Daya Budaya (SDB) sebagai unsur-unsur internal untuk menopang upaya pengembangan Kota Batu kedepan”.

Pengembangan pariwisata juga tertera dalam visi Kota Batu yang memaparkan bahwa Kota Batu merupakan kota sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional. Selain itu industri pariwisata termasuk dalam industri kreatif dimana budaya lokal di Kota Batu juga termasuk di dalamnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 pasal 14 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030, Kota Batu ditetapkan berdasarkan fungsi wilayahnya terbagi atas 3 Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu:

Kecamatan Batu ditetapkan sebagai BWK I yaitu untuk pengembangan pusat pemerintahan kota, pengembangan kawasan kegiatan perdagangan dan jasa modern, kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa penunjang akomodasi wisata serta kawasan pendidikan menengah dengan pusat pelayanan berada di Desa Pesanggrahan. Kecamatan Junrejo sebagai BWK II yang dimanfaatkan untuk pengembangan permukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo. Sedangkan BWK III sebagai wilayah utama pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Bumiaji dengan pusat pelayanan di Desa Punten.

Melalui hasil wawancara dari peneliti dengan “R” selaku Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu yang menyebutkan beberapa desa yang menjadi *pilot project* dari pengembangan industri pariwisata di Kota Batu adalah Desa Bumiaji, Desa Punten tepatnya Dusun Kungkuk, Kelurahan Temas, dan Desa Sumber Gondo. Beberapa desa yang telah disebutkan tersebut dijadikan pemerintah sebagai lokasi pengembangan industri pariwisata yang berbasis budaya lokal dan agrowisata.



*Gambar 7. Kebun Apel Desa Punten
(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2015)*

c. Implementasi Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu

Dalam pengembangan industri pariwisata di Kota Batu, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Batu adalah menjadikan beberapa desa yang dapat dikembangkan sebagai sentra pariwisata dalam mengembangkan industri pariwisata yaitu Desa Bumiaji, Dusun Kungkuk, Desa Sumber Gondo. Masing-masing desa tentunya memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda dalam pengembangannya. Desa Bumiaji

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam pengembangan industri pariwisata yaitu membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang anggotanya merupakan masyarakat disetiap desa itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan “S” selaku Ketua dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Bumiaji, tugas yang dilakukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tersebut

mempromosikan desanya masing-masing dalam hal pariwisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari desanya tersebut, mengawasi berjalannya kegiatan pariwisata yang diadakan di desa dan menaungi kegiatan-kegiatan pariwisata yang berlangsung di desa. Potensi industri pariwisata

Tabel 5.
Jenis Industri Pariwisata di Kota Batu

No.	Lokasi Agrowisata	Komoditas Unggulan
1.	Desa Bumiaji	Buah-buahan (apel, jeruk dan jambu) dan makam pesarehan Mbah Wastu.
2.	Desa Punten (Dusun Kungkuk)	Kampung Wisata Kungkuk (Home Stay, Petik Buah, Ronda Malam, Trail Adventure, Wisata Kesenian Kungkuk, Wisata Berkuda, Sekolah Alam, Camping and Out Bound Area)
3.	Desa Sumbergondo	Buah-buahan (apel) dan tanaman organik seperti sayur mayur.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu 2015 dan olahan penulis

d. Monitoring Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu

Dalam suatu daerah terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saling berhubungan. Beberapa Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu antara lain : (1) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; (2) Membantu Walikota dalam merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan; (3) Pengkoordinasian penyusunan

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; dan (4) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu untuk mencapai upaya pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh “R” selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu yang menjelaskan bahwa :

“Tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu salah satunya adalah membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan guna menjadikan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kemudian setelah merumuskan kebijakan lalu membagi tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai agar dapat dilaksanakan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyerahkan pelaksanaan pengembangan industri pariwisata tersebut kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan”. *(Hasil wawancara dengan “R” selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu tanggal 10 Agustus 2015 pukul 08.30-10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu).*

Jadi dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu melimpahkan pelaksanaan secara teknis

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Dalam pelaksanaan pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Malang juga melibatkan kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat yang turut berperan aktif mendukung program pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata. Selama pelaksanaan pengembangan industri pariwisata tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu membuat laporan yang akan diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu. Setelah itu laporan tersebut dijadikan acuan untuk perbaikan dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mengembangkan daerah melalui potensi daerah yang dimiliki, tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan suatu

daerah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi merupakan faktor pendorong dan faktor penghambat yang dianalisis melalui kondisi daerah dan lingkungan yang dapat mempengaruhi pengembangan suatu daerah.

a. Faktor Pendukung

1) Kondisi Geografis dan Sumber Daya

Sebagai daerah yang sebagian besar memiliki topografi wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang indah sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengoptimalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata yang mengunggulkan potensi pertanian seperti wisata petik apel, wisata petik jeruk serta wisata budaya. Kondisi topografi perbukitan dan pegunungan tersebut menjadikan Kota Batu sebagai kota yang memiliki suhu udara yang dingin sehingga menunjang kondisi pariwisata yang dikembangkan menjadi lebih menarik bagi wisatawan.

Sebagai kota yang terkenal dengan wisatanya, Kota Batu memiliki beberapa komoditas unggulan yang masing-masing kawasan tentunya menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan sektor industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata. Hal ini terbukti seperti yang dijelaskan oleh “Y” selaku Staff Sub Bidang Program dan Pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang menyatakan bahwa :

“Pada mulanya pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata ada di 4 Desa yaitu Desa Bumiaji, Desa Punten, Desa Sumbergondo, dan Desa Tulungrejo. Masing-masing desa tentunya memiliki potensi yang berbeda-beda dalam hal pengembangan pariwisata. Desa Sumbergondo dan Desa Tulungrejo merupakan desa yang memanfaatkan lahannya untuk dijadikan wisata petik apel sedangkan Desa Punten dan Desa Bumiaji merupakan desa yang memanfaatkan lahannya untuk dijadikan desa wisata petik jeruk dan wisata budaya”. *(Hasil wawancara dengan “Y” selaku Staff Sub Bidang Program dan Pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu tanggal 28 Agustus 2015 pukul 08.00-10.00 wib di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).*

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kota Batu yang sebagian besar memiliki topografi wilayah perbukitan membuat pemerintah memanfaatkan berbagai macam potensi yang dapat dikembangkan. Keindahan panorama alam Batu dan kesejukan udara yang senantiasa terjaga menjadikan Kota Batu sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Hal ini menjadikan Kota Batu dikenal sebagai pemasok tanaman sayur mayor dan buah-buahan seperti apel dan jeruk yang berkualitas di Jawa Timur bahkan propinsi lainnya di Indonesia. Potensi sektor unggulan pertanian di Kota Batu meliputi tanaman hortikultura dengan komoditas tanaman apel, jeruk, dan alpukat. Hortikultura apel di Kota Batu memusat di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji dan sebagian terdapat di Tlengkung Kecamatan Junrejo. Sedangkan untuk hortikultura jeruk memusat di Tlengkung dan Oro-oro Ombo dengan terdapatnya pusat penelitian jeruk Balejestro dan lahan pertanian hortikultura jeruk di Desa Bumiaji.

2) Otonomi Daerah

Adanya desentralisasi yang menghasilkan otonomi daerah yang

berarti dimana daerah dengan mandiri dapat mengurus serta mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dapat menjadi faktor pendukung pemerintah daerah kota Batu untuk mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki kota Batu khususnya dalam hal mengelola kawasan wisata dan mengelola hasil pendapatan yang diterima dari sektor pariwisata baik pariwisata berbasis budaya lokal dan pariwisata berbasis agrowisata. Kemudian dapat menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Batu dengan cara promosi melalui lisan maupun tulisan di media masa dan juga sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat.

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh “Y” selaku Staff Sub Bidang Program dan Pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu:

“Beberapa pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah Kota Batu yaitu adanya pembinaan terhadap masyarakat agar dapat memanfaatkan wisatawan yang berkunjung di Kota Batu dengan mempromosikan kebudayaan khas Kota Batu, mengembangkan keterampilan masyarakat Kota Batu agar dapat diperjual belikan sebagai buah tangan

husus Kota Batu” (Hasil wawancara dengan “Y” selaku Staff Sub Program dan Pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu tanggal 28 Agustus 2015 pukul 08.00-10.00 wib di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).



Gambar 8. Peneliti melakukan wawancara dengan Staff Bidang Program dan Pelaporan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu. (Sumber : Dokumentasi Peneliti 2015)

3) Infrastruktur

Salah satu faktor penting yang berperan dalam pengembangan pariwisata adalah infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan raya, sarana dan prasarana serta fasilitas umum memiliki pengaruh untuk mengetahui suatu daerah dapat dikatakan berhasil atau tidak dalam pengembangan pariwisata. Adanya infrastruktur yang memadai tersebut membuat masyarakat setempat maupun pihak swasta yang memiliki kawasan wisata dapat dengan optimal mengembangkan usahanya seperti adanya penerangan jalan, akses jalan umum yang memadai, listrik dan air bersih terutama di kawasan-kawasan desa wisata untuk mendukung pariwisata yang berada di desa-desa wisata Kota Batu. Kemudian sarana dan prasarana transportasi yang

dibutuhkan seperti angkutan umum yang dapat mempermudah masyarakat setempat serta wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata Kota Batu terutama angkutan umum yang melewati desa-desa wisata di Kota Batu apabila wisatawan ingin berkunjung ke desa-desa wisata tersebut. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh “R” selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu yaitu :

“Adanya rencana perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah daerah dalam upayanya untuk pengembangan pariwisata di Kota Batu. Perbaikan jalan tersebut diutamakan pada desa-desa yang memiliki potensi wisata yang menjadi sasaran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata”. *(Hasil wawancara dengan “R” selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu tanggal 10 Agustus 2015 pukul 08.30-10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu).*

Kemudian dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pelaku industri wisata di Kota Batu yaitu “FR” selaku Bagian Manager dan Marketing Kusuma Agrowisata Convention Center mengenai fasilitas sarana dan prasarana yang di berikan pemerintah kepada Kusuma Agrowisata Convention Center :

“Pemerintah dan pemilik Kusuma Agrowisata Convention Center memberikan fasilitas sarana dan prasarana berupa infrastruktur jalan raya, pembangunan fasilitas umum seperti kamar mandi, mushola serta tempat peristirahatan yang mendukung untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan yang berkunjung”. *(Hasil wawancara dengan “FR” selaku Bagian Manager dan Marketing Kusuma Agrowisata Convention Center tanggal 25 Agustus 2015 pukul 13.00-15.00 wib di Kusuma Agrowisata Convention Center).*



Gambar 9. Kedai Apel yang ada di Kusuma Agrowisata 2015

Dalam upaya pengembangan pariwisata di Kota Batu, pemerintah daerah tidak hanya memberikan sarana dan prasana seperti infrastruktur jalan tetapi fasilitas umum yang berupa bantuan bagi masyarakat lokal di desa wisata juga dilakukan pemerintah. Bantuan bagi masyarakat tersebut berupa alat produksi seperti mesin olahan untuk mengolah hasil pertanian seperti jeruk dan apel yang dapat dijadikan sari buah, keripik dan jenang apel. Kemudian adanya fasilitas gedung yang digunakan untuk pengembangan wisata budaya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh “ES” selaku Kepala Desa Bumiaji yang menjelaskan bahwa :

“Dalam upaya pengembangan pariwisata di Kota Batu khususnya di Desa Bumiaji, pemerintah daerah memberikan bantuan berupa alat produksi seperti mesin olahan untuk mengolah hasil pertanian yang berupa buah-buahan terutama apel. Pemerintah juga memberikan bahan-bahan teknis seperti vitamin tanaman dan pupuk agar lahan yang ditanami menghasilkan buah-buahan yang berkualitas baik. Selain bantuan mesin produksi dan bahan-bahan teknis, pemerintah memberikan fasilitas seperti sanitasi air untuk lahan warga, akses jalan menuju desa wisata, serta gedung yang dinamakan Gedung Graha Wisata yang digunakan untuk pertemuan

pengelola wisata di Desa Bumiaji”. (Hasil wawancara dengan “ES” selaku Kepala Desa Bumiaji tanggal 2 September 2015 pukul 09.00-11.30 wib di Desa Bumiaji).

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketersediaan infrastruktur yang berupa sarana, prasarana serta fasilitas-fasilitas umum dapat meningkatkan upaya pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata di Kota Batu.

4) Budaya Lokal

Yang disebut dengan budaya lokal adalah budaya yang ada di suatu daerah dan tidak akan bisa di temukan di daerah lain. Budaya lokal merupakan budaya yang dihasilkan dari masyarakat lokal sendiri dan berasal dari daerah tersebut sehingga tidak akan ada di daerah lain. Kota Batu merupakan Kota yang memiliki potensi pariwisata yang baik, tidak hanya potensi sumber daya alam tetapi budaya lokal yang berasal dari Kota Batu juga menarik untuk di kembangkan. Beberapa contoh budaya lokal yang dimiliki Kota Batu adalah Tari Sapu, Tari Sanduk, Bersih Desa, dan Bantengan. Saat ini banyak masyarakat pendatang yang tinggal di Kota Batu untuk meningkatkan pendapatannya masing-masing. Seiring dengan banyaknya masyarakat yang datang ke Kota Batu tersebut maka budaya lokal yang dimiliki Kota Batu sudah mulai hilang dan munculnya pengaruh budaya daerah lain yang masuk di lingkungan masyarakat lokal Kota Batu. Seperti yang dijelaskan oleh “R” selaku Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu yaitu :

“Saat ini Kota Batu tidak hanya ditinggali oleh masyarakat asli Kota Batu tetapi banyaknya pendatang yang berasal dari daerah lain untuk mencari penghasilan tetap. Hal ini dikarenakan Kota Batu merupakan Kota yang memiliki potensi yang baik khususnya di sektor pariwisata. Banyaknya pendatang yang berasal dari daerah lain juga mempengaruhi budaya lokal yang ada di Kota Batu. Sebagai contoh yaitu Tari Sanduk merupakan budaya yang dimiliki oleh Kota Madura tetapi karena banyaknya masyarakat yang berasal dari Kota Madura sehingga mencampurkan budayanya dengan budaya yang ada di Kota Batu. Oleh karena itu budaya lokal yang ada di Kota Batu tidak hanya berupa tari-tarian dan adat istiadat masyarakat tetapi kebiasaan para petani jeruk atau apel yang memiliki cara tersendiri untuk memetik buah yang akan di panen tersebut dan hal seperti itu dapat dikatakan budaya lokal Kota Batu”. *(Hasil wawancara dengan “R” selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu tanggal 10 Agustus 2015 pukul 08.30-10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu).*

Tabel 6.
Jenis Wisata Budaya di Kota Batu

No.	Desa Wisata	Jenis Wisata Budaya
1.	Desa Junrejo	Terbang Jidor, Campursari, Tari Kendang, Pencak Silat, Ludruk
2.	Desa Beji	Terbang Jidor, Drum Band, Pencak Silat, Tari Naga, Kuda Lumping,
3.	Desa Pendem	Pencak Silat, Terbang Jidor, Bentengan, Kuda Lumping
4.	Desa Mojorejo	Terbang Jidor, Kuda Lumping, Karawitan, Wayang Orang, Bantengan, Campursari
5.	Desa Tlekung	Goa Jepang Dusun Krajan, Kolam Peninggalan Belanda, Cerobong Asap Belanda
6.	Desa Bulukerto	Terbang Jidor, Campursari, Tari Kendang, Pencak Silat, Orkes Melayu Religi, Reog, Tari Sanduk

7.	Desa Bumiaji	Wayang, Terbang Jidor, Kuda Lumping
8.	Desa Gunungsari	Terbang Jidor, Campursari, Tari Kendang, Pencak Silat, Bantengan, Wayang Kulit
9.	Desa Punten	Terbang Jidor, Campursari, Tari Kendang, Pencak Silat, Orkes Melayu Religi, Reog
10.	Desa Sumberbrantas	Goa Jepang Cangar, Punden Watu Tumpuk
11.	Desa Sumbergondo	Terbang Jidor, Karawitan, Kuda Lumping, Punden Mbah Mertani dan Joko Boendo
12.	Desa Tulungrejo	Campursari, Terbang Jidor, Tari Kendang, Pencak Silat, Orkes Melayu Religi, Reog, Karawitan, Punden Mbah Surip
13.	Desa Oro-oro Ombo	Sanggar Tari, Teater, Kuda Lumping, Reog, Pencak Silat, Ludruk, Punden Mbah Reken
14.	Desa Torongrejo	Budaya Patung Ganesha, Watu Lawang, Prasasti, Padepokan Gunung Ukir, Pencak Silat, Bantengan

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata Kota Batu dan Olahan Peneliti.

Dari beberapa jenis wisata budaya yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa budaya lokal merupakan budaya yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat lokal dan menjadi kegiatan yang berpengaruh bagi masyarakat lain untuk dilakukan secara rutin. Budaya lokal di Kota Batu tidak hanya berupa tari-tarian dan adat istiadat yang dilakukan masyarakat lokal tetapi termasuk kebiasaan yang dilakukan masyarakat seperti petani buah-buahan yang memiliki cara tersendiri dalam memetik

buahnya agar tetap memiliki kualitas yang baik. Budaya lokal yang diunggulkan dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal di Kota Batu merupakan jenis pariwisata Tarian yang berasal dari Batu yaitu Tari Kendang, kemudian peninggalan-peninggalan jaman terdahulu seperti Goa dan Patung, serta kebiasaan masyarakat yang memiliki cara untuk memanen buah.

5) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah Kota Batu tidak hanya kepada pihak swasta dan pihak pemerintah itu sendiri melainkan adanya kerjasama kepada masyarakat lokal. Kota Batu merupakan kota yang sedang mengembangkan berbagai macam sektor khususnya pada sektor pariwisata. Hal ini membuat masyarakat secara inisiatif membentuk kelompok masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membantu mengembangkan pariwisata yang sudah tersedia di wilayahnya. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah kelompok masyarakat yang terbentuk untuk mengembangkan industri pariwisata khususnya di desa-desa yang memiliki potensi pariwisata. Dengan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata ini juga membantu masyarakat satu sama lain dengan berkerjasama guna mencapai keberhasilan dalam meningkatkan produk pariwisata dari desa wisata yang bersangkutan serta mengembangkan kebudayaan yang ada di desa wisata tersebut.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ini dibawah oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bertugas sebagai satuan kerja yang mengawasi berjalannya proses serta kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan industry pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh “S” selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Bumiaji yaitu :

“Kelompok Sadar Wisata ini merupakan kelompok yang terdiri dari masyarakat-masyarakat yang sadar akan perannya bahwa masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata dan mendukung salah satu upaya pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal serta mengoptimalkan kekayaan-kekayaan baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dimiliki di setiap wilayah. Tentunya di setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda untuk di kembangkan”. *(Hasil wawancara dengan “S” selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Bumiaji tanggal 3 September 2015 pukul 08.30-11.30 wib di Desa Bumiaji).*

b. Faktor Penghambat

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi setiap daerah termasuk Kota Batu. Kemampuan yang dimiliki masyarakat lokal di Kota Batu dalam pengembangan pariwisata masih belum dimaksimalkan. Sebagai contoh yang ada di Kota Batu yaitu masih kurangnya promosi desa wisata yang berbasis budaya lokal. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal sendiri kurang tertarik untuk berperan dalam pengembangan budaya di desa. Pada dasarnya pemerintah daerah sudah memberikan

penyuluhan kepada masyarakat tentang budaya-budaya yang dapat dikembangkan seperti Tari Sapu, Tari Sembrama, Bentengan dan Sedekah Bumi tetapi partisipasi dari masyarakat masih kurang berperan. Untuk sedekah bumi mungkin masih sering dilakukan oleh masyarakat karena sedekah bumi merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang diberikan. Seperti yang diungkapkan oleh “S” selaku Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu yaitu :

“Upaya dari pemerintah sudah ada dalam pengembangan pariwisata dalam hal penyuluhan agar masyarakat ikut mengambil perannya terhadap pengembangan pariwisata dengan mengenalkan budaya tari-tarian yang menjadi ciri khas Kota Batu yang sebenarnya masyarakat mampu untuk melakukan kegiatan tersebut guna mengembangkan pariwisata berbasis budaya lokal, wisata budaya ini sudah diadakan di Dusun Kungkuk Desa Punten”. *(Hasil wawancara dengan “S” selaku Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu tanggal 10 Agustus 2015 pukul 08.30-10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu).*

Jadi dapat disimpulkan bahwa tari sembrama serta budaya lokal lain ini sebenarnya sudah berjalan tetapi belum dijadikan kegiatan yang bersifat rutin. Kampung Wisata Kungkuk menjadi salah satu contoh Desa yang dijadikan *Pilot Project* industri pariwisata berbasis budaya lokal di Kota Batu. Pameran wisata kesenian serta adat istiadat yang ada tersebut dilakukan hanya apabila untuk memperingati hari-hari besar yang ada di Kota Batu. Sebenarnya masyarakat memiliki kapasitas untuk melakukan

penyelenggaraan wisata kesenian di Kampung Wisata Kungkuk secara rutin tetapi karena masih kurangnya partisipasi masyarakat sekitar Dusun Kungkuk yang juga memiliki keperluan masing-masing sehingga wisata kesenian tersebut tidak dapat berjalan secara rutin.

2) **Kerjasama antar Daerah**

Dalam pembangunan suatu daerah, Pemerintah Daerah tidak dapat mengurus urusannya sendiri untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan termasuk dalam hal pengembangan industri pariwisata di Kota Batu. Kota Batu di kelilingi oleh wilayah Malang Raya yang memiliki potensi Sumber Daya Alam dengan karakteristik yang hampir sama. Oleh karena itu, apabila Kota Batu dan Malang Raya menjalin hubungan kerjasama dalam hal pengembangan pariwisata maka akan menjadikan Kota Batu dan Malang Raya lebih terkenal dalam bidang pariwisata yang tidak hanya di dalam negeri tetapi dapat terkenal hingga mancanegara. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh “R” selaku Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu yaitu :

“Suatu daerah dapat dikatakan berhasil dalam pengembangannya apabila daerah tersebut bisa menjalin kerjasama yang baik dengan pihak lain, baik pihak swasta maupun lembaga masyarakat. Kota Batu adalah kota yang memiliki wilayah strategis karena letak wilayahnya yang dikelilingi oleh Malang Raya. Kota Batu dan Malang Raya memiliki potensi pariwisata yang karakteristiknya hampir sama tetapi saat ini belum ada perjanjian kerjasama yang dilakukan

oleh Kota Batu dan Malang Raya. Apabila ada kerjasama antara Kota Batu dan Malang Raya, maka akan berhasil menjadikan pariwisata internasional". (*Hasil wawancara dengan "R" selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu tanggal 10 Agustus 2015 pukul 08.30-10.00 wib di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu*).

Jadi dapat disimpulkan bahwa belum adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dengan daerah sekitarnya seperti Malang Raya yang juga memiliki potensi pariwisata yang diminati oleh wisatawan.

C. Pembahasan

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata

Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Batu memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan terutama pada sektor pariwisata. Hal ini membuat pemerintah Kota Batu memanfaatkan potensi-potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya yang dimiliki untuk mendukung tercapainya rencana yang telah disusun pemerintah dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Sesuai dengan visi misi yang telah diusung oleh Walikota Batu Periode 2012-2017 sebagai acuan

pembuatan arah kebijakan yang disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang termasuk di dalamnya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Seluruh kebijakan yang telah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batu tersebut harus memiliki persetujuan dari Pemerintah Daerah termasuk dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.

Dalam upaya mengembangkan industri pariwisata Kota Batu, pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam merealisasikan tujuan yang sudah disusun dalam Peraturan Daerah Kota Batu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah daerah bertugas sebagai fasilitator yang mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu, menjalin kerjasama antar daerah yang berada di sekitar Kota Batu seperti Malang Raya, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana, prasarana serta fasilitas umum yang berada di Kota Batu terutama untuk menunjang pengembangan industri pariwisata, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dari lembaga-lembaga masyarakat yang menaungi tentang pengembangan industri pariwisata, melakukan koordinasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan dengan pengembangan industri pariwisata seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dapat diidentifikasi peran pemerintah dalam

pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata, yaitu :

a) Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Hasibuan (2006:85) yaitu “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) yang memiliki arah kebijakan mengenai pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai pelaksana teknis dari rencana arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. G.R.Terry dalam bukunya, *Principle of Management* yang dikutip Handayani (2002:55) koordinasi memiliki sifat-sifat yaitu :

- 1). Koordinasi adalah dinamis, bukan statis
- 2). Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
- 3). Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan

bagian yang lain. Adanya keselarasan yang terjadi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu mengenai rencana yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Kota Batu dengan implementasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

b) Integrasi

Integrasi yaitu suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Sugandha, 1991). Dalam pemerintah Kota Batu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu membentuk kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran untuk ikut serta berperan aktif dalam mengoptimalkan pengembangan industri pariwisata yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah Kota Batu dimana kelompok ini bertugas sebagai kelompok yang dapat mempromosikan desa wisatanya yang memiliki daya tarik tersendiri agar wisatawan banyak berkunjung di desa tersebut, mengawasi berjalannya proses pariwisata di desa tersebut, dan menjalin koordinasi yang baik dengan kelompok sadar wisata di desa lain guna mengoptimalkan potensi pariwisata yang dimiliki agar kegiatan yang diselenggarakan tidak terjadi tumpang tindih. Salah satu definisi lain dari integrasi yaitu membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-

unsur tertentu yang tercermin dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan merupakan hasil bentukan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam upayanya memfasilitasi pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.

c) Simplikasi

Pengertian Simplikasi adalah penerapan yang terorganisir dari pada akal sehat untuk menemukan cara-cara yang lebih baik dan lebih mudah dalam menjalankan suatu tugas. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan membuat program-program yang dibuat realistik, sederhana dan dapat dikerjakan. Misalnya tujuan umum dibuat disederhanakan menjadi tujuan khusus dengan sasaran lebih jelas atau tujuan dibuat lebih rasional (Sulistiyawati, dkk.1999). Kota Batu merupakan Kota yang memiliki potensi pariwisata yang baik untuk dikembangkan. Dengan adanya potensi tersebut, pemerintah Kota Batu berperan untuk membuat arah kebijakan yang sesuai dengan potensi di Kota Batu. Salah satu arah kebijakan yang di susun oleh pemerintah Kota Batu adalah pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata. Adanya arah kebijakan tersebut untuk mendukung misi pembangunan Kota Batu poin ke empat yaitu meningkatkan posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata menjadi Kota Kepariwisataan Internasional.

d) Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan- kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga diperoleh

keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Adanya kejelasan pembagian tugas merupakan petunjuk pelaksanaan sinkronisasi. Sinkronisasi akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih sehingga menurunkan duplikasi kegiatan, bahkan meniadakan kegiatan yang tidak perlu (Sulistyowati, dkk. 1999). Pemerintah Kota Batu berperan untuk mensinkronkan program-program yang telah disusun untuk mendukung pengembangan pembangunan yang ada di Kota Batu. Sinkronisasi menjadi penting dalam koordinasi karena terbukti dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan.

e) Mekanisme

Mekanisme merupakan proses berjalannya suatu kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menjalankan arah kebijakan yang berupa pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata, pemerintah kota Batu khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu memberikan bantuan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Sebagai contoh sarana, prasarana serta fasilitas yang diberikan pemerintah Kota Batu yaitu infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, toilet umum di beberapa tempat pariwisata, dan mushola yang dibangun di beberapa tempat wisata. Tidak hanya memberikan sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan tetapi fasilitas umum yang berupa bantuan bagi masyarakat lokal di desa wisata juga dilakukan pemerintah. Bantuan bagi masyarakat tersebut berupa alat produksi seperti mesin olahan untuk

mengolah hasil pertanian seperti jeruk dan apel yang dapat dijadikan sari buah, keripik dan jenang apel. Kemudian adanya fasilitas gedung yang digunakan untuk pengembangan wisata budaya di Desa Bumiaji yang dinamakan Gedung Graha Wisata.

a. Macam-macam Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbais Bidaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu

Levinson dalam Soekanto (1990, 213) menyatakan bahwa peranan mencakup tiga hal, antara lain :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Beberapa macam peran pemerintah yaitu selaku inovator yang memberikan temuan baru, sistem baru, metode baru serta cara berfikir yang baru sesuai dengan perkembangan pembangunan di daerahnya. Kemudian peran pemerintah sebagai pelaku koordinasi kepada setiap jaringan kerja baik di dalam pemerintah daerah Kota Batu itu sendiri maupun terhadap daerah-daerah yang berada di sekitarnya seperti Malang Raya serta daerah-daerah lain yang berada di sekitar Kota Batu. Pemerintah daerah Kota Batu juga memiliki peran sebagai pelopor dan pelaksana sendiri. Yang dimaksud sebagai pelopor adalah aparatur pemerintah Kota Batu harus menjadi panutan

bagi seluruh masyarakat Kota Batu untuk mencapai tujuan dari pembangunan Kota Batu, sedangkan yang dimaksud sebagai pelaksana sendiri yaitu meskipun tugas pembangunan menjadi tanggung jawab nasional tetapi pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di daerahnya tersebut, termasuk di Kota Batu. Dari berbagai macam peran yang dilakukan pemerintah Kota Batu tentunya memiliki tujuan yang mengembangkan pembangunan khususnya pada pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu.

b. Rencana Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu

Rencana pengembangan industri pariwisata di Kota Batu mengacu pada arah kebijakan yang tertera dalam dokumen perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Berdasarkan misi yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan internasional, dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batu untuk menjadikan Kota Batu sebagai Kota Kepariwisataan Internasional memiliki arah kebijakan yaitu pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.

c. Implementasi Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu

Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri tetapi merupakan industri yang terdiri dari beberapa perusahaan dan menghasilkan suatu jasa atau produk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Industri pariwisata merupakan industri yang bergerak di bidang pariwisata atau industri yang memusatkan perhatiannya kepada segala usahanya untuk mendukung pariwisata.

Menurut Spillane (1987:88) ada beberapa sifat khusus dari industri pariwisata adalah sebagai berikut :

Produk wisata memiliki ciri tak bisa di bawa pulang oleh wisatawan atau bahkan oleh orang yang mempromosikannya. Apabila seseorang tertarik dengan pesona wisata daerah tertentu, maka ia harus datang ke tempat tersebut dan mengalami sendiri atraksi yang diberikan, produksi dan konsumsi terjadi pada saat yang bersamaan. Tanpa ada pelanggan dari produk wisata itu, maka tidak akan ada proses produksi.

Saat ini banyak sekali industri pariwisata yang mulai di promosikan oleh pemerintah daerah Kota Batu seperti Jawa Timur Park 1, Jawa Timur Park 2, Eco Green Park, Batu Night Spectacular, Museum Angkut, dan berbagai macam industri pariwisata lain yang sedang gencar di promosikan oleh Pemerintah Kota Batu. Tetapi disamping itu, saat ini pemerintah Kota Batu juga mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu. Budaya lokal adalah suatu kebiasaan serta adat istiadat daerah tertentu yang lahir secara alamiah, berkembang, dan sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Arti lain dari budaya lokal adalah suatu budaya

yang berasal dari masing-masing daerahnya dan memiliki ciri khas tertentu di masing-masing daerah sebagai identitas daerah tersebut. Budaya lokal yang berada di Kota Batu tidak hanya berupa tari-tarian serta adat istiadat yang berasal asli dari Kota Batu tetapi merupakan suatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan yang rutin dilakukan dan dapat mempengaruhi orang lain. Budaya lokal yang di maksud merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam memanen hasil pertanian khususnya di Desa Sumbergondo. Sedangkan yang dimaksud dengan agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait agar menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Agrowisata juga dapat didefinisikan sebagai konsep yang mengandung suatu kegiatan dalam perjalanan atau wisata yang memiliki perpaduan dengan aspek-aspek di dalam sektor pertanian. Desa Punten yang tepatnya berada di Dusun Kungkuk awalnya merupakan hutan belantara yang dijadikan wisata petik buah apel kemudian karena harga buah apel di pasaran turun maka masyarakat sekitar berinisiatif untuk menjadikan Dusun Kungkuk menjadi Kampung Wisata yang terdiri dari berbagai macam jenis wisata baik berupa wisata berbasis budaya lokal dan agrowisata.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata berkenaan dengan permasalahan rancangan pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal

dan agrowisata yang di tangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu dan secara teknis dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dengan melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk kepanjangan tangan dari Dina Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam rangka mencapai target pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu dan telah mendapatkan perizinan dari Pemerintah Daerah Kota Batu.

d. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu

Dalam suatu daerah terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saling berhubungan. Beberapa Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu antara lain : (1) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; (2) Membantu Walikota dalam merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan; (3) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; dan (4) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu. Sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

tersebut maka dapat di simpulkan bahwa pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu untuk mencapai upaya pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata di Kota Batu

Dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu memiliki faktor pendukung dan penghambat yang dialami. Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat.

a. Faktor Pendukung

1) Kondisi Geografis dan Sumber Daya

Ciri-ciri dari administrasi pembangunan yang pertama adalah memiliki tujuan dalam administrasi pembangunan yang mengarah kepada upaya perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Pemerintah Kota Batu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menjadikan Kota Batu sebagai wilayah yang bermanfaat bagi masyarakat lokal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mengembangkan potensi yang ada tersebut menjadi kawasan wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Kota Batu merupakan kota

yang sebagian besar wilayahnya memiliki topografi wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang indah sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengoptimalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata yang mengunggulkan potensi pertanian seperti wisata petik apel, wisata petik jeruk serta wisata budaya. Hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata.

Menurut Yoeti (2008:273) pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Dalam mengembangkan pariwisata di Kota Batu, Pemerintah Daerah Kota Batu mengoptimalkan Sumber daya yang sudah dimiliki untuk mendukung pengembangan pariwisata baik pariwisata yang berbasis budaya lokal dan agrowisata. Upaya pemerintah tersebut dijadikan arah kebijakan untuk menjadikan Kota Batu sebagai pariwisata internasional. Pemerintah Batu menjadikan beberapa desa sebagai *pilot project*, beberapa desa tersebut adalah Desa Bumiaji, Desa Punten, Desa Sumbergondo dan Desa Tulungrejo. Masing-masing desa tersebut tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dalam pengembangannya.

2) Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa:

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kemudian daerah-daerah provinsi tersebut dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota.

Sesuai dengan pernyataan bahwa daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri dan kepentingan masyarakat setempat berlandaskan asas otonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan berlandaskan asas otonomi ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah Kota Batu.

3) Infrastruktur

Infrastruktur adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Arti lain dari infrastruktur adalah suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Adanya infrastruktur

yang memadai tersebut membuat masyarakat setempat maupun pihak swasta yang memiliki kawasan wisata dapat dengan optimal mengembangkan usahanya seperti adanya penerangan jalan, akses jalan umum yang memadai, listrik dan air bersih terutama di kawasan-kawasan desa wisata untuk mendukung pariwisata yang berada di desa-desa wisata Kota Batu. Desa Bumiaji merupakan salah satu desa yang diberikan sarana, prasarana, serta fasilitas publik oleh pemerintah dalam upayanya untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata. Sarana, prasarana, fasilitas public yang diberikan pemerintah Kota Batu berupa Gedung Graha Wisata yang di manfaatkan untuk pertemuan antara pengelola wisata di Desa Bumiaji dan Gedung Graha Wisata juga di manfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk mengadakan acara kesenian desa yang diselenggarakan pemerintah desa untuk memperingati hari-hari tertentu.

4) Budaya Lokal

Budaya lokal suatu kebiasaan serta adat istiadat daerah tertentu yang lahir secara alamiah, berkembang, dan sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya lokal juga dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan serta adat istiadat daerah tertentu yang lahir secara alamiah, berkembang, dan sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Kota Batu merupakan Kota yang memiliki potensi pariwisata yang baik, tidak hanya potensi sumber daya alam tetapi

budaya lokal yang berasal dari Kota Batu juga menarik untuk dikembangkan. Budaya lokal di Kota Batu yang dikembangkan saat ini tidak hanya berupa tari-tarian serta adat-istiadat yang menjadi ciri khas di Kota Batu tetapi suatu proses yang sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan oleh masyarakat dan menjadi pengaruh yang besar bagi masyarakat sekitarnya. Kebiasaan yang terjadi di Desa Bumiaji berasal dari masyarakatnya yang memiliki cara tersendiri untuk memanen buah yang berada di kebun mereka.

5) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Menurut Henry F. Fayol prinsip organisasi yang diikuti secara luas oleh para manajer antara lain :Pembagian kerja, Prinsip ini sama dengan “pembagian kerja” AdamSmith. Spesialisasi menambah hasil kerja dengan caramembuat para pekerja lebih efisien. Kemudian kesatuan komando, Setiap pegawai seharusnya menerima perintah hanya dari seorang atasan.Kota Batu merupakan kota yang sedang mengembangkan berbagai macam sektor khususnya pada sektor pariwisata. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu yang melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu kemudian melimpahkan wewenang tugas kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pengontrol dan pengawas berjalannya proses pengembangan pariwisata di suatu desa. Kelompok Sadar Wisata tersebut mengadakan koordinasi kepada Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan dan membuat laporan yang diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Laporan tersebut dijadikan bahan untuk evaluasi dalam membuat perencanaan selanjutnya.

b. Faktor Penghambat

1) Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang menjadi kelemahan dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya kepada partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan budaya lokal yang dimiliki. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 salah satu tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Segala kegiatan masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budidaya dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat agar berperan aktif dalam pengembangan industri pariwisata merupakan tugas pemerintah daerah untuk memfasilitasinya.

Saat ini pada kenyataannya di Kota Batu, Pemerintah sudah menjalankan perannya sebagai pengkoordinasian serta penyedia

fasilitas bagi masyarakat dalam upaya pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata. Peran serta masyarakat juga dibutuhkan dalam pengembangan industri pariwisata. Keterlibatan masyarakat di Kota Batu sangat diharapkan untuk dapat memberikan masukan terhadap rencana pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata. Kemampuan yang dimiliki masyarakat lokal di Kota Batu dalam pengembangan pariwisata sebenarnya sudah ada tetapi masih belum dimaksimalkan. Sebagai contoh di Dusun Kungkuk yang dijadikan Kampung Wisata Kungkuk tersebut terdiri dari beberapa industri pariwisata yaitu Homestay, Petik Buah, Ronda Malam, Trail Adventure, Wisata Kesenian Kungkuk, Wisata Berkuda, Sekolah Alam, dan *Camping and Outbound Area*. Wisata Kesenian Kungkuk di selenggarakan hanya apabila ada perayaan hari besar dan apabila ada wisatawan atau tamu yang berkunjung ke Kampung Wisata Kungkuk sebagai ucapan selamat datang yang diberikan dari Kampung Wisata Kungkuk. Wisata Kesenian Kungkuk ini belum di selenggarakan secara rutin. Apabila Wisata Kesenian Kungkuk ini di selenggarakan secara rutin, maka ada kemungkinan bahwa wisatawan yang berkunjung di desa wisata yang berbasis budaya lokal ini banyak yang berkunjung karena tertarik dengan budayalokal di Kota Batu yang tidak ada di Daerah lain.

2) Kerjasama antar Daerah

Dalam pembangunan suatu daerah, Pemerintah Daerah tidak dapat mengurusinya sendiri untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan termasuk dalam hal pengembangan industri pariwisata di Kota Batu. Kota Batu di kelilingi oleh wilayah Malang Raya yang memiliki potensi Sumber Daya Alam dengan karakteristik yang hampir sama. Adanya sinkronisasi sangat diperlukan dalam melakukan kerjasama antar daerah seperti Kota Batu dan Malang Raya. Seperti yang dijelaskan oleh Sulistyowati, dkk.(1999), sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan- kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Adanya kejelasan pembagian tugas merupakan petunjuk pelaksanaan sinkronisasi. Sinkronisasi akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih sehingga menurunkan duplikasi kegiatan, bahkan meniadakan kegiatan yang tidak perlu. Dengan adanya karakteristik potensi yang sama antara Kota Batu dan Malang Raya maka selain sinkronisasi untuk menjalin kerja sama juga harus ada koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut G. R Terry dalam Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Batu saat ini masih belum menjalin kerja sama dengan Malang Raya. Apabila ingin menjadikan Kota Batu sebagai kota pariwisata di tingkat internasional maka pemerintah daerah Kota Batu harus menjalin kerjasama dengan daerah sekitar seperti Malang Raya. Kerjasama tersebut bisa berupa promosi tempat-tempat wisata yang Kota Batu dan Malang Raya miliki secara luas. Kota Batu yang memiliki udara sejuk kawasan perbukitan, wisata budaya, agrowisata dan wisata pegunungan dapat di dukung oleh Malang Raya yang lebih mengunggulkan keindahan wisata air seperti pantai-pantai yang terletak di daerah Malang Selatan serta gunung-gunung yang mengelilingi daerah Malang Raya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran pemerintah Kota Batu dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata dalam hal koordinasi masih kurang karena tidak adanya koordinasi secara rutin antara instansi pemerintah yang terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di Kota Batu sehingga arah kebijakan yang telah di susun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu ini tidak dapat terlaksana secara maksimal. Selain itu pemerintah kurang melakukan evaluasi terhadap program-program pengembangan terutama pada pengembangan industri pariwisata sehingga tidak ada standar yang diukur dan dapat dibenahi terhadap pelaksanaan pengembangan di tahun selanjutnya.
2. Dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata ada beberapa faktor yang berpengaruh, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Beberapa faktor pendukung dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata adalah Kondisi Geografis dan Sumber Daya yang dimiliki Kota Batu, Otonomi Daerah, Infrastruktur yang tersedia di Kota Batu, Budaya Lokal yang dimiliki Kota Batu, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang

terbentuk di dalam masyarakat untuk mencapai upaya pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata di Kota Batu. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama antar Daerah. Sehingga dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata ini maka diperlukan adanya program alternatif lain dari pemerintah daerah untuk meminimalisir faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pengembangan industri pariwisata melalui penguatan faktor-faktor pendorong.

B. Saran

1. Dalam pengembangan industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata harus ada koordinasi secara rutin antar *stakeholder* berupa pertemuan resmi dalam ruangan maupun di lapangan guna meninjau pelaksanaan program pengembangan, memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan melalui pengelolaan desa wisata oleh masyarakat sendiri, penyediaan infrastruktur yang memadai, memfasilitasi adanya lembaga masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mendistribusikan hasil agrowisata.
2. Pemerintah melakukan promosi dan kerjasama dalam lingkup daerah ataupun luar daerah, pengembangan agrowisata dilakukan secara menyeluruh agar dampak yang di dapatkan bisa dirasakan di semua desa wisata di kawasan pemerintah Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- . 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bratakusumah, D. S, dkk. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Gintoro. 2009. *Kesenian Indonesia Pada Era Globalisasi*. Klaten : Cempaka Putih.
- Handayani, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi*. Jakarta : STIA LAN PRESS
- Hasibuan. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994. *Pengertian pengembangan hal*. 473.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Kristiadi, J.B, 2008, *Strategi Pembangunan Administrasi Dalam Memperkuat Pembangunan Nasional*, *Majalah Manajemen Pembangunan*, Nomor 23/VI/1998.

Liliweri, Alo. 2011. *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Moleong, L.J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.

Muluk, M.R Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Surabaya : ITS Press.

Pendit, Nyoman S. 1999. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Riyadi, dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Komunikasi Massa*. Bandung: Bina Citra.

Sugandha, Daan. 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Cetakan Kedua

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

-----, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyawati, Dwi Yulita. 1999. *Kajian Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan Berdasarkan Pengamatan Perilaku Belanja di Kota Bandung*. Tugas Akhir (tidak diterbitkan). ITB Bandung.

Spillane, James J. 1987. *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.

-----, 1989. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Kanisius.

Syafiie, Inu Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT. Pertija.

Tarigan, Robinson. 1986. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

-----, (2002) *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Tim BAPPEDA Kota Batu. 2010. *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Batu Tahun 2010-2020*. Batu: BAPPEDA Kota Batu.

Tjokroamidjojo, Bintoro.1989.*Perencanaan Pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta.

-----,1994.*Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Wojowasito, S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Shinto Darma.

Yoeti, Oka A. 1985. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Pratama.

-----, 1996. Edisi revisi: *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Angkasa,Bandung.

-----, 1997. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung : Angkasa.

-----, 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Pratama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

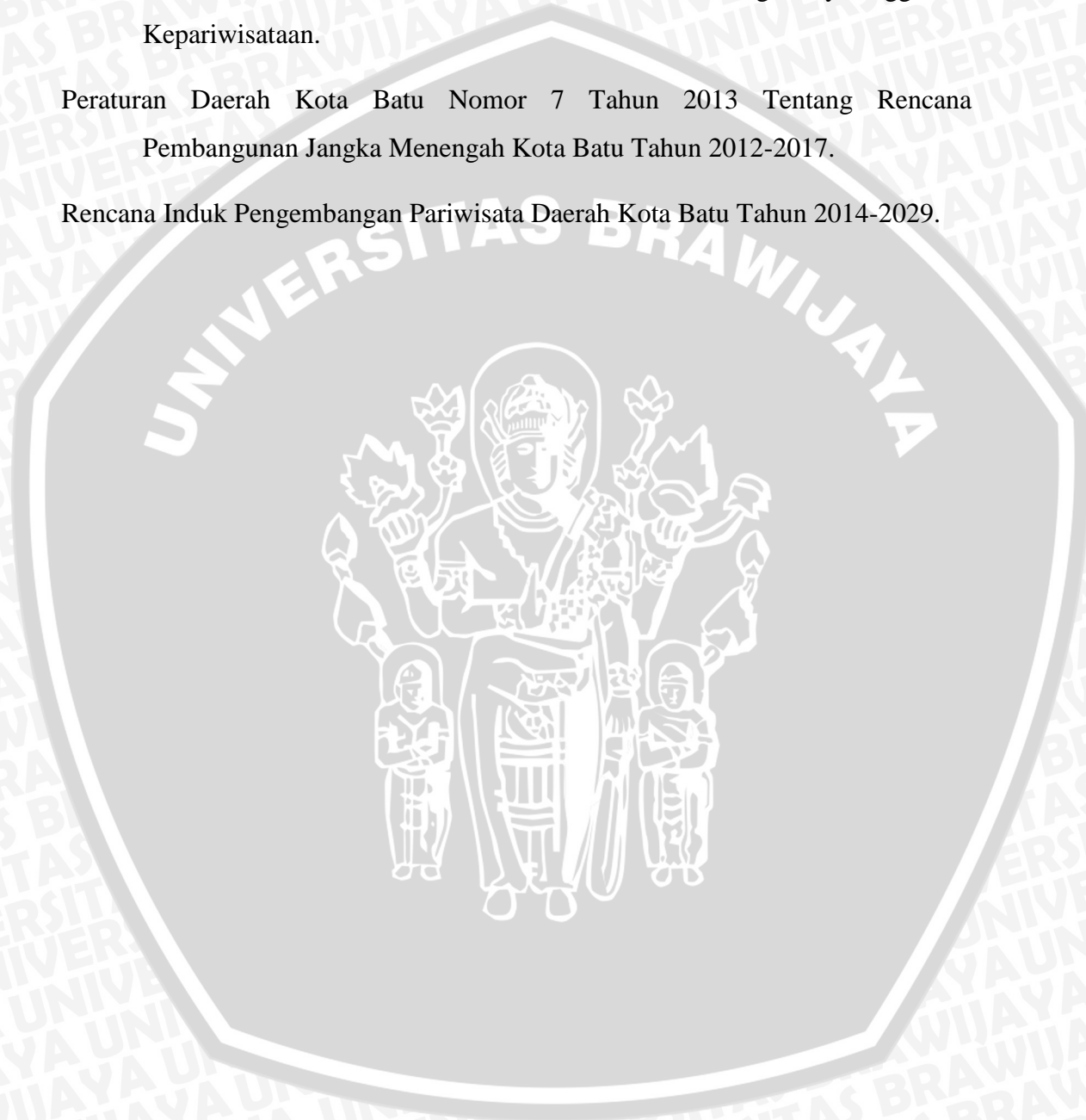
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu Tahun 2012-2017.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Batu Tahun 2014-2029.



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu, Kantor Desa Bumiaji, Kantor Desa Sumbergondo, Kusuma Agrowisata Convention Center

1. Apakah pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata Kota Batu sesuai dengan visi misi pemerintah daerah Kota Batu? Jika iya, pada point berapa?
2. Apakah terdapat perbedaan fokus dalam pengembangan agrowisata dari setiap periode kepemimpinan kepala dinas terkait?
3. Bagaimanakah hubungan dan pembagian peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata? Serta bagaimana mekanisme kerjasamanya? (Misalnya pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat serta swasta dengan masyarakat)
4. Apakah pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata dapat memberikan manfaat bagi semua pihak secara menyeluruh? Apa manfaat yang diperoleh dari masing-masing pihak? (Pemerintah, swasta, masyarakat)
5. Bagaimanakah strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata?
6. Apakah pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata sudah tercantum dalam dokumen-dokumen pemerintahan seperti Renstra, Perda, atau Perwalikota? Jika iya, pada poin berapa?
7. Apakah program pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata sudah terlaksana di Kota Batu?
8. Bagaimanakah proses pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata yang dilakukan?
9. Seberapa besar peran pemerintah dalam memonitoring pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata?
10. Apakah ada pembentukan tim khusus untuk memonitoring pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata di lapangan?
11. Apakah hasil dari monitoring tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam hal pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata?
12. Bagaimanakah tindakan pemerintah apabila dalam hasil evaluasi bahwa pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata masih belum berjalan secara efektif? Adakah tindakan preventif yang dilakukan pemerintah?
13. Apakah hasil dari evaluasi tersebut dijadikan bahan revisi untuk perbaikan dalam dokumen perencanaan?
14. - Faktor penghambat
- Faktor pendukung



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 9488 /UN10.3/PG/2015
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jalan Bukit Berbunga 13a Batu - Jawa Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswi :

Nama : Nanda Dayutami
Alamat : Jalan Candi 3E, Karang Besuki, Kota Malang
NIM : 115030601111005
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Minat : Perencanaan Pembangunan
Tema : Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)
Lamanya : 1 Juli – 23 September 2015
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 29 Juni 2015

a.n. Dekan
Jurusan Administrasi Publik


 Muhammad Choirul Saleh, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 9488 /UN10.3/PG/2015
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Kepala BAKESBANGPOLINMAS
Jalan Diponegoro 64, Bumiaji, Jawa Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswi :

Nama : Nanda Dayutami
Alamat : Jalan Candi 3E, Karang Besuki, Kota Malang
NIM : 115030601111005
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Minat : Perencanaan Pembangunan
Tema : Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)
Lamanya : 1 Juli – 23 September 2015
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 29 Juni 2015

a.n. Dekan
Kesa-jurusan Administrasi Publik



Dr. Chotul Saleh, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 900/UN10.3/PG/2015
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jalan Sultan Agung No. 7B, Kota Batu, Jawa Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswi :

Nama : Nanda Dayutami
Alamat : Jalan Candi 3E, Karang Besuki, Kota Malang
NIM : 115030601111005
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Minat : Perencanaan Pembangunan
Tema : Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal dan Agrowisata (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)
Lamanya : 1 Juli – 23 September 2015
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 29 Juni 2015

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Choiril Saleh
Drs. Choiril Saleh, M.Si

NIP. 19600112 198701 1 001

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU





**PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jalan Mustari Nomor 6, Telepon/Fax. (0341) 511901

KOTA BATU

Batu, 08 Juli 2015

Nomor : 072/054422.207/2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Dan
Pembangunan Daerah Kota Batu
2. Kepala Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Kota Batu
→ 3. Camat Bumiaji Kota Batu
di-

BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 29 Juni 2015 Nomor : 9488/UN10.3/PG/2015 Perihal Ijin Penelitian bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : NANDA DAYUTAMI
NIM : 115030601111005
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik Kota Batu
Fakultas/Universitas : FIA/Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Peran pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal Dan Agrowisata (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)

Data Yang Dicari : - Renstra SKPD yang berkaitan dengan pengembangan industri pariwisata
- RTRW Kota Batu tahun 2010-2030
- RIPPDA Kota Batu Tahun 2014-2029
- Data-data yang berkaitan dengan pengembangan industri pariwisata


Lokasi : 1. Bappeda Kota Batu
2. Disparbud Kota Batu
3. Desa Puntan, Bumiaji dan Sumbergondo Kecamatan - Bumiaji Kota Batu

Peserta : -
Waktu : 01 Juli 2015 s/d 23 September 2015

Selama melakukan kegiatan wajib menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

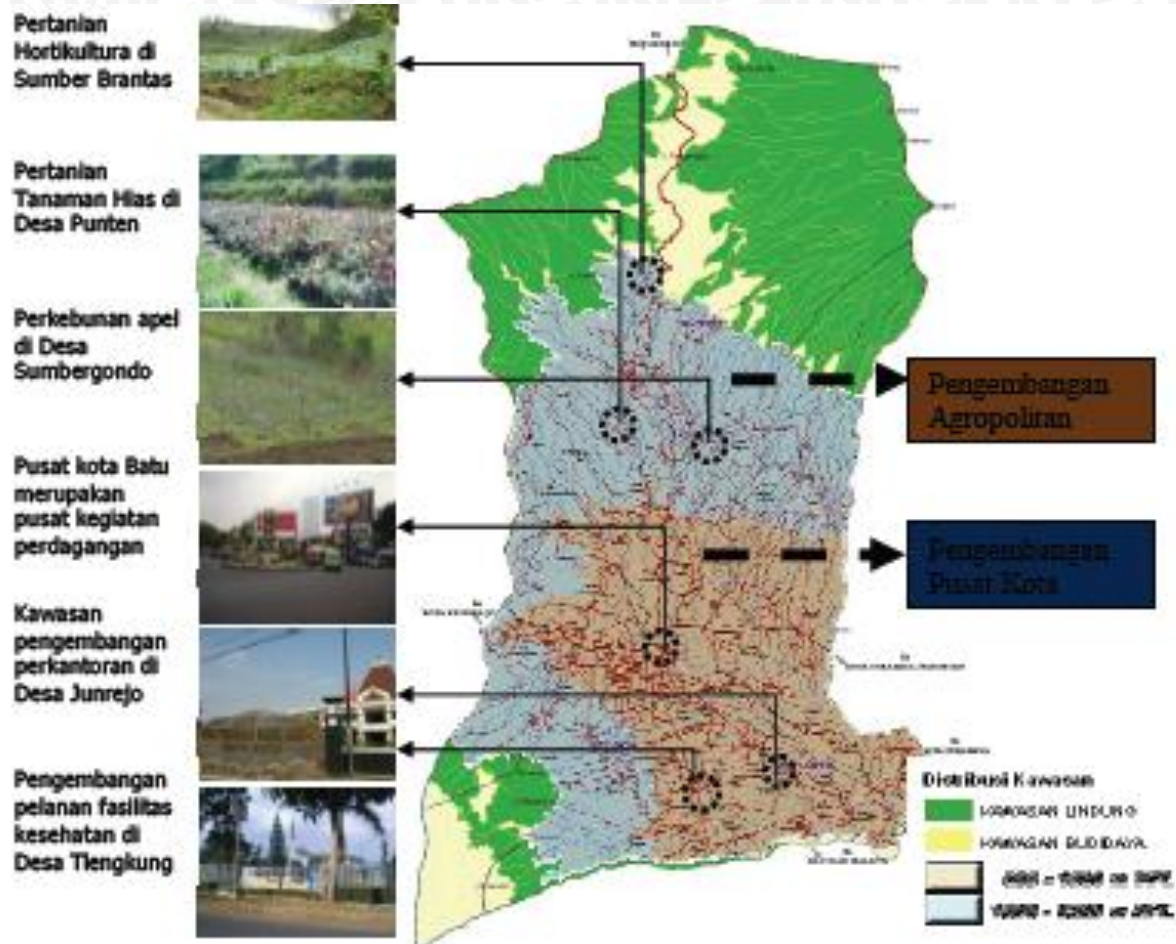
An. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BATU


THOMAS MAYDO, S.Sos
 Penata Tingkat I
 NIP. 19731209 199303 1 003

Tembusan :
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang

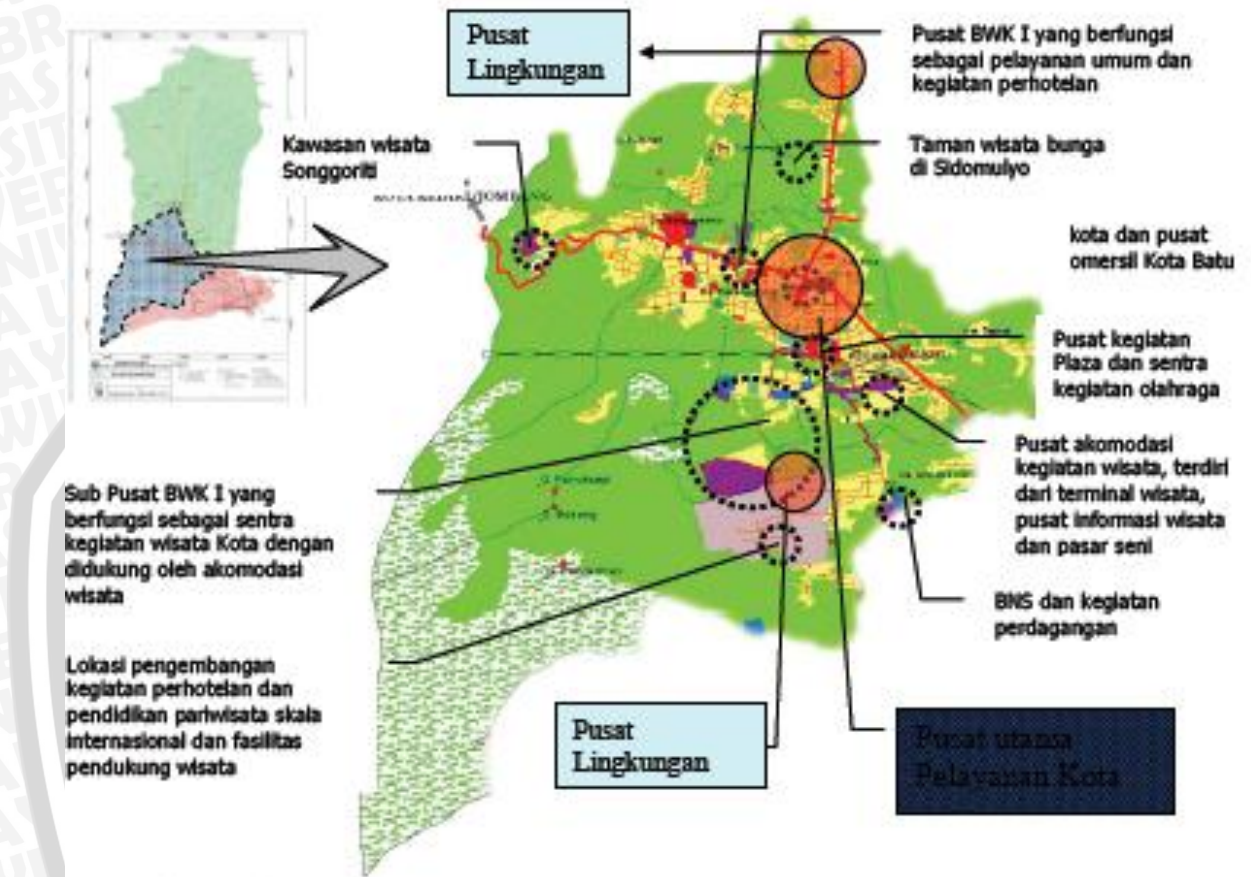


RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PERKOTAAN DAN AGROPOLITAN



Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010

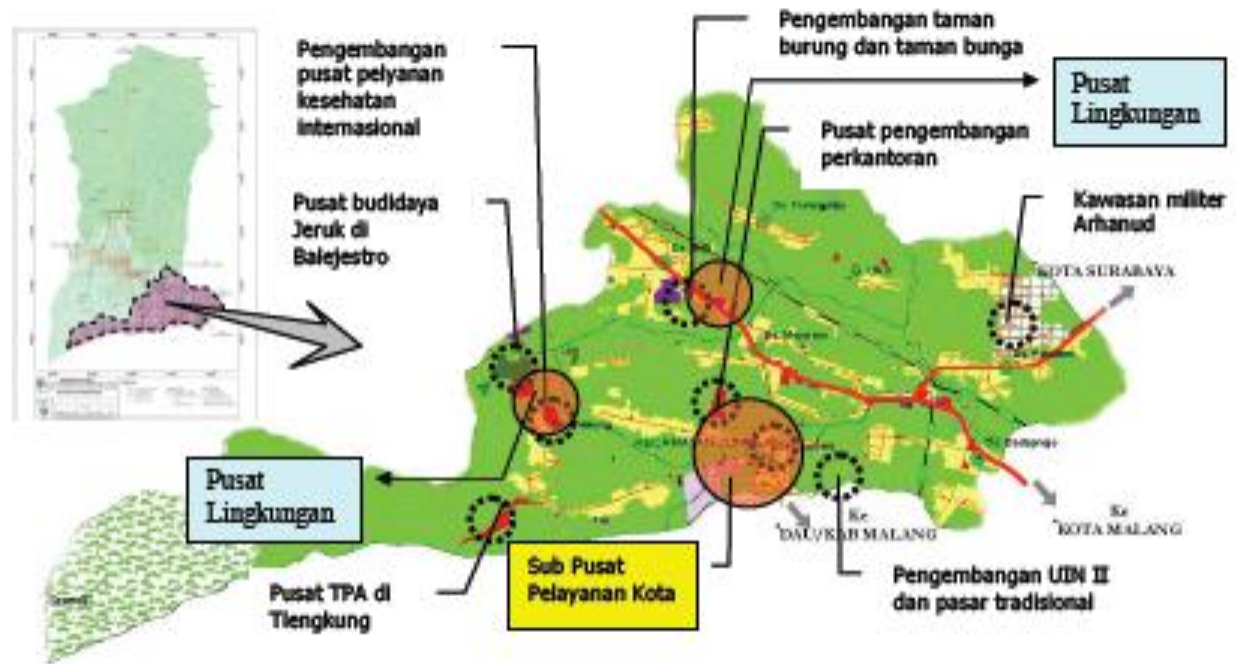
**RENCANA SISTEM DAN FUNGSI PERWILAYAHAN BWK I
KECAMATAN BATU (PUSAT PEMERINTAHAN)**



Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010



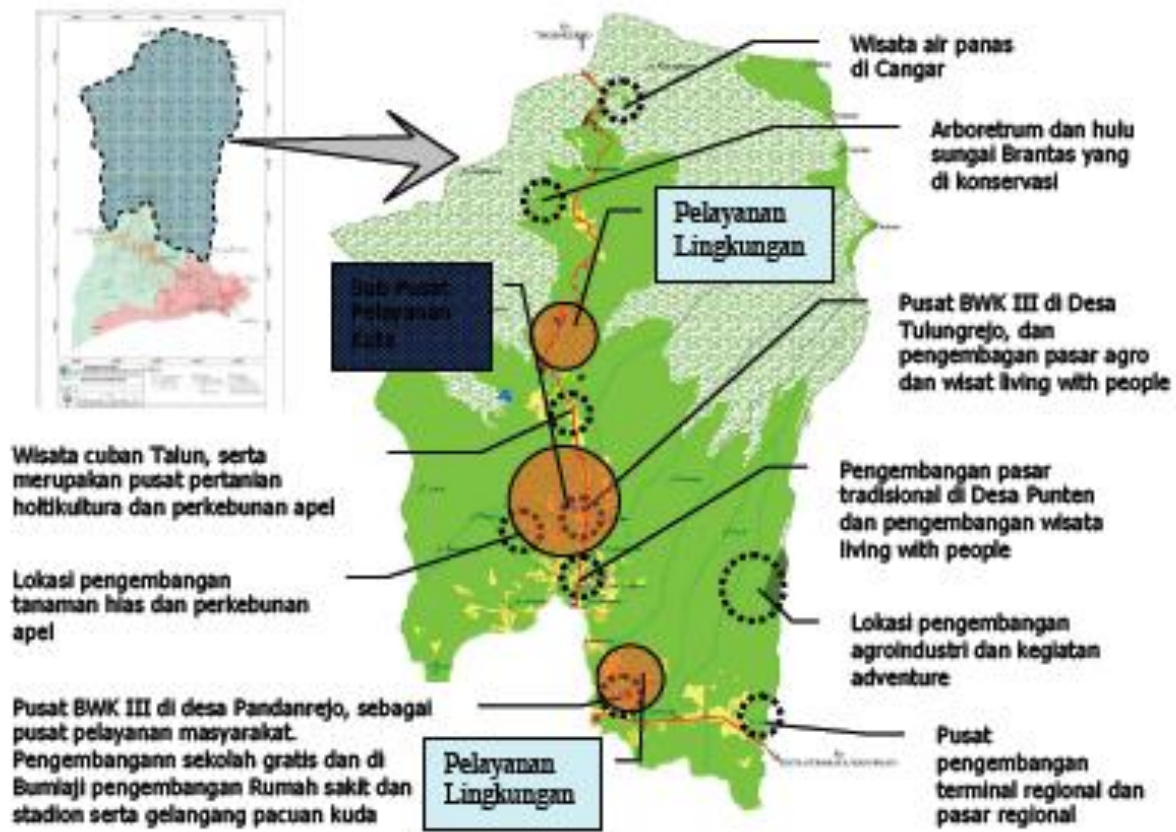
RENCANA SISTEM DAN FUNGSI PERWILAYAHAN BWK II KECAMATAN JUNREJO (PENGEMBANGAN PEMUKIMAN KOTA)



Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010



**RENCANA SISTEM DAN FUNGSI PERWILAYAHAN BWK III
KECAMATAN BUMIAJI (PENGEMBANGAN AGROPOLITAN DAN
AGROTURISM)**



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Nanda Dayutami
 Nomor Induk Mahasiswa : 115030601111005
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Mei 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat di Malang : Jl. Candi 3 E, Karang Besuki, Malang
 Alamat Asal : Jl. Merpati 1 Blok B.181 RT 04 RW 08
 Perumahan Duta Kranji, Bekasi Barat
 Fakultas/Minat : Ilmu Administrasi Publik / Perencanaan
 Pembangunan
 Email : nanda.dayutami@gmail.com



A. B. Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	SD Negeri Kranji 1 Bekasi	1999-2005
2.	SMP Negeri 14 Bekasi	2005-2008
3.	SMA Negeri 103 Jakarta	2008-2011
4.	Fakultas Ilmu Administrasi Minat Perencanaan Pembangunan Universitas Brawijaya	2011- 2016

B. Pengalaman Berorganisasi

No.	Posisi	Organisasi	Tahun
1.	Staff Muda	Himpunan Mahasiswa Jurusan	2011

		Adminsitration Publik (HUMANISTIK)	
2.	Staff Muda	Badan Eksekutif Mahasiswa FIA UB	2011
3.	Staff Internal HUMAS	Himpunan Mahasiswa Jurusan Adminsitration Publik (HUMANISTIK)	2012-2013
4.	Ketua Divisi Infokom	Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK)	2013-2014
6.	Sekretaris Departemen PSDM	Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK)	2014-2015

C. Pengalaman Kepanitiaan

No.	Posisi	Kepanitiaan	Tahun
1.	Peralatan dan Dokumentasi	Utahsarusa SMA N 103 Jakarta	2010
2.	<i>Steering Commite</i>	Temu Administrator Muda Indonesia (Temu AdMI)	2013
3.	<i>Steering Commite</i>	Temu Administrator Se- Jawa Timur (Tema Jatim)	2013
4.	<i>Steering Commite</i>	Pengabdian Masyarakat HUMANISTIK	2014
5.	<i>Steering Commite</i>	HUMANISTIK One Decade	2014

